UNIVERSITAS INDONESIA
Veritas, Probitas, Iustitia

FAKULTAS
HUKUM

BUKU PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM PASCASARJANA 2017 - 2018

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

KATA PENGANTAR

Segala puji Allah SWT yang atas bimbinganNya Buku Pedoman Akademik bagi mahasiswa program pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan buku pedoman akademik bagi para mahasiswa angkatan 2017. Untuk setiap angkatan, FHUI selalu menerbitkan buku pedoman akademik yang sudah disesuaikan dengan perkembangan terbaru.

Buku Pedoman Akademik ini sangat penting artinya bagi para mahasiswa karena selama menjalani pendidikan di FHUI, para mahasiswa akan selalu memerlukan informasi tentang berbagai hal, utamanya tentang kurikulum yang berlaku. Para mahasiswa diharapkan selalu mempelajari dan menyimpan dengan baik Buku Pedoman Akademik ini selama menjadi mahasiswa FHUI.

Buku ini berisi berbagai informasi tentang kurikulum yang berlaku di FHUI, tentang berbagai peraturan akademik dan tata tertib kehidupan kampus, tentang manajemen FHUI, tentang dosen, tentang informasi umum FHUI, termasuk sejarahnya, dan sebagainya. Buku ini dibuat lebih baik dari edisi buku sebelumnya.

Terima kasih kepada Tim Penyusun Buku Pedoman yang telah bekerja keras dan teliti untuk menyelesaikan buku ini. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi para mahasiswa FHUI dan juga dapat dimanfaatkan juga oleh para dosen, bidang studi dan manajemen FHUI.

Depok, Agustus 2017
Dekan,

Prof. Dr. Topo Santoso, SH., MH.

DAFTAR ISI

SELAYANG PANDANG

Sejarah dan Perkembangan 5
Visi dan Misi Universitas dan Fakultas 10
Tujuan, Sasaran dan Strategi Dasar 12
Program Pascasarjana 14
Kualitas dan Akreditasi 16
Organisasi Fakultas 17
Personalia 20
Pelaksana Akademik Program Pascasarjana 22
Bidang Studi 23
Fasilitas 25
Organisasi Mahasiswa 30

PENYELENGARA PENDIDIKAN

Kalender Akademik 31
Registrasi 31
Pembimbing Akademik 32
Kegiatan Belajar 33
Matrikulasi 33
Nilai Kredit 34
Ujian dan Sistem Penilaian 35
Putus Studi dan Cuti Akademik 36
Administrasi Hasil Belajar 37

PENYELENGARAAN PERKULIAHAN

Magister Ilmu Hukum 38
Magister Kenotariatan 42
Doktor Ilmu Hukum 44

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

Tata Tertib Akademik 47
Tata Tertib Non Akademik 48
Tata Tertib Pelaksanaan Ujian 49
Pengawasan dan Pelaksanaan Tata Tertib 50
Sanksi 50

KURKULUM PROGRAM STUDI

Mata Kuliah Wajib Program Studi 51
Mata Kuliah Wajib Peminatan 51

DESKRIPSI MATA KULIAH

Program Magister Ilmu Hukum 57
- Hukum Ekonomi 59
- Hukum dan Kehidupan Kenegaraan (HTN dan HAN) 63
- Hukum Perdagangan Internasional 66
- Hukum Ekonomi Islam 68
- Hukum dan Sistem Peradilan Pidana 71
- Hukum Transnasional 74
- Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Tekhnologi 76
- Hukum Sumber Daya Alam 78
- Hukum Keuangan Publik 80
- Hukum Ketenagakerjaan 82
- HAM dan Good Governance 84

Program Magister Kenotariatan 86
Program Doktor 94

PENGAJAR PROGRAM PASCASARJANA

Guru Besar Tetap 95
Guru Besar Tidak Tetap 98
Dosen 98

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN

1. PENDIRIAN FAKULTAS

Sekolah hukum yang pertama di Indonesia didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1909 dengan nama Rechtsschool. Sekolah ini ditempatkan di Batavia, sebagai realisasi permintaan P.A. Achmad Djajadiningrat, Bupati Serang, untuk keperluan mengisi tenaga-tenaga hukum di Pengadilan Kabupaten. Pada mulanya, sekolah ini terdiri dari Bagian Persiapan dan Bagian Keahlian Hukum. Kemudian ditingkatkan menjadi suatu lembaga pendidikan tinggi dengan nama Rechtshogeschool atau Faculteit der Rechtsgeleerdheid, yang dibuka pada 28 Oktober 1924 oleh Gubernur Jenderal D. Fockt di Balai Sidang Museum van het Bataviasche Venootschap van Kunsten en Wetenschappen di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Rechtshogeschool tersebut dipimpin seorang guru besar Belanda kenamaan, Prof. Mr. Paul Scholten. Setelah adanya Rechtshogeschool tersebut, maka Rechtschool kemudian ditutup pada 18 Mei 1928.

Para Mahasiswa Rechtshogeschool

Nama Rechtschool dan Rechtshogeschool dipergunakan dalam peraturan perguruan tinggi pada waktu itu, yaitu Hooger-Onderwijs Ordonantie. Awalnya mata kuliah yang diberikan pada Rechtshogeschool adalah Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Adat, Hukum dan Pranata Islam, Hukum Dagang, Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Bangsa-bangsa Hindia Belanda, Bahasa Melayu, Bahasa Jawa, Bahasa Latin, Filsafat Hukum, Asas-asas Hukum Perdata Romawi, Hukum Perdata Internasional, Hukum Intergentil, Kriminologi, Psikologi, Kedokteran Forensik, Hukum Internasional, Hukum Kolonial Luar Negeri, Sejarah Hindia Belanda dan Statistik. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal, maka terhadap 24 mata kuliah tersebut masih dapat ditambah untuk menjaga agar pendidikan hukum dapat mengikuti dan merespon perkembangan masyarakat.

Lama pendidikan di Rechthogeschool adalah lima tahun yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama diselesaikan dalam dua tahun dengan ujian kandidat (candidaatsexamen), dan tahap kedua dengan ujian doktoral (doctoraalexamen), tahun terakhir dikenal sebagai ujian doktoral bagian ketiga. Pendidikan di Rechtshogeschool dibagi dalam empat jurusan (richtingen) yang dapat dipilih oleh mahasiswa, yaitu Hukum Keperdataan, Hukum Kepidanaan, Hukum

Ketatanegaraan, dan Sosiologi-Ekonomi. Mereka yang telah lulus ujian ini berhak memakai gelar Meester in de Rechten. Gelar ini memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan untuk diangkat menjadi (a) advokat dan pengacara serta jabatan dalam bidang kehakiman lainnya; dan, (b) pegawai pemerintah serta dalam bidang pendidikan.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) Rechtshogeschool ditutup dan kemudian dibuka kembali pada 21 Januari 1946 dengan nama Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen sebagai bagian dari Nood-universiteit van Indonesie. Lembaga pendidikan tinggi ini didirikan oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA).

Lima bulan sebelumnya yaitu pada 19 Agustus 1945 Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah mendirikan lembaga pendidikan tinggi dengan nama Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Lembaga ini pada awalnya terdiri atas empat fakultas, yaitu Kedokteran, Farmasi, Hukum dan Sastra. Meskipun sebagian dari kegiatan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia ini dialihkan ke luar Jakarta—ke daerah Republik Indonesia yang pada waktu itu berpusat di Yogyakarta—tetapi sebagian besar kegiatan masih berada di Jakarta.

Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Pemerintah Belanda, pada 27 Desember 1949, disusul kemudian pada 30 Januari 1950, dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1950. Berdasarkan undang-undang tersebut Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan bagi pembinaan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

Pada 2 Februari 1950 dilakukan perundingan antara pihak Republik Indonesia, diwakili antara lain oleh dr. Abu Hanifah, dengan pihak Belanda, bertempat di Aula Fakultas Kedokteran, Jalan Salemba No. 6 Jakarta. Perundingan ini tidak berjalan dengan semestinya dan berakhir dengan kekacauan. Namun pada hari itu juga lahirlah suatu lembaga pendidikan baru, yang bernama Universiteit Indonesia—kemudian menjadi Universitas Indonesia.

Universitas ini merupakan penggabungan dari Universiteit van Indonesie dengan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah penggabungan dari Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen dengan Fakultas Hukum Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, dengan nama Fakulteit Hukum dan Pengetahuan Masyarakat yang dipimpin oleh Dekan Prof. Mr. Djokosoetono (1950-1962) dan Panitera Prof. Dr. Mr. Hazairin.

Pada 1959, dengan dibukanya Jurusan Publisistik, Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan—dikenal dengan singkatan FH & IPK—dipecah menjadi Fakultas Hukumdan Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan kemudian dikenal dengan nama Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan selanjutnya dikenal sebagai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kurikulum dan sistem pendidikan yang selalu berlaku di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat pada dasarnya mengambil dari Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen. Perubahan terjadi pada 1969 melalui penyesuaian dengan keputusan yang telah dihasilkan pada Konferensi Dinas Antar Fakultas Hukum Pembina se-Indonesia di Yogyakarta, pada 29-31 Agustus 1968, kemudian diikuti dengan penyesuaian sejalan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0198/U/1972, tertanggal 30 Desember 1972 tentang kurikulum minimal. Kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Perubahan terakhir terjadi pada tahun 2015 dengan terbitnya Keputusan Rektor UI Nomor 1740/SK/R/UI/2015 Tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

2. DEKAN - DEKAN

Prof. MR. Djokosoetono
(1950-1962)

Prof. Soejono Hadinoto, SH.
(1962-1964)

Prof. R. Subekti, SH.
(1964-1966)

Prof. Oemar Seno Adji, SH.
(1966-1968)

Prof. R. Soekardono, SH.
(1968-1970)

Prof. Padmo Wahjono, SH.
(1970-1978)

Ny. S.J. HanifaWiknjosastro, SH.
(1978-1984)

Prof. Mardjono Reksodiputro, SH., MA.
(1984-1990)

Prof. Dr. Ch. Himawan, SH., LLM.
(1990-1993)

Prof. R.M. Girindro Pringgodigdo, SH.
(1993-1998)

Pejabat Dekan
Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, SH., MH. (1998-1999)

Prof. Abdul Bari Azed, SH., MH.
(1999-2004)

Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LLM., PhD.
(2004-2008)

Prof. Safri Nugraha, SH., LLM., PhD.
(2008-2011)

Pejabat Dekan
Dr. Siti Hajati Hoesin, SH., MH.
(2011- 2013)

Prof. Dr. Topo Santoso, SH., MH.
(2013-saat ini)

3. KETUA PROGRAM PASCASARJANA

Pada masa-masa awal berdirinya, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara struktural berada di bawah Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya kemudian hingga saat ini, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini secara struktural berada di bawah Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Adapun para Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang pernah menjabat sejak tahun 1982 hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang pertama adalah Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML. yang menjabat sekitar 18 tahun (1982-2000). Beliau diangkat oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (saat itu), SJ. Hanifa, SH. Doktor lulusan Universitas Leiden di Belanda kelahiran Manonjaya, Tasikmalaya pada tanggal 9 Desember 1926, lebih dikenal sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), dan bahkan pernah menjabat sebagai Rektor UGM yang ke-8 (1986-1990). Ahli Hukum Lingkungan yang antara lain juga pernah menjabat sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag dan Sekretaris Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup ini telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya karena kecelakaan pesawat Garuda Indonesia di Bandara Adisucipto Yogyakarta, pada tanggal 7 Maret 2007.

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kedua adalah Prof. Dr. Erman Radjagukguk, S.H., LL.M yang menjabat selama sekitar 5 tahun (2000-2005). Beliau adalah Doktor lulusan University of Washington di Seattle, Amerika Serikat. Sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Juga pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ahli Hukum Ekonomi kelahiran Padang pada tanggal 1 Juni 1946 ini antara lain juga pernah menjabat sebagai Dirjen Hukum dan Perundang-Undangaan pada Departemen Kehakiman RI – saat ini bernama Dirjen Peraturan Perundang-Undangaan Kementerian Hukum dan HAM RI dan kemudian juga sebagai Wakil Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Pada 12 Juni 2013, Guru Besar yang produktif menulis buku ini menerima penghargaan The Lifetime Achievement Award dari Asian Law Center, University of Washington School of Law, Seattle, Amerika Serikat.

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang ketiga adalah Dr. Jufrina Rizal, S.H., MA. Beliau adalah Doktor lulusan Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) di Paris, Perancis. Dr. Jufrina Rizal. S.H, M.H dilahirkan di Payakumbuh pada tanggal 6 Februari 1950 dan menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana sekitar 4 tahun (Tahun 2005 - 2009). Sebelum menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beliau juga pernah selama beberapa tahun menjabat sebagai Wakil Ketua Program Pascasarjana dalam periode kepemimpinan Prof. Dr. Erman Radjagukguk. S.H, LL.M.

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang keempat adalah Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. Beliau memperoleh Doktor pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada Tahun 2003. Prof.Dr Rosa Agiustina, S.H,M.H dilahirkan di Purwokerto pada tanggal 31 Agustus 1959 ini adalah Guru Besar Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana sekitar 5 tahun (2009-2014). Pada awal karirnya Prof. Rosa Agustina aktif terlibat dalam kegiatan bantuan hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Salah satu hasil karya beliau dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kelima saat ini, menjabat sejak Januari 2014 adalah Prof. Dr.Satya Arinanto,S.H.,M.H. Doktor lulusan Program Pascasarjana FHUI yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 16 Nopember 1965 ini adalah Guru Besar Hukum Tata Negara FHUI. Di Lingkungan FHUI pernah menjabat sebagai Sekretaris Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum, Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara, Sekretaris Pembantu Dekan Bidang Akademik, Sekretaris Pembantu Dekan Bidang Kerjasama, Pembantu Dekan Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi Hukum, Ketua Senat Akademik Fakultas (SAF) dan Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara. Di luar FHUI, pernah menjabat Sekretaris Umum Panitia Pengawas Pemilihan Umum 1999 Tingkat Pusat (Panwaslu Pusat); Sekretaris Tim Ahli MPR Bidang Hukum; Plt. Deputi Hukum dan Perundang-undangan pada Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia; Legal and Judicial Reform Consultant di Partnership for Governance Reform in Indonesia; National Project Manager di Parliamentary Reform and Public Participation Project pada Partnership for Governance Reform in Indonesia dan United Nations Development Program (UNDP); Indonesian Law Adviser dalam beberapa proyek yang terkait Legal and Judicial Reform pada United States Agency for International Development (USAID) dan Australian Agency for International Development (AUSAID); Asisten Hakim pada Mahkamah Konstitusi RI; Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum; Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia; dan Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

VISI DAN MISI UNIVERSITAS DAN FAKULTAS

VISI & MISI UNIVERSITAS

Visi Universitas Indonesia

Berdasarkan Statuta UI (PP No. 68 Tahun 2013), UI memiliki visi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.

Mengacu pada kebijakan umum arah pengembangan UI, rencana pembangunan UI jangka panjang 2015-2035 dengan memperhatikan tantangan global, capaian Renstra UI tahun 2007-2012, dan laporan tahunan UI pada masa transisi 2012-2014 serta analisa kesenjangan saat ini maka Visi UI pada periode 2015-2019 adalah menjadi universitas riset kelas dunia.

Misi Universitas Indonesia

Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang berbasis riset di Universitas untuk :

a. Pengembangan Ilmu, Teknologi, Seni, dan Budaya: serta
b. Mengupayakan pengggunaanya untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dan kemanusiaan.

Mewujudkan Universitas Indonesia menjadi PTN BH yang mandiri dan unggul serta mampu menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun global, menjadi unggulan di Asia Tenggara.

VISI & MISI FAKULTAS

Sejalan dengan visi-misi UI tersebut, FHUI telah menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra) 2016-2019. Di dalam Renstra tersebut dinyatakan visi fakultas, yaitu Menjadi pusat ilmu hukum unggulan dan berdaya saing di Asia Tenggara.

Visi Fakultas

Statuta UI menyatakan bahwa "UI memiliki visi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat dan dunia. Visi FHUI dalam Rencana Strategis 2010-2015 adalah "Fakultas Hukum yang berbasis riset dan kompetensi kelas dunia." Dalam perjalanannya, visi ini harus mengalami penyelarasan dengan Visi UI. Visi yang baik paling tidak mempunyai tiga unsur. Pertama, visi tersebut secara substansial mampu mengerahkan segala sumber daya institusi untuk mencapainya. Kedua, para pemangku kepentingan mempunyai rasa memiliki terhadap visi tersebut. Ketiga, sebagai antisipasi proses akreditasi, vis tersebut singkat, padat, dan jelas, sehingga semua pemangku kepentingan dapat mencernanya.

Sejalan dengan uraian diatas, visi FHUI dalam Renstra adalah **"Menjadi pusat ilmu hukum unggulan dan berdaya saing di Asia Tenggara".**

Misi Fakultas

Untuk mencapai visi tersebut, maka Fakultas menyatakan misinya sebagai berikut:

a. a. Mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang hukum;
b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas;
c. Mengembangkan ilmu hukum melalui penelitian; dan
d. menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi FHUI.

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DASAR

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

1.1 Tujuan

Terkait dengan pencapaian visi tersebut di atas, FHUI menetapkan tujuannya sebagai berikut:

a. menciptakan komunitas pendidikan hukum yang inklusif, berdasar pada adab, kepercayaan, integritas, saling menghargai dan kebhinekaan dalam lingkungan yang aman dan bersahabat;
b. menyiapkan peserta didik di bidang pendidikan tinggi hukum agar menjadi lulusan yang cerdas dan bernurani melalui penyediaan program pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga menerapkan, dan memajukan hukum di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat bersaing di tingkat nasional dan regional/ASEAN.
c. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk meningkatkan martabat dan kehidupan masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional;
d. mendorong dan mendukung peran serta aktif sivitas akademika dalam pembangunan hukum di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berpihak kepada kepentingan nasional;
e. memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi hukum, dan bekerjasama dengan lembaga dan asosiasi profesi terkait, sehingga lulusan FHUI dapat berperan sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya;
f. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada bangsa dan Negara, dan dunia melalui kolaborasi, kemitraan, dan kesempatan untuk pengayaan budaya hukum dan pendidikan hukum berkelnjutan; dan
g. berinvestasi pada pengembangan sumber daya yang profesional bagi sivitas akademika dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif melalui Tridharma.

1.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang akan dituju:

1.2.1 Tata Kelola:

Pembenahan system administrasi FHUI berdasarkan Prosedur Operasional Baku yang terpadu dan transparan.

1.2.2 Sumber Daya Manusia

1.2.2.1 Sistem rekruitmen, pengelolaan, dan evaluasi sumber daya manusia dosen dan tenaga kependidikan yang jelas berbasis kompetensi;
1.2.2.2. Terpetakannya jumlah, kepakaran, kebutuhan dosen dan asisten dosen pada semua bidang studi dan tenaga kependidikan melalui mekanisme audit sumber daya manusia;
1.2.2.3 Tindak lanjut hasil audit sumber daya manusia;
1.2.2.4 Peningkatan jumlah guru besar tetap;
1.2.2.5 Parameter penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu;
1.2.2.6. Terserapnya dana untuk pengembangan sumber daya manusia.

1.2.3 Keuangan

1.2.3.1 Transparansi keuangan atas pengelolaan aset fakultas;
1.2.3.2 Prosedur Operasional Baku penerimaan hibah dari pihak non-UI, yang menjamin penerimaan hibah bukan merupakan hasil tindak pidana, gratifikasi, dan tidak mengurangi kemandirian institusi;
1.2.3.3 Prosedur Operasional Baku perjanjian penelitian antara sivitas akademika FHUI dengan pihak non-UI, yang tidak mengurangi kemandirian institusi;
1.2.3.4 Audit yang dilakukan oleh auditor eksternal

atas penerimaan dan pengeluaran dana yang diperoleh dari pihak ketiga;

1.2.3.5 Peningkatan pendapatan dari kegiatan akademis dan non-akademis untuk kesejahteraan sivitas akademika FHUI.

1.2.4. Sarana dan Prasarana

1.2.4.1 Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang sesuai dengan Pedoman Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan;

1.2.4.2 Ruang kerja pribadi semua dosen;

1.2.4.3 Penambahan ruang kelas dan peningkatan fasilitas penunjang perkuliahan;

1.2.4.4. Jaringan teknologi informasi yag handal;

1.2.4.5 Penyelarasan dan harmonisasi desain dan arsitektur dalam perenovasian dan pembangunan di lingkungan FHUI;

1.2.4.6 Badan Penerbit FHUI dan jurnal-jurnal hukum yang terkelola professional;

1.2.4.7 Peningkatan jumlah koleksi dan fasilitas Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soedirman Kartohadiprojo;

1.2.4.8 Pangkalan data yang berisikan informasi kegiatan penelitian, karya ilmiah, kepakaran, pengabdian masyarakat, dan kegiatan non-akademis yang melibatkan sivitas akademika FHUI;

1.2.4.9 Akses ke pangkalan data hukum yang disediakan oleh lembaga mitra kerajsama FHUI.

1.2.5. Pendidikan

1.2.5.1 Terakreditasinya semua sub-program dengan hasil terbaik berdasarkan Badan Akreditasi Nasional- Perguruan Tinggi;

1.2.5.2 Terakreditasinya sub-program sarjana oleh ASEAN University Network dan dengan hasil baik.

1.2.5.3 Kurikulum Program Sarjana yang menghasilkan lulusan yang siap berkembang;

1.2.5.4 Kurikulum Sub-Program Magister Kenotariatan yang menghasilkan calon notaris yang kompeten;

1.2.5.5. Kurikulum Sub-Program Magister Ilmu Hukum dan Sub-Program Doktor yang dapat menjadi akademisi dan/atau peneliti;

1.2.5.6 Evaluasi penyelenggaraan Sub-Program Sarajan Kelas Internasional yang sesuai dengan tujuan pendidikan FHUI.

1.2.5.7 Rencana kerja tahunan semua bidang studi terkait kegiatan ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum;

1.2.5.8 Adanya mekanisme penyelesaian masalah non-akademis yang dihadapi oleh mahasiswa dan berpengaruh pada kegiatan akademik.

1.2.6. Riset dan Pengabdian Mayarakat

1.2.6.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian ilmu hukum;

1.2.6.2 Pelaporan hasil kegiatan akademis di dalam dan luar negeri dan tindak lanjutnya kepada pimpinan fakultas.

1.2.7. Kemahasiswaan

1.2.7.1 Adanya konselor akademik dan non-akademik untuk membantu keberhasilan kegiatan akademik;

1.2.7.2 Resosialisasi tata tertib kehidupan kampus;

1.2.7.3 Kegiatan kemahasiswaan yang terencana dan tertata dengan transparan dan akuntabel.

Menyiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu hukum, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ILMU HUKUM

Sebagai kelanjutan dari Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyelenggarakan Program Studi Magister Ilmu Hukum. Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia nomor 49/SK/D/FH/10/79 tertanggal 20 Oktober 1979 dibentuk Panitia Kerja Persiapan/ Penyusunan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dua tahun kemudian, pada tahun 1981, Dekan Fakultas Hukum membuka Pendidikan Pasca Program Studi Ilmu Hukum yang saat itu bernama Penyelenggara Pendidikan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada awal penyelenggaraannya Pendidikan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia mempunyai tiga konsentrasi yaitu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Hukum dan Ekonomi, serta Hukum dan Ilmu Pengetahuan Islam. Pada tahun 1982, dengan dibentuknya Fakultas Pascasarjana, penyelenggaraan pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum kemudian dialihkan dari Fakultas Hukum ke Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Program Studi Ilmu Hukum dimasukkan dalam Bidang Ilmu Hukum.

Pada tahun 1994, bertambah satu konsentrasi baru, yaitu Konsentrasi Hukum Kenegaraan, yang menggabungkan dua cabang ilmu hukum, yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Konsentrasi ini di tambahkan sesuai dengan keadaan, SDM Dosen dan kebutuhan ilmu hukum secara umum. Bersamaan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional, pendidikan pascasarjana berubah pelaksanaannya dari Fakultas Pascasarjana ke Program Pascasarjana, pendidikan program pascasarjana yang berdasarkan mono ilmu dikembalikan ke Fakultas pengampu ilmunya, sedangkan program pascasarjana berdasarkan multi ilmu tetap pada Fakultas/Program Pascasarjana. Pada tahun 1999, Program Pascasarjana ilmu hukum, kembali ke Fakultas Hukum, menjadi Pascasarjana Fakultas Hukum UI.

Pada tahun 2000 tersebut, dengan pelaksana pengelolaan program yang baru, Pascasarjana Fakultas Hukum UI mengembangkan kesempatan untuk masyarakat luas, dengan membuka Kelas Sore. Kelas ini lebih ditujukan bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja. Konsentrasi yang dibuka disesuaikan dengan kebutuhan, permintaan pasar dan keberadaan SDM Dosen, yaitu Konsentrasi Hukum Ekonomi Kelas Sore. Jumlah dan jenis konsentrasi terus berkembang dengan memperhatikan berbagai kebutuhan di masyarakat. Begitu pula dengan kelas-kelas khusus kerjasama, yang bekerjasama dengan beberapa instansi yang akan mengembangkan SDM-nya di bidang hukum. Tercatat beberapa instansi yang pernah dan masih bekerjasama dalam bentuk kelas khusus, yaitu Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM), Kejaksaan, Departemen Perdagangan, MA, KPK, dan Kementrian ESDM, serta organisasi internasional World Intellectual Property Organization (WIPO).

Saat ini, Program Magister Ilmu Hukum memiliki 11 (sebelas) peminatan sebagai berikut:

1. Peminatan Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam;
2. Peminatan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
3. Peminatan Hukum Kenegaraan;
4. Peminatan Hukum Ekonomi;
5. Peminatan Hukum Transnasional;
6. Peminatan Hukum Perdagangan Internasional;
7. Peminatan Hukum Kekayaan Intelektual;
8. Peminatan Hukum Sumber Daya Alam;
9. Peminatan Hukum HAM dan *Good Governance;*
10. Peminatan Hukum Keuangan Publik;
11. Peminatan Hukum Ketenagakerjaan.

Empat peminatan baru dimulai pada 2015, yaitu Peminatan HAM dan *Good Governance;* Peminatan Hukum Keuangan Publik; Peminatan Hukum Ketenagakerjaan dan Peminatan Hukum Sumber Daya Alam.

Saat ini Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Program Magister Ilmu Hukum berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2017 untuk Kelas Reguler sebesar Rp. 10.000.000. per semester dan Dana Pengembangan (DP) sebesar Rp. 11.000.000 yang dibayarkan satu kali pada saat pendaftaran awal. Selanjutnya kelas khusus sebesar Rp 12.000.000 per semester dan Dana Pengembangan (DP) sebesar Rp. 13.000.000 yang dibayarkan satu kali pada saat pendaftaran awal.

MAGISTER KENOTARIATAN

Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1950 mulai menyelenggarakan Pendidikan Notariat. Pada saat itu tidak ada persyaratan mengenai latar belakang pendidikan yang dimiliki seseorang untuk dapat diterima sebagai mahasiswa notariat. Perubahan terjadi pada tahun 1965, saat itu yang dapat diterima sebagai mahasiswa notariat, adalah bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum. Persyaratan tersebut tetap berlaku sampai sekarang. Sejak tahun 1965, dengan dihapusnya Ujian Negara untuk tingkat I dan tingkat pendidikan Notariat, maka pendidikan ini secara resmi bersifat universiter dan disebut sebagai Jurusan Notariat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan lama pendidikan dua tahun, yang selanjutnya pengelolaannya dikenal dengan Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada tahun 1992 Program Spesialis Notariat dan Pertanahan diubah namanya menjadi Program Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada tahun 1994 diubah kembali menjadi Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 76/DIKTI/ Kep/2000 tertanggal 7 April 2000 Program Spesialis tersebut diubah statusnya menjadi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya pada Program Magister Kenotariatan mendapatkan gelar Magister Kenotariatan disingkat M. Kn.

Perubahan tersebut dilakukan karena: pertama adanya PP No. 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi yang hanya mengakui dua jalur pendidikan yaitu pendidikan akademik dan profesional. Pendidikan akademik terdiri atas Program Sarjana dan Program Pascasarjana yang terdiri dari program magister dan doktor. Kedua terkait dengan persyaratan Magister Kenotariatan untuk menjadi Notaris.

Ketika itu, Perguruan Tinggi Negeri penyelenggara Program Spesialis Notariat (USU, UI, UNPAD, UGM, UNDIP dan UNAIR) bersepakat untuk membahas status dari pendidikan notariat berkaitan dengan perubahan peraturan tersebut. Dari pertemuan-pertemuan antara ke 6 (enam) Perguruan Tinggi tersebut dengan Konsorsium Ilmu Hukum - Direktorat Pendidikan Tinggi dan Departemen Kehakiman disepakati antara lain:

Program Pendidikan Spesialis diubah statusnya menjadi Program Studi Magister Kenotariatan; Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada saat Program Magister dibuka, mahasiswa Program Spesialis dapat pindah ke Program Magister atau tetap menjadi mahasiswa Program Spesialis yang kebijakannya diserahkan kepada Perguruan Tinggi masing-masing; Mahasiswa Program Spesialis diberi kesempatan menyelesaikan studinya sampai dengan tahun 2004;

Perubahan status dari Program Spesialis ke Program Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dituangkan dalam SK Dirjen Dikti No. 76/DIKTI/ Kep/2000. Program Magister Kenotariatan dimulai pada tahun akademik 2000/2001 sedangkan masa transisi Program Spesialis sampai tahun akademik 2003/2004. Pada tahun akademik 2001/2002 – 2012/2013 dibuka Program Magister kelas khusus penyetaraan yang pesertanya adalah lulusan Program Spesialis Notariat.

Pada saat ini, Program Magister kenotariatan tidak hanya diselenggarakan oleh 6 (enam) Perguruan Tinggi Negeri (PTN), penambahan beberapa Perguruan Tinggi Negeri, dan juga Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyelenggarakan Pendidikan Kenotariatan sebagai program Magister di Fakultas Hukum masing-masing. Namun demikian peminat pada Program Magister Kenotariatan tetap berjumlah besar. Oleh karena itu, penerimaan mahasiswa diadakan pada setiap semester (Gasal dan Genap) dengan daya tamping yang disesuaikan dengan kapasitas dan fasilitas yang tersedia.

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Program Magister Kenotariatan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2017 sebesar Rp. 12.000.000. per semester dan Dana Pengembangan (DP) sebesar Rp. 13.000.000 yang dibayarkan satu kali pada saat pendaftaran awal.

DOKTOR ILMU HUKUM

Pada tahun 1983 mulai dibuka Program Doktor berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 061/SK/R/UI/1983 tentang Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Universitas Indonesia.

Lebih lanjut, sebagai pelaksanaan PP No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional, pendidikan pascasarjana berubah pelaksanaannya dari Fakultas Pascasarjana ke Program Pascasarjana. Kemudian sesuai dengan penerbitan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 311 tahun 1991 tentang Penutupan Fakultas Pascasarjana dan Pembukaan Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas dan Pascasarjana ke Program Pascasarjana. Kemudian sesuai dengan penerbitan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 311 tahun 1991 tentang Penutupan Fakultas Pascasarjana dan Pembukaan Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas dan Institut Negeri, program doktor program studi ilmu hukum dikembalikan ke Fakultas Hukum UI.

Pada tahun 1993 Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum kemudian disahkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dengan Surat Keputusan No. 577/DIKTI/Kep/1993.

Seperti pada Program Magister, sejak tahun 1999, pelaksanaan program doktor dengan disiplin mono ilmu dikembalikan ke fakultas pengampunya, maka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum pada Pascasarjana UI dikembalikan ke Fakultas Hukum, menjadi Pascasarjana Fakultas Hukum, Program Doktor. Program Doktor FHUI hingga Juni 2016 telah menghasilkan 230 Doktor. Lulusan Program Doktor FHUI, tersebar di berbagai posisi seperti di kementerian, pemerintahan, perguruan tinggi, LSM dan pengacara. Lulusan-lulusan tersebut menjadi agent of change di tempatnya masing-masing. Diantaranya adalah dalam hal kurikulum dan sistem pengajaran di berbagai program Doktor Hukum diberbagai universitas di Indonesia.

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Program Doktor Ilmu Hukum berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2017 sebesar Rp. 20.000.000. per semester dan Dana Pengembangan (DP) sebesar Rp. 22.000.000 yang dibayarkan satu kali pada saat pendaftaran awal.

KUALITAS DAN AKREDITASI

Program Magister Ilmu Hukum, Program Magister Kenotariatan dan Program Doktor Ilmu Hukum FHUI sampai saat ini telah menghasilkan banyak lulusan, dengan kiprahnya yang terus meningkat di tengah masyarakat. Kualitas penyelenggaraan telah diakui secara nasional dengan diperolehnya Nilai A (Baik Sekali) dalam akreditasi nasional oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), yaitu:

1. Program Magister Ilmu Hukum Keputusan BAN PT No. 218/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013). (Peringkat A).
2. Program Doktor (Kep BAN PT No. 1157/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2015 (Peringkat A).
3. Program Magister Kenotariatan (Kep BAN PT No. 1156/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2015. (Peringkat A)

ORGANISASI FAKULTAS

1. PIMPINAN

Penyelenggaraan program studi di FHUI dipimpin oleh seorang dekan yang dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan serta Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum.

Dekan adalah penanggung jawab umum pelaksanaan visi dan misi universitas dalam bidang ilmu sesuai bidang ilmu fakultasnya dengan mengoptimalkan sumber daya yang berada di bawah kendali fakultas.

Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan membantu dekan dalam menyusun rencana dan strategi pengembangan akademik (Tri Dharma Perguruan Tinggi) beserta penganggarannya, serta menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan akademik yang dilakukan fakultas dan memfasilitasi kesejahteraan mahasiswa sehingga proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di fakultas berlangsung dengan baik.

Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum membantu Dekan dalam menyusun rencana dan strategi pengembangan sumber daya penunjang akademik (Tri Dharma Perguruan Tinggi) beserta penganggarannya, serta menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan sumber daya manusia, keuangan, sarana-prasarana akademik dan non-akademik, dan kerjasama dengan pihak eksternal sehingga proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di fakultas berlangsung dengan baik.

2. UNIT – UNIT KERJA

Dalam menjalankan tugasnya, pimpinan fakultas dibantu oleh para manajer, ketua/Kepala unit kerja yang tugas masing-masingnya adalah sebagai berikut:

Kepala Sekretariat Pimpinan mengelola surat masuk dan surat keluar Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, membuat draft Surat Keputusan Dekan ataupun Surat Tugas, serta memfasilitasi staf pengajar yang diminta/ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli, menghadiri seminar/konfrensi baik sebagai pembicara maupun peserta.

Manajer Pendidikan mengelola administrasi pendidikan di lingkungan fakultas serta berkoordiansi dan memantau pengelolaan laboratorium, laboratorium komputer dan fasilitas akademik lainnya agar proses pendidikan fakultas dapat berlangsung dengan baik.

Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat mengelola administrasi penelitian oleh dosen di lingkungan fakultas serta berkoordinasi dan memantau pengelolaan pusat-pusat penelitian dan para pengajar di lingkungan fakultas serta mengelola administrasi pengabdian masyarakat oleh dosen di lingkungan fakultas.

Manajer Ventura, Kerjasama dan Hubungan Alumni mengoordinasi dan memantau pusat-pusat ventura di lingkungan fakultas, menjalin dan mengelola kegiatan dan administrasi kerjasama fakultas serta mengoordinasi dan memantau pengelolaan kerjasama oleh pusat-pusat ventura di lingkungan fakultas, dan menjalin dan mengelola hubungan fakultas dengan alumni.

Manajer Umum mengelola administrasi dan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan sumber

Kuliah Umum Prof. Dr. Henk Kummeling

daya manusia, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di fakultas dapat berlangsung dengan baik, serta mengelola kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan dan pemeliharaan berbagai peralatan dan fasilitas fisik dalam lingkungan fakultas yang diperlukan sehingga proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dapat berlangsung optimal.

Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) memantau dan mengevaluasi penerapan sistem penjaminan mutu akademik, pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan mutu akademik di seluruh lingkungan fakultas, mengembangkan dan mendorong pelaksanaan penjaminan mutu akademik di seluruh departemen dan/atau program studi di lingkungan fakultas, dan memberikan asupan dan rekomendasi kepada pimpinan fakultas yang terkait dengan penjaminan mutu akademik agar memastikan kualitas akademik yang tinggi.

Ketua Djokosoetono Research Center (DRC) Memimpin unit yang melaksanakan fungsi sebagai pusat riset sekaligus mengoordinasikan kegiatan riset dan kegiatan ilmiah lainnya dari beberapa pusat kajian yang ada di FHUI.

Ketua Badan Penerbit Memimpin unit yang melaksanakan fungsi penerbitan buku-buku yang ditulis oleh para pengajar FHUI dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan penerbitan media cetak serta menerbitkan Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Kepala Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat FHUI dalam bentuk layanan konsultasi hukum, bantuan hukum dan pilihan penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketua Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum (LPLIH) atau *Center for Continuing Legal Education* (CLE) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan layanan berbagai pelatihan dan kursus tematik berkenaan dengan bidang-bidang maupun topik-topik hukum tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kepala Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum (PDRH) melaksanakan, membangun dan mengembangkan dokumentasi berbagai produk hukum serta referensi hukum untuk dimanfaatkan terutama oleh sivitas akademika FHUI baik untuk kegiatan pengajaran maupun penelitian.

Kepala Laboratorium dan Klinik Hukum memfasilitasi dan menyelenggarakan berbagai kegiatan praktik hukum oleh sivitas akademika FHUI seperti pelatihan

peradilan semu, penyusunan kontrak, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan koordinator serta mengembangkan mata kuliah klinik hukum.

Ketua Unit Kemahasiswaan dan Kompetisi Mahasiswa mengelola kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan konseling mahasiswa, kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa, kegiatan yang menunjang karir mahasiswa.

Ketua Unit Humas, Media, Protokoler dan Inkubator Informasi melaksanakan kegiatan kehumasan dan penyebaran informasi, menjadi corong rujukan informasi fakultas, melaksanakan dokumentasi kegiatan dan menjalin hubungan dengan berbagai media, serta membantu pelaksanaan protokoler dalam berbagai kegiatan fakultas.

Ketua Unit Pelayanan Dokumen dan Kearsipan melaksanakan kegiatan pengarsipan dan melayani permintaan keperluan dokumen.

Ketua Unit Sumber Daya Manusia melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia baik tenaga pengajar maupun tenaga kependidikan.

Ketua Unit Keuangan melaksanakan kegiatan keuangan sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan.

3. SENAT AKADEMIK FAKULTAS DAN DEWAN GURU BESAR FAKULTAS

Senat Akademik Fakultas (SAF) merupakan organ tertinggi fakultas di bidang akademik yang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan akademik dan pengembangan fakultas;
2. Menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan etika sivitas akademika fakultas;
3. Memberikan pertimbangan kepada rektor mengenai calon dekan, jika diminta oleh rektor;
4. Menjabarkan otonomi keilmuan dalam bidang akademik di tingkat fakultas;
5. Menjabarkan norma dan tolak ukur penyelenggaraan fakultas;
6. Memberikan masukan kepada rektor mengenai kinerja pimpinan fakultas;
7. Memberikan masukan kepada pimpinan fakultas mengenai hal yang berkaitan dengan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran tahunan fakultas;
8. Mengawasi mutu akademik dalam penyelenggaraan fakultas;
9. Memberikan masukan, nasehat, dan teguran kepada pimpinan fakultas dalam penyelenggaraan fakultas.
10. Di samping itu, terdapat juga Dewan Guru Besar Fakultas (DGBF), sebagai organ fakultas yang melakukan pembinaan integritas moral dan etika dalam lingkungan sivitas akademika fakultas.

Di samping itu, terdapat juga **Dewan Guru Besar Fakultas (DGBF)**, sebagai organ fakultas yang melakukan pembinaan integritas moral dan etika dalam lingkungan sivitas akademika fakultas.

4. UNSUR PELAKSANA AKADEMIK

Unsur Pelaksana Akademik bertanggung jawab atas pelaksanaan sehari-hari semua kegiatan perkuliahan dan ujian, termasuk mengelola semua dokumentasi dan administrasi akademik yang terkait dengannya. Pada saat ini, penyelenggaraan Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dilaksanakan oleh Ketua Program Pascasarjana yang dibantu oleh Ketua Sub Program Doktor Ilmu Hukum dan Ketua Sub Program Magister Ilmu Hukum.

PERSONALIA

PROF. DR. TOPO SANTOSO, S.H., M.H.

Lahir : Wonogiri, 5 Juli 1970

Pendidikan : Sarjana Hukum (FHUI), Magister Hukum (Pascasarjana UI), Doktor Hukum (Faculty of Law-University of Malaya).

Keahlian : Hukum Pidana, HukumPidana Islam, Hukum Pidana Pemilu, Perbandingan Hukum Pidana.

Aktifitas : Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Ketua Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia, aktif mengisi berbagai forum seminar, diskusi, pelatihan, serta kegiatan ilmiah lainnya, aktif menulis di berbagai media massa nasional dan menjadi narasumber bagi media cetak dan elektronik, hingga kini telah menulis dan menyunting 19 buku dan ratusan artikel, pada pemilu 2004, menjadi salah seorang anggota Panitia Pengawas Pemilu Pusat.

DR. RATIH LESTARINI, S.H., M.H.

Lahir : Yogakarta, 11 Agustus 1960

Pendidikan : Sarjana Hukum (FHUI) , Magsiter Hukum (FHUI), Doktor Ilmu Hukum (FHUI)

Keahlian : Sosiologi Hukum dan Socio Legal

Aktifitas : Mengajar di Program Sarjana dan Pascasarjana FHUI, Pengajar di Universitas Swasta dan Aktif dalam penelitian serta mengisi forum diskusi, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya.

WIRDYANINGSIH, S.H., M.H.

Lahir : Jakarta, 9 Februari 1970

Pendidikan : Sarjana Hukum (FHUI), Magister Hukum (UI)

Keahlian : Hukum Islam, Mediasi, Pemilu

Aktifitas : Mengajar di Program Sarjana dan Pascasarjana FHUI, anggota kelompok kerja Mahkamah Agungtentang mediasi (2012-2015), mediator bersertifikat, menjadi anggota Bawaslu (2008-2012), aktif mengisi berbagai forum seminar, diskusi, pelatihan tentang mediasi, Pemilu dan hukum Islam, menulis tiga buku tentang Hukum Ekonomi Islam.

Kepala Sekretariat Pimpinan
Marliesa Qadariani, S.H., M.H.

Manajer Pendidikan
merangkap **Ketua Program Sarjana**
merangkap **Ketua Sub-Program Sarjana Reguler**
Wahyu Andrianto, S.H., M.H.

Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat
Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.

Manajer Ventura, Kerjasama dan Hubungan Alumni
Heru Susetyo, S.H., M.Si.,LL.M., Ph.D.

Manajer Umum
Farida Prihatini, S.H., M.H.

Wakil Manajer Umum Bidang Umum dan Fasilitas
Wardi, S.H., M.H.

Wakil Manajer Umum Bidang Administrasi dan Kepegawaian
Komala Dewi, AMd.

Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA)
Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H.

Ketua Sub-Program Sarjana Paralel
Afdol Anwar, S.H., M.H.

Ketua Sub-Program Sarjana Kelas Khusus Internasional
Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I.

Ketua Program Pascasarjana
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.

Ketua Sub Program Doktor Ilmu Hukum
merangkap **Wakil Ketua Program Pasca Sarjana**
Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.

Ketua Sub Program Magister Ilmu Hukum
Merangkap **Sekretaris Program Pasca Sarjana**
Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.

Ketua Sub Program Magister Kenotariatan
Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H.

Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan
Dr. Eka Sri Sunarti, S.H., MSI.

Ketua Djokosoetono Research Center (DRC)
merangkap **Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia**
Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D.

Kepala Laboratorium dan Klinik Hukum
Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.

Ketua Unit Kemahasiswaan dan Kompetisi Mahasiswa
Ari Wahyudi, S.H., M.H.

Kepala Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum
Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M., Ph.D.

Kepala Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum -PPS
Aristo MA Pangaribuan, S.H., LL.M.

Ketua Unit Keuangan
Rizki Wulandari, S.E.

Ketua Unit Sumber Daya Manusia
Heryna Oktaviana Kurniawati, ST.

Ketua Unit Humas, Media, Protokoler, dan Inkubator Informasi
Muhammad Novrizal, S.H., LL.M.

Ketua Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum
Junaedi, S.H., M.Si., LL.M.

Ketua Unit Pelayanan Dokumen dan Kearsipan
Jemari, SPd.

Senat Akademik Fakultas
Dr. Edmon Makarim, S.H., S.Kom.,LL.M (Ketua)
Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn.(Sekretaris)

Dewan Guru Besar Fakultas
Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H. (Ketua)
Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D., (Sekretaris)

PELAKSANA AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM PASCASARJANA

Ketua Program
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.

Kasub Program Doktor Merangkap
Wakil Ketua Program
Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.

Kasub Program Magister Merangkap
Sekretaris Program
Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.

SUB-PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Ketua
Dr. Sti Hajati Hoesin, S.H., M.H.

Sekretaris
Dr. Eka Sri Sunarti, S.H., M.Si

Staf Akademik
Hendriani Perwitasari, S.H., M.Kn

Staf Akademik
Daly Erni, S.H., LL.M..

BIDANG STUDI

Bidang Studi merupakan organisasi di dalam fakultas di mana para staf pengajar tergabung dan berkelompok sesuai minat dan keahlian masing-masing. Bidang-bidang studi bertugas untuk membina keilmuan serta mengoordinasikan pengembangan mata kuliah dan metode pengajaran di masing-masing bidang ilmu hukum yang ditekuni.

Bidang-bidang studi yang terdapat di FHUI, beserta ketua dan sekretarisnya masing-masing, adalah sebagai berikut:

Bidang Studi Dasar-dasar Ilmu Hukum
Budi Darmono, S.H., MSA., MCL., Ph.D. (Ketua)
Dr. Fernando Manullang, SH., M.Hum. (Sekretaris)

Bidang Studi Hukum Keperdataan
Dr. Edmon Makarim, S.H., S.Kom.,LL.M. (Ketua)
Dr. Brian Amy Prastyo, S.H., LL.M. (Sekretaris)

Bidang Studi Hukum Pidana
Akhiar Salmi, S.H. M.H. (Ketua)
Nathalina Naibaho, S.H., M.H. (Sekretaris)

Bidang Studi Hukum Tata Negara
Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H. (Ketua)
Nurwidyastanti, S.H., M.H. (Sekretaris)

Bidang Studi Hukum Administrasi Negara
Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. (Ketua)
Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D. (Sekretaris)

Bidang Studi Hukum Internasional
Dr. Mutiara Hikmah, S.H., M.H. (Ketua)
Arie Afriansyah, S.H., MIL. Ph.D. (Sekretaris)

Bidang Studi Hukum Acara
Thorkis Pane, S.H., M.H. (Ketua)
Dr. Sonyendah Retnaningsih, S.H., M.H. (Sekretaris)

Bidang Studi Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Tien Handayani, S.H., M.Si. (Ketua)
Antarin Prasanthi, S.H., M.Si. (Sekretaris)

STRUKTUR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

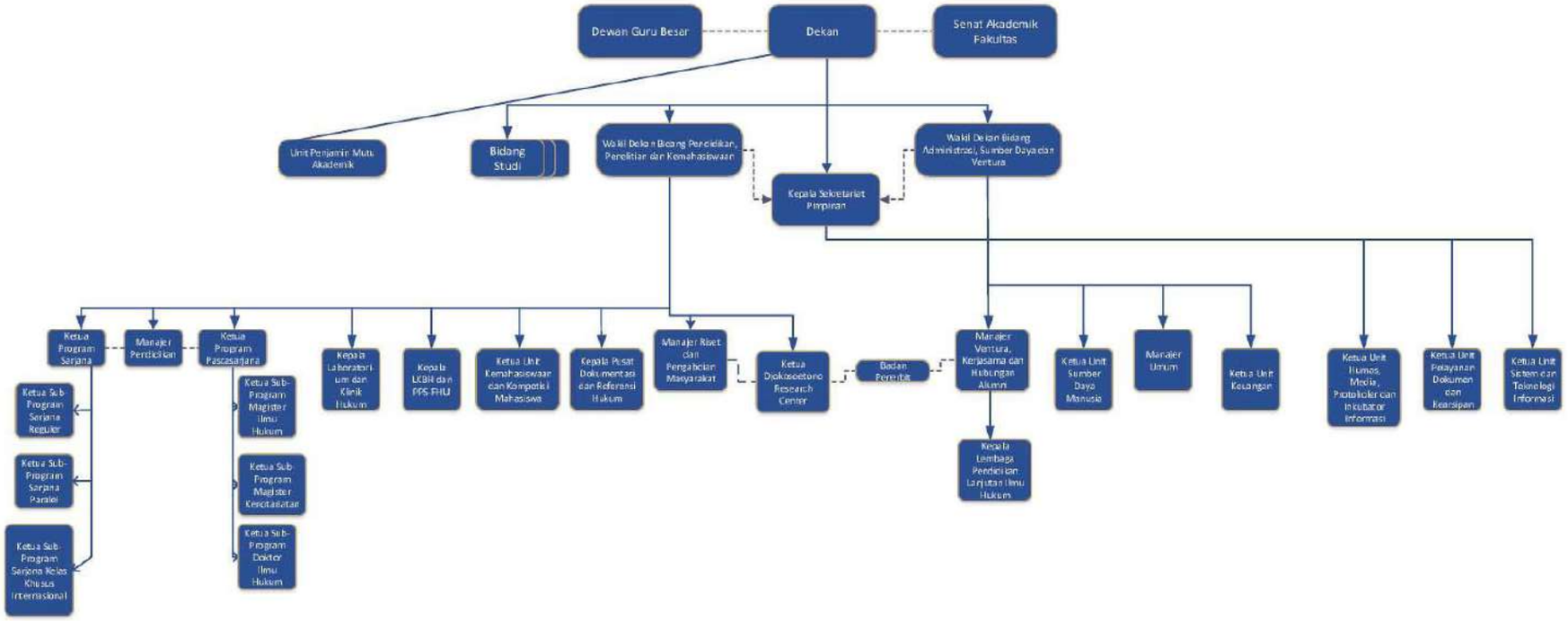

FASILITAS

Fakultas Hukum Universitas Indonesia memiliki fasilitas yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa dari semua program yang ditawarkan. Fasilitas tersebut terdapat di dua lokasi yaitu kampus Depok dan Salemba.

ruang video conference FHUI

KAMPUS DEPOK

27 Ruang Kelas Multimedia berpendingin udara dengan fasilitas penunjang berupa perangkat komputer, sistem tata suara, overhead projector maupun LCD dan internet.

Akses Internet Nirkabel *(wi-fi)* bisa diakses di setiap ruang dan halaman gedung.

Sarana Telekonferensi *(teleconference)* memungkinkan dilakukannya kuliah/seminar jarak jauh dengan koneksi internet khusus.

Ruang Sumadipradja & Taher dapat digunakan untuk *teleconference, video conference*, seminar, pelatihan dan perkuliahan yang dapat menampung 100 orang.

Auditorium Djokosoetono dapat menampung hingga 626 orang dan dapat dipergunakan untuk kegiatan seminar, promosi doktor, konfrensi, acara-acara budaya dan perkuliahan.

Balai Sidang Djokosoetono dapat menampung hingga 250 orang dan dapat dipergunakan untuk kegiatan seminar, promosi doktor, konfrensi, acara-acara budaya dan perkuliahan.

Laboratorium dan Klinik Hukum memiliki ruang diskusi dan rapat, *carrels*, dan akses internet yang dapat digunakan antara lain untuk berlatih menyusun kontrak, persidangan semu atau diskusi-diskusi ilmiah.

Ruangan Prof.H. Boedi Harsono, S.H.

Balai Sidang Djokosoetono

Ruang Peradilan Semu *(Moot Court)*. Fakultas memiliki dua ruang *moot court*, pertama, bertempat di Gedung D lantai dasar dapat menampung 59 orang yang memiliki fasilitas *video conference* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhubung dengan fakultas-fakultas hukum perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia; kedua, ruang *moot court* Hafni Sjahruddin yang terletak di gedung E lantai dasar berkapasitas 38 orang.

Koleksi Perpustakaan seperti buku (16.302 Judul/41.496 eksemplar), jurnal ilmiah, skripsi (7936 Judul/15972 eksemplar), tesis (2574 Judul/2574 eksemplar), disertasi (126 Judul/126 eksemplar), laporan penelitian (92 judul/ 115 eksemplar), mikrofis (149 judul/622 eksemplar), pidato pengukuhan (37 judul/57 eksemplar), 2.121 judul koleksi langka dan lain-lain. Semua koleksi ini dapat dibaca di perpustakaan pusat UI.

Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum memiliki koleksi berbagai produk hukum dan peraturan

Auditorium Djkosoetono

Ruang Mootcourt

perundang-undangan, Staatsblad van Nederlandse Indie, Nederlandse Jurisprudentie, majalah-majalah hukum serta buku-buku referensi dalam dan luar negeri. Pelayanan informasi dan data salinan cetak maupun digital disediakan untuk kepentingan umum dan terutama sivitas akademika. Koleksi PDRH yaitu buku (11203 Judul), jurnal ilmiah (2851), skripsi (1944 Judul), tesis (43 Judul), disertasi (136 Judul), peraturan (6588 Judul), Putusan Pengadilan (115 Judul).

Laboratorium Komputer menyediakan 24 perangkat komputer dengan akses internet dan printer yang dapat digunakan mahasiswa yang tidak membawa perangkat komputer sendiri.

Basis Data Elektronik Westlaw, JSTOR, Springerlink, Proquest dan lain sebagainya disediakan sebagai sumber rujukan penelitian ilmiah sivitas akademika yang dapat diakses di lingkungan UI melalui website UI atau fakultas.

Resource Room dan Student Hall Soerjono Soekanto adalah merupakan ruang baca berkapasitas 40 orang dan juga memiliki 2 (dua) Ruang Diskusi Kecil (Small Discussion Room) dengan kapasitas 4-6 orang yang dilengkapi dengan Infocus. Ruangan ini menyatu dengan Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum.

Ruang Rapat Guru Besar yang merupakan ruang multifungsi dengan kapasitas masing-masing 40 orang.

Ruang Rapat Prof. Soekardono yang merupakan ruang multifungsi dengan kapasitas masing-masing 40 orang.

Koperasi Mahasiswa (KOPMA) dan **Koperasi Yustisia** menyediakan berbagai kebutuhan mahasiswa dan umum seperti buku teks, buku tulis, alat tulis, cendera mata, jasa foto kopi dan jasa pengiriman dokumen dan barang. Kedua koperasi ini terletak di Lantai 2 Kantin Mahasiswa Fakultas Hukum UI.

ruang pascasarjana Fakultas Hukum UI

Ruang Soekardono

Mushalla Prof. H.M. Daud Ali

Bis Kuning

Perpustakaan Pascasarjana FHUI

Selasar diskusi

Kantin terletak di samping Gedung C menyediakan berbagai macam makanan dan minuman bercita rasa Indonesia maupun Internasional dengan harga terjangkau. Kantin ini juga merupakan wadah informal untuk berdiskusi dan bersantai sejenak bagi civitas akademika untuk melepas penat di antara jam-jam kuliah.

Bikun Coffee yang terletak di taman samping Student Center, menyediakan berbagai macam jenis kopi dan makanan lainnya serta dilengkapi dengan fasilitas Internet.

Taman Pelataran FHUI yang terletak di samping Gedung D, dapat digunakan oleh civitas academica FHUI untuk mengadakan berbagai acara seni budaya dan akademik.

Lapangan Olahraga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga seperti bulutangkis, bola basket, bola voli, senam dan juga futsal. Selain itu lapangan olahraga kerap juga digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan.

Mushalla Prof. H.M. Daud Ali terletak di samping Gedung E Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia terletak di seberang Gedung D Fakultas Hukum Universitas Indonesia .

Elevator tersedia di Gedung C, D, E, dan F.

Jaringan ATM BNI terletak di Gedung D Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu tersedia juga Bank dan Jaringan ATM lain di berbagai tempat di area kampus UI.

Sarana transportasi bis kampus Universitas Indonesia yang biasa disebut "bis kuning" dan sepeda yang dapat digunakan secara gratis di dalam area kampus setiap hari kuliah. Stasiun Universitas Indonesia yang terletak di dalam area kampus Depok setiap harinya melayani jalur komuter (Commuter Line) Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi. Pengguna bis umum dan angkutan kota dapat dengan mudah mengakses kampus lewat halte utama Universitas Indonesia di Jl. Raya Lenteng Agung atau bila sudah terbiasa bisa melalui jalan-jalan kecil melewati area pemukiman warga sekitar menuju Jl. Margonda Raya dan Jl. Raya Kukusan.

Lingkungan asri, hijau dan bebas asap rokok di lingkungan fakultas dilengkapi dengan taman, bangku-bangku, saklar serta akses internet untuk belajar dan diskusi.

Keamanan Kampus selalu berkordinasi dengan satuan pengamanan Universitas dan Kepolisian setempat dalam mengamankan area kampus. Fakultas Hukum dilengkapi dengan 48 buah kamera CCTV. Selain itu dilengkapi juga dengan jalur evakuasi untuk keadaan darurat.

Student Center yaitu ruang-ruang kegiatan kemahasiswaan serta sekretariat beberapa lembaga mahasiswa yang terletak di gedung F.

Sarana Penyandang Disabilitas telah disediakan di beberapa tempat antara lain parkir khusus, akses menuju semua Gedung dimana perkuliahan diselenggarakan.

Museum FHUI memuat sejarah Fakultas Hukum sejak masa Belanda sampai sekarang. Museum ini dilengkapi dengan memorabilia seperti toga Prof. Djokosoetono (Dekan Pertama Fakultas Hukum UI), Patung Dewi Keadilan, beberapa Manuscript, Buku Langka, Studio Room dan Foto.

KAMPUS SALEMBA

Ruang Kelas Pascasarjana

Kuliah Umum University of Canberra

Ruang Kelas Multimedia merupakan ruang kuliah yang dilengkapi dengan perangkat komputer, sistem tata suara, proyektor overhead maupun digital, kabel akses internet (LAN) dan berpendingin udara. Ruang kelas ini diperuntukkan bagi mahasiswa Magister dan Doktoral.

Ruang Video Conference merupakan ruang multifungsi dengan fasilitas multimedia dan digunakan baik untuk ujian ataupun kuliah Teleconference.

Akses Internet Nirkabel (Wi-Fi) melingkupi sebagian besar area kampus.
Selasar Mahasiswa "Koesnadi Hardjasoemantri" merupakan tempat yang diperuntukkan bagi mahasiswa untuk melakukan diskusi informal.

Ruang Koleksi *(Reference Room)* merupakan ruang baca dengan koleksi lebih dari 5.000 buku terbitan asing terbaru. Sebagian besar Koleksi Buku merupakan sumbangan dari beberapa Guru Besar.

Masjid At-Tauhid Arief Rahman Hakim merupakan masjid simbol perjuangan mahasiswa angkatan 1966 dan kerap digunakan sebagai pusat dakwah mahasiswa. Masjid ini terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan perpustakaan dan ruang serbaguna.

Galeri ATM dan Bank BNI memberikan kemudahan bagi civitas akademika untuk melakukan transaksi perbankan.

Kantin UI yang terletak di tengah Kampus Salemba menyediakan berbagai macam makanan dan minuman bercita rasa Indonesia maupun Internasional dengan harga terjangkau. Kantin ini dapat diakses oleh semua civitas akademika UI dan masyarakat umum.

ORGANISASI MAHASISWA

ORGANISASI KEMAHASIWAAN PADA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

Organisasi Kemahasiswaan yang ada pada mahasiswa Program Magister Kenotariatan adalah Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMK) yang menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi dan aktivitas akademik yang sifatnya pengembangan keilmuan dan kreativitas mahasiswa.

ORGANISASI KEMAHASIWAAN PADA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Organisasi Kemahasiswaan yang ada pada mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum adalah Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (IMMH) yang menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi dan aktivitas akademik yang sifatnya pengembangan keilmuan dan kreativitas mahasiswa.

PENYELENGGARA PENDIDIKAN

KALENDER AKADEMIK

Kalender Akademik Program Pascasarjana menyesuaikan Keputusan Rektor UI Nomor 0749/SK/R/UI/2017 tentang Kalender Akademik Universitas Indonesia Tahun Akademik 2017/2018. yang meliputi jadwal registrasi administrasi dan akademik, perkuliahaan, input nilai, yudisium dan wisuda.

REGISTRASI

1. REGISTRASI ADMINISTRASI

Registrasi administrasi bertujuan untuk memperoleh status mahasiswa aktif untuk satu semester yang akan berjalan. Mahasiswa yang akan melakukan Registrasi Administrasi harus terlebih dahulu melunasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan biaya lain yang telah ditentukan.

Registrasi administrasi bagi mahasiswa baru dilakukan pada awal tahun akademik, sedangkan bagi mahasiswa lama dilakukan pada setiap semester. Pada semester gasal, registrasi dimulai awal sampai pertengahan bulan Agustus, sedangkan pada semester genap dilakukan pada awal sampai pertengahan bulan Januari. Jadwal registrasi administrasi pada setiap semester ditetapkan dalam SK Rektor.

Registrasi administrasi dilakukan oleh mahasiswa pemegang Kartu Identitas Mahasiswa (KIM) secara host¬ to-host di ATM bank-bank yang telah ditentukan atau melalui teller pada bank tertentu yang ditunjuk oleh Universitas Indonesia.

Bagi mahasiswa yang terlambat melakukan registrasi administrasi atau melakukan registrasi di luar jadwal yang telah ditetapkan dikenakan denda sebesar 50 persen dari biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester berjalan.

Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi akan berstatus Tidak Aktif (Kosong) pada semester berjalan dengan masa studi diperhitungkan. Mahasiswa yang berstatus Tidak Aktif (Kosong) selama dua semester berturut-turut, secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Indonesia dengan Keputusan Rektor tentang Penetapan Status.

2. REGISTRASI AKADEMIK

Registrasi akademik dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh hak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang akan berjalan. Untuk melakukan registrasi akademik, terlebih dahulu mahasiswa harus melakukan registrasi administrasi (berstatus mahasiswa aktif).

Registrasi akademik dilakukan secara online melalui SIAK-NG (Sistem Informasi Akademik Next Generation). Apabila mahasiswa tidak melakukan registrasi akademik, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan namun tetap diperhitungkan sebagai masa studi.

Pada masa registrasi akademik yang telah ditetapkan dalam kalender akademik, mahasiswa mengisi Isian Rencana Studi (IRS) dengan memilih mata kuliah yang ditawarkan pada suatu semester. Pemilihan mata kuliah harus memperhatikan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya, prasyarat mata kuliah, jadwal perkuliahan dan kuota peserta yang tersedia untuk mata kuliah tersebut.

Apabila salah satu hal tersebut dilanggar, maka sistem akan menyatakan bahwa IRS bermasalah dan Pembimbing Akademik tidak dapat menyetujui IRS yang diajukan. Meskipun hanya salah mata kuliah yang bermasalah, namun IRS akan ditolak secara keseluruhan oleh sistem. Mahasiswa baru dapat mengikuti perkuliahan apabila IRS-nya disetujui oleh Pembimbing Akademik (PA) atau Wakil Dekan dalam kasus-kasus tertentu.

PEMBIMBING AKADEMIK

1. BIMBINGAN

Fakultas menunjuk seorang Pembimbing Akademik (PA), dosen tetap yang bergelar Doktor, yang akan membimbing mahasiswa tersebut hingga akhir studi. Tugas pokok Pembimbing Akademik (PA) adalah memberikan bimbingan akademik dan konseling.

Pembimbing Akademik (PA) berperan membimbing mahasiswa dalam merencanakan studi untuk setiap semester maupun secara keseluruhan, memberikan motivasi, serta memantau perkembangan proses belajar, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa. Selain itu mahasiswa juga dapat berkonsultasi mengenai hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan masalah akademik, misalnya apabila mahasiswa mengalami kesulitan dalam penyesuaian dengan lingkungan baru di kampusnya.

2. PERSETUJUAN

Sebagaimana telah disinggung, sebelum memulai perkuliahan di setiap semesternya, mahasiswa harus melakukan registrasi akademik dengan cara mengisi Isian Rencana Studi (IRS). Sebelum registrasi tersebut dapat diterima oleh SIAK NG, persetujuan Pembimbing Akademik (PA) harus didapat terlebih dulu. Pada dasarnya, Pembimbing Akademik (PA) dapat memeriksa IRS yang diajukan oleh mahasiswa-mahasiswa bimbingannya melalui SIAK NG, dan memberikan persetujuannya jika semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi. Akan tetapi, disarankan kepada mahasiswa-mahasiswa bimbingan, terutama yang menemui masalah atau membutuhkan penjelasan mengenai perkuliahan atau mata-mata kuliah tertentu, untuk terlebih dahulu menghadap PA secara langsung guna mendapatkan bimbingan dan persetujuannya.

Acara Promosi Doktor

KEGIATAN BELAJAR

Kegiatan belajar merupakan interaksi antara pengajar dan mahasiswa sesuai dengan kurikulum, yang meliputi kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri. Mahasiswa harus mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang tercantum dalam IRS.

Ketentuan Umum Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran

1. Waktu perkuliahan untuk setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai kredit masing-masing mata kuliah.
2. Satu semester pada umumnya terdiri antara 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Setiap mata kuliah mempunyai rancangan pengajaran yang merupakan penjabaran mengenai rencana perkuliahan selama satu semester, yang disebut sebagai Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Satuan Acara Perkuliahan (SAP) memuat hal-hal sebagai berikut:
   a. kode dan nama mata kuliah;
   b. kelompok mata kuliah;
   c. semester dan tahun akademik;
   d. nilai kredit;
   e. deskripsi mata kuliah;
   f. tujuan dan sasaran pembelajaran;
   g. prasyarat mata kuliah;
   h. nama pengajar dan asisten;
   i. waktu dan tempat kuliah;
   j. rincian acara perkuliahan dan bahan rujukan untuk setiap pokok bahasan;
   k. komponen dan bobot evaluasi proses pembelajaran; dan,
   l. peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkuliahan.
4. Perkuliahan dapat diberikan oleh seorang pengajar ataupun tim pengajar. Apabila pengajar berupa tim pengajar, maka terdapat seorang koordinator sebagai penanggungjawab mata kuliah bersangkutan.

MATRIKULASI

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 015 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Di Universitas Indonesia, Pasal 25 menyatakan pelaksanaan matrikulasi bagi mahasiswa program magister dilaksanakan di program S1 paling lama 2 (dua) semester dengan beban SKS maksimum 12 SKS. Mahasiswa yang diperkenankan melanjutkan pendidikan di Program Magister harus lulus semua matakuliah matrikulasi dengan IPK matrikulasi minimal 3,0.

Untuk Program Doktor, dilakukan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor Di Universitas Indonesia, yaitu dengan mengikuti beberapa matakuliah pada Program Magister paling lama 2 (dua) semester dengan beban SKS maksimum 12 SKS. Mahasiswa yang diperkenankan melanjutkan pendidikan di Program Doktor harus lulus semua matakuliah matrikulasi dengan IPK matrikulasi minimal 3,0.

NILAI KREDIT

1. SATUAN KREDIT SEMESTER

Beban penyelenggaraan dan keberhasilan pendidikan tiap semesternya dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Satuan ini adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh pembelajar selama satu semester melalui kegiatan terjadwal setiap minggunya, yang terdiri dari perkuliahan, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri. Beban penyelenggaraan dan keberhasilan kegiatan belajar dinyatakan dalam Sks.

2. NILAI KREDIT MATA KULIAH

Tiap-tiap mata kuliah diberi nilai sks yang ditentukan berdasarkan besarnya usaha untuk menyelenggarakannya sampai berhasil, yang menggambarkan juga beban yang harus dipikul mahasiswa dalam satu semester untuk menyelesaikan mata kuliah tersebut. Nilai kredit berkisar antara 1 sampai 6 sks. Nilai sks tidak menentukan penting atau tidaknya suatu mata kuliah, tetapi menggambarkan luas ruanglingkup, banyaknya materi yang harus dibahas dan waktu yang dibutuhkan untuk menguasai materi tersebut.

Bagi pengajar, nilai sks suatu mata kuliah menggambarkan besarnya beban dan waktu untuk mempersiapkan dan menyampaikan materi,serta mengevaluasi hasil pembelajaran. Bagi mahasiswa, nilai sks menggambarkan beban yang harus dipikul dan waktu yang harus dipergunakan untuk dapat dinyatakan lulus dalam mata kuliah bersangkutan. Sebagai contoh, suatu mata kuliah diberi nilai kredit 2 sks, maka jumlah waktu dan beban kegiatannya adalah sebagai berikut:

Pengajar harus mengalokasikan 340 menit waktunya dalam seminggu, dengan rincian:

- 2 x 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal dengan mahasiswa;
- 2 x 60 menit perencanaan dan evaluasikegiatan akademikterstruktur; dan,
- 2 x 60 menit pengembangan materi kuliah.

Demikian pula, mahasiswa harus mengalokasikan 340 menit waktunya tiap minggu untuk:

- 2 x 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk kuliah;
- 2 x 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar misalnya dalam bentuk membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal; dan,
- 2 x 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku acuan.

Open House Program Pascasarjana FHUI

UJIAN DAN SISTEM PENILAIAN

1. UJIAN

Ujian terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). UTS dilaksanakan pada pertengahan semester, yaitu setelah perkuliahan berjalan kurang lebih 8 (delapan) minggu. UAS diselenggarakan pada akhir semester sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bentuk kegiatan UTS dan UAS diserahkan sepenuhnya kepada pengajar.

2. SISTEM PENILAIAN

Penilaian merupakan bagian dari proses penyelenggaraan ujian. Jika ujian merupakan alat pengukur seberapa jauh mahasiswa dapat menyelesaikan beban studi dari mata kuliah yang diambilnya, maka penilaian merupakan ukuran kemampuan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, nilai merupakan hasil akhir dari proses evaluasi keberhasilan mahasiswa untuk mata kuliah tertentu.

A. Nilai Akhir

Pada setiap akhir semester setelah mengikuti proses belajar, mahasiswa akan memperoleh nilai akhir. Hanya pengajar (dan koordinator pengajar, jika merupakan tim pengajar) yang berhak mengolah, menentukan,dan mempublikasikan nilai akhir mata kuliahkepada mahasiswa peserta mata kuliahnya melalui SIAK-NG. Pada umumnya, komponen penilaian terdiri dari:

- Kehadiran;
- Tugas-tugas, baik perorangan maupun kelompok;
- Ujian Tengah Semester (UTS); dan,
- Ujian Akhir Semester (UAS).

Penentuan komponen mana yang digunakan dan bobotnya masing-masing sepenuhnya menjadi kewenangan pengajar mata kuliah. **Contoh pembobotan komponen** adalah sebagai berikut:

Kehadiran	10%
Tugas	20%
UTS	30%
UAS	40%

Komponen penilaian dan bobotnya masing-masing sebaiknya dicantumkan dalam SAP, yang disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, dan juga dicantumkan dalam SIAK-NG mata kuliah bersangkutan.

Nilai akhir dinyatakan dengan huruf, beserta rentang nilai angkanya dari minimal 0 sampai maksimal 100 dan bobot nilai huruf dari 0, 00 sampai 4, 00. Adapun penghitungan antara nilai angka dan nilai huruf adalah sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
85 – 100	A	4, 00
80 – <85	A-	3, 70
75 – <80	B+	3, 30
70 – <75	B	3, 00
65 – <70	B-	2, 70
60 – <65	C+	2, 30
55 – <60	C	2, 00
40 – <55	D	1, 00
00 – <40	E	0

Untuk dapat dinyatakan lulus dari suatu mata kuliah, mahasiswa harus meraih nilai A, A-, B+, B, B-, C+ atau C. Nilai D dan E akan dinyatakan tidak lulus, sehingga mahasiswa harus mengulang pada semester-semester berikutnya, kecuali untuk mata kuliah pilihan. Selain nilai-nilai tersebut di atas, terdapat pula nilai I dan T. Nilai I diberikan apabila pengajar belum dapat memberikan nilai akhir karena komponen penilaiannya belum lengkap (incomplete). Nilai T diberikan apabila mahasiswa tidak memiliki satu pun komponen penilaian, yang akan diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dengan nilai angka 0 (nol). Mahasiswa yang mendapatkan nilai T dianggap belum pernah menempuh mata kuliah tersebut.

B. Pemasukan dan Penerbitan Nilai Akhir

Pemasukan (input) dan penerbitan (publish) nilai akhir oleh pengajar mata kuliah ke dalam SIAK NG harus dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik. Keterlambatan memasukkan dan menerbitkan nilai akhir menyebabkan seluruh peserta mata kuliah bersangkutan secara otomatis mendapat nilai B.

Nilai I harus berubah menjadi nilai sebenarnya sebelum berakhirnya masa input nilai ke dalam SIAK NG. Jika melampaui waktu tersebut, maka sistem akan mengubah nilai I menjadi E.

C. Pengambilan Ulang Mata Kuliah

Dalam hal mahasiswa melakukan pengambilan ulang (retake) mata kuliah, nilai yang berlaku adalah nilai terakhir. Untuk penghitungan Indeks Prestasi Kumulatifnya (IPK), maka Sks dan nilai yang diperoleh tersebut turut diperhitungkan.

PUTUS STUDI DAN CUTI AKADEMIK

1. PUTUS STUDI

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 015 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Di Universitas Indonesia dan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor Di Universitas Indonesia, Pada seluruh program studi yang diselenggarakan di Universitas Indonesia, mahasiswa dinyatakan putus studi apabila:

1. tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut;
2. terkena evaluasi periodik;
3. habis masa studinya sesuai dengan ketentuan masa studi maksimal yang ditetapkan bagi program studinya;
4. dijatuhi sanksi atas pelanggaran tatatertib kehidupan kampus dan pelanggaran akademik.
5. dinyatakan tidak laik lanjut

2. CUTI AKADEMIK

Cuti Akademik terdiri atas cuti akademik yang direncanakan dan cuti akademik dengan alasan khusus. Cuti akademik diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 (dua) semester baik berurutan maupun tidak. Masa studi dan evaluasi keberhasilan studi bagi mahasiswa yang memperoleh cuti akademik disesuaikan dengan masa cuti yang diberikan. Mahasiswa yang memperoleh izin cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik apapun, termasuk bimbingan tesis atau disertasi

Ketentuan Cuti Akademik yang Direncanakan:

1. Mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester;
2. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada pimpinan fakultas sebelum pelaksanaan registrasi administrasi;
3. Mahasiswa wajib melakukan pembayaran sebesar 25% dari biaya pendidikan semester yang akan berjalan.

Ketentuan Cuti Akademik dengan Alasan Khusus:

1. Cuti Akademik dengan Alasan Khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena tugas negara, tugas universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik;
2. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada pimpinan fakultas dalam semester berjalan (setelah masa registrasi atau pada saat masa perkuliahan);
3. Mahasiswa tetap dikenakan kewajiban untuk membayar biaya pendidikan sebesar 100%

Kuliah Dosen Tamu Dr. Diane Williams, B.Sc., MBA

ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Hasil belajar mahasiswa didokumentasikan dalam bentuk Daftar Nilai Semester, Riwayat Akademik dan Transkrip Akademik. Daftar Nilai Semester berisi nilai mata kuliah yang telah diikuti seorang mahasiswa dalam satu semester. Nilai mata kuliah yang telah diikuti oleh seorang mahasiswa selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa Universitas Indonesia didokumentasikan dalam Riwayat Akademik.

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dari suatu jenjang pendidikan di Universitas Indonesia akan memperoleh dokumen nilai mata kuliah berupa Transkrip Akademik. Transkrip Akademik berisi seluruh mata kuliah yang pernah diikuti oleh mahasiswa selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan di Universitas Indonesia, dan mencantumkan Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya B (3.00), baik untuk mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Program Magister Kenotariatan maupun Program Doktor.

PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN

MAGISTER ILMU HUKUM

1. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Dasar penyelenggaraan program Magister Ilmu Hukum adalah Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 015 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Di Universitas Indonesia. Perkuliahan Program magister diselenggarakan pada hari Senin sampai Jum'at pukul 8.00-15.00 bagi Kelas Pagi dan pukul 17.00-21.00 bagi Kelas Sore. Pada waktu-waktu tertentu diadakan kuliah umum oleh staf pengajar dari luar negeri atau praktisi profesional secara langsung. Tesis merupakan hasil kegiatan akademik dalam bentuk karya tulis sebagai tugas akhir yang wajib dilakukan oleh mahasiswa Program Magister Hukum. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada *Prosedur, Tata Cara Pengajuan, Pembuatan dan Ujian Tesis pada Buku Pedoman Pembuatan Tesis.*

2. BEBAN MASA STUDI

Beban studi yang harus ditempuh mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum berjumlah 42 Sks.

Program Magister Reguler yang diikuti oleh mahasiswa penuh waktu, menurut ketentuan dijadwalkan dalam 4 (empat) semester dan dalam pelaksanaannya dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester.

Program Magister Non reguler yang diikuti oleh mahasiswa penuh waktu, menurut ketentuan dijadwalkan dalam 5 (lima) semester dan dalam pelaksanaannya dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya 7 (tujuh) semester.

3. EVALUASI

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sampai seberapa jauh mahasiswa dapat menyelesaikan rencana studi yang telah disusun. Evaluasi akhir semester pada Program Magister Ilmu Hukum dilakukan oleh pengajar secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas atau pengamatan.

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 015 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Di Universitas Indonesia, Evaluasi Akademik Secara Bertahap adalah:

Mahasiswa Program Reguler dinyatakan putus studi apabila:

1. Pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh minimal 14 Sks terbaik dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol);
2. Pada akhir masa studi, mahasiswa tidak memperoleh Indeks Prestasi minimal 3,00 (tiga koma nol) dari beban studi yang dipersyaratkan, dengan nilai terendah B. (Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 015 Tahun 2016 Pasal 15, akhir masa studi regular adalah semester enam)

Mahasiswa Program Non-reguler dinyatakan putus studi apabila:

1. Pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) dari jumlah 12 SKS terbaik;
2. Pada evaluasi akhir masa studi (6 semester) tidak memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif dari beban studi yang dipersyaratkan minimal 3,00 (tiga koma nol). (Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 015 Tahun 2016 Pasal 15, akhir masa studi non-reguler adalah semester tujuh).

Selain ketentuan putus studi yang diatur di atas, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan

bermasalah dalam hal administrasi dan mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

4. PEMINATAN

Program Magister Ilmu Hukum mempunyai 11 (sebelas) peminatan yang dipimpin oleh seorang Ketua Peminatan, yaitu:

PEMINATAN HUKUM EKONOMI

Ketua: Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H., LL.M.

Peminatan ini mengkaji kegiatan-kegiatan ekonomi perdagangan dan berbagai masalah yang melingkupinya. Cakupan kajian antara lain: Hukum Perusahaan, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Hukum Pembiayaan Perusahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pembahasan difokuskan pada menganalisis kasus-kasus (case study) terkait dengan kegiatan ekonomi.

PEMINATAN HUKUM EKONOMI ISLAM

Ketua: Prof. Dr. Dra. Uswatun Hasanah, M.A.

Peminatan Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam pada awalnya adalah Peminatan Hukum Islam dan Ilmu Pengetahuan Islam yang diselenggarakan sejak Tahun 1982. Dalam perkembangannya, pada tahun 2010, Program Magister Ilmu Hukum membuka peminatan baru yaitu Hukum Ekonomi Islam. Hal ini disebabkan kegiatan ekonomi syariah kian marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, serta berperannya ulama dan pemerintah dalam kegiatan ini. Peminatan ini memberikan pemahaman teori, metodologi serta permasalahan-permasalahan dalam Hukum Ekonomi Islam. Peminatan ini bertujuan menghasilkan lulusan Magister Hukum yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan kemampuan analisis untuk menghadapi berbagai isu dan masalah dalam bidang hukum ekonomi Islam dan mampu menerapkan ilmu yang dimilikinya ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

PEMINATAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Ketua: Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.

Peminatan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana adalah satu dari tiga peminatan awal pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UI. Selama pelaksanaannya mengalami pasang surut peminatan, karena "pasar" turut mempengaruhi berminatnya mahasiswa pada peminatan ini. Materi-materi yang diperdalam adalah Sistem Peradilan Pidana, Perkembangan Teori-teori Pidana, Kriminologi, Hukum Pidana dalam Kegiatan Perekonomian, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan HAM, Sejarah dan Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Pidana dan Tindak Pidana Korupsi, serta Birokrasi dan Good Governance. Selain itu ada beberapa matakuliah yang dapat dipilih untuk memperdalam pengetahuan yang terkait dengan pemidanaan.

PEMINATAN HUKUM KENEGARAAN (TATA NEGARA/ADMINISTRASI NEGARA)

Ketua: Dr. Fatmawati, S.H., M.H.

Peminatan Hukum Kenegaraan terdiri dari dua kajian utama yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Hukum Tata Negara mempelajari dan mengkaji tentang kekuasaan negara, distribusi kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara, hak-hak warga negara dan hubungan antar lembaga negara berdasarkan konstitusi. Sedangkan Hukum Administrasi Negara mempelajari dan mengkaji tentang pelaksanaan dari kekuasaan yang telah didistribusikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk kewenangan-kewenangan pejabat pemerintah dalam lembaga-lembaga pemerintah serta mempelajari bagaimana sarana-sarana pelaksanaannya.

PEMINATAN HUKUM TRANSNASIONAL

Ketua: Adijaya Yusuf, S.H.., LL.M.

Peminatan Hukum Transnasional menfokuskan pada kajian transaksi perdata internasional meliputi perjanjian bisnis internasional, perancangan kontrak dagang internasional, termasuk alternatif penyelesaian sengketa perdata internasional.

PEMINATAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Ketua: Adolf Warouw, S.H., LL..M.

Hukum Perdagangan Internasional memfokuskan pada pemahaman prinsip-prinsip dan aturan-aturan dasar perdagangan internasional bidang perdagangan

barang, jasa dan hak milik intelektual, persetujuan perdagangan regional dan bilateral, hubungan antara pelaku melalui perjanjian dan transaksi perdagangan internasional, kerangka kelembagaan/organisasi WTO, regulasi perdagangan domestik, aturan dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerangka WTO, dan perundingan perdagangan internasional.

PEMINATAN HUKUM SUMBER DAYA ALAM

Ketua: Prof. Arie Sukanti Hutagalung, SH., MLI.

Peminatan Hukum Sumber Daya Alam adalah merupakan peminatan yang relatif masih baru di Program Magister FHUI. Munculnya peminatan ini adalah karena tuntutan perkembangan era globalisasi terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang demikian maraknya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat potensial, sehingga perlu pengelolaan yang baik dan optimal dalam rangka manfaat bagi kemakmuran rakyat. Peminatan Hukum Sumber Daya Alam mempelajari dan mengkaji tentang pengelolaan serta berbagai permasalahan dari sumber daya alam di Indonesia, baik yang menyangkut tentang kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan mineral dan batubara, perminyakan dan gas bumi, sumber daya air, serta aspek terkait lainnya seperti pertanahan, lingkungan, perizinan, penanaman modal dan otonomi daerah.

PEMINATAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Ketua: Prof. Dr. Agus Sardjono, S,H., M.H.

Perlindungan terhadap HAKI terus berkembang di Indonesia, dan walaupun tidak sangat cepat menunjukan peningkatan dalam hal kepatuhan. Pascasarjana UI mengembangkan pendidikan formalnya dalam bentuk strata 2 atau magister dengan peminatan HAKI. Pada peminatan ini akan diperdalam semua hal yang terkait dengan HAKI, yaitu merek dan indikasi geografis, hak cipta dan hak-hak yang terkait, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, paten dan rahasia dagang, alih teknologi dan telematika dan haki dalam persaingan usaha juga dibahas. Masalah-masalah lain seperti litigasi HKI, dan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional serta valuasi dan manajemen HKI juga diperdalam.

PEMINATAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN GOOD GOVERNANCE

Ketua: Prof. Dr. Satya Arinanto, SH.,, M.H.

Peminatan HAM dan Good Governance merupakan peminatan baru yang dikembangkan mengantisipasi perkembangan pelaksanaan HAM di era modern saat ini, khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas umum di bidang pemerintahan. Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatannya sehari-hari. Menuju pada terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) perlu dilihat dari pelaksanaan HAM dalam berbagai aspek kegiatan pemerintahan.

PEMINATAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Ketua: Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H.

Peminatan Hukum Ketenagakerjaan diperlukan di era globalisasi, yang ditandai oleh persaingan antar pelaku usaha yang semakin ketat sehingga diperlukan upaya ekstra untuk memenangkan persaingan. Peminatan ini akan memberikan pemahaman atas regulasi bagi pelaku usaha, untuk memenangkan persaingan. Hal itulah yang menjadi kajian bagi tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan mempunyai daya saing dengan tenaga kerja dari negara lain, dimana hal ini merupakan daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam kaitan dengan hal tersebut, dikaji juga peraturan perundang-undangan yang memungkinkan tercapainya kondisi "hubungan industrial yang memberikan rasa aman dalam berusaha dan ketenangan dalam bekerja". Kondisi ini dapat tercipta apabila ada pemahaman yang baik dari para pihak (tripartid) atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai landasan teoritisnya.

PEMINATAN HUKUM KEUANGAN NEGARA

Ketua: Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H.,M.H.

Peminatan Hukum Keuangan Publik adalah studi dalam ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan aspek keuangan, kekayaan dan penguasaan Negara, daerah dan badan hukum pada sektor keuangan. Studi ini memahami dan mendalami tata kelola, regulasi dan risiko dalam keuangan negara, keuangan daerah dan keuangan badan hukum baik

privat maupun publik. Selain itu mendalami konsep dan prinsip sektor keuangan dalam hal wewenang, norma dan regulasinya di Indonesia termasuk hubungan hukum antara pengelola keuangan publik.

5. KURIKULUM

Kurikulum berpedoman pada Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, yaitu SK MWA Universitas Indonesia No. 006/SK/MWA-UI/2004 sebagaimana terakhir diubah dengan SK MWA Universitas Indonesia Nomor 444C/SK/R/UI/2012, yang berfungsi sebagai pembentuk keahlian dan kepribadian, yang mencakup Mata Kuliah Wajib Program, Mata Kuliah Peminatan dan Mata Kuliah Pilihan, dan SK Rektor No. 1740/SK/R/UI/2015 Tentang Kurikulum Program Magister Ilmu Hukum sebagai berikut:

6. KELULUSAN

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Magister adalah:

3,00 - 3,40	**Memuaskan**
3,41 - 3,70	**Sangat Memuaskan**
3,71 - 4,00	**Cum Laude**

Predikat Cum Laude diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi maksimum 4 (empat) semester, dan IPK 3,71 sampai dengan 4,00 tanpa mengulang mata kuliah.

7. TATA ALUR TESIS

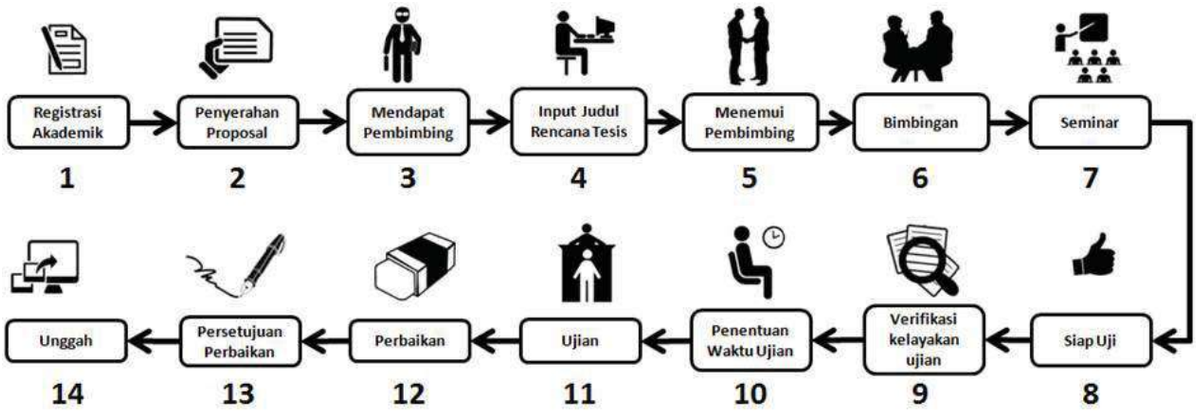

PENJELASAN TATA ALUR PEMBUATAN TESIS:

1. Mahasiswa menginput matakuliah spesial (Tesis) di SIAKNG pada saat registrasi akademik;
2. Mahasiswa datang ke Sekretariat Subprogram Magister Ilmu Hukum untuk menyerahkan Proposal Tesis dan mengisi Buku Catatan Permohonan Tesis;
3. Mahasiswa akan diberitahu soal penunjukan pembimbing oleh Sekretariat Subprogram Magister Ilmu Hukum;
4. Mahasiswa yang telah mendapatkan kepastian pembimbing melakukan input judul tesis ke SIAKNG;
5. Menemui pembimbing;
6. Melaksanakan proses bimbingan;
7. Melaksanakan seminar hasil penelitian;
8. Mendapatkan status siap uji dari pembimbing;
9. Datang ke sekretariat untuk verifikasi kelayakan ujian;
10. Mendapatkan kepastian waktu ujian;
11. Ujian Tesis;
12. Perbaikan naskah tesis sesuai hasil konsultasi dengan pembimbing dan masukan dari penguji;
13. Meminta persetujuan pembimbing untuk perbaikan naskah tesis;
14. Mengunggah tesis ke UI-ana sesuai ketentuan yang berlaku.

MAGISTER KENOTARIATAN

1. PENYENGGARAAN PEMBELAJARAN

Perkuliahan diselenggarakan di Fakultas Hukum UI Kampus Depok dan Kampus UI Salemba pada setiap hari Senin–Jum'at 14.00–21.00 WIB, dan hari Sabtu mulai pukul 08.00–15.00 WIB. Tugas akhir yang wajib dilakukan oleh mahasiswa Program Magister Kenotariatan adalah menyusun tesis. Penyusunan tesis dibawah bimbingan dosen yang kompeten, diseminarkan dan diuji dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn). Namun tidak tertutup kemungkinan diselenggarakan di Kampus Depok.

2. BEBAN MASA STUDI

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 015 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Di Universitas Indonesia, yang berlaku bagi mahasiswa program magister angkatan 2013 dan seterusnya.

Beban studi mahasiswa untuk menyelesaikan Program Magister Kenotariatan sekurang-kurangnya 42 Sks termasuk tesis, yang dapat diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya 4 (empat) semester atau 2 (dua)tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) semester atau 3(tiga) tahun.

Untuk mahasiswa pada Program Magister Kenotariatan, beban studi mahasiswa untuk menyelesaikan Program Magister Kenotariatan sekurang – kurangnya 43 sks termasuk tesis dalam waktu secepat-cepatnya 4 (empat) semester atau 2 (dua)tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) semester atau 3(tiga) tahun.

3. KURIKULUM

Struktur Kurikulum pada Program Magister Kenotariatan berdasarkan SK Rektor Tahun 2017 terdiri dari : Mata Kuliah Wajib, sejumlah 41 sks termasukTesis; Mata Kuliah Pilihan, sebagai pendukung matakuliah wajib untuk memenuhi jumlah sks yang disyaratkan untuk lulus dari Program Magister Kenotariatan, sekurang-kurangnya 2 sks atau 1 matakuliah.

Sejumlah matakuliah dalam kurikulum Program Magister Kenotariatan Memiliki prasyarat. Suatu mata kuliah baru dapat ditempuh jika mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan serta menempuh ujian matakuliah yang menjadi prasyarat

4. EVALUASI

Berdasarkan Peraturan Rektor UI Nomor 015 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia, evaluasi untuk program magister dilakukan dua kali yaitu:

Pada akhir semester kedua, mahasiswa harus memperoleh minimal 14 Sks terbaik dengan IPK minimal 3.00 (tiga koma nol).

Pada akhir masa studi, mahasiswa harus memenuhi persyaratan kelulusan, telah lulus semua beban studi pada program magister kenotariatan dan memperoleh minimal 43 Sks termasuk tesis, dengan IPK minimal 3.00 (tiga koma nol).

5. KELULUSAN

Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah dengan nilai minimal C, dan nilai tugas akhir (tesis) minimal B.Mahasiswa dinyatakan lulus dari Program Magister Kenotariatan apabila telah lulus untuk seluruh mata kuliah (termasuk ujian tesis) sesuai dengan beban studi yang disyaratkan

Penentuan predikat kelulusan didasarkan pada IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) yang diperoleh yaitu :

3,00 - 3,40	**Memuaskan**
3,41 - 3,70	**Sangat Memuaskan**
3,71 - 4,00	**Cum Laude**

Predikat Cum Laude diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi tepat waktu (4 semester), dan IPK 3,71- 4,00 tanpa mengulang mata kuliah.

6. TATA ALUR TESIS

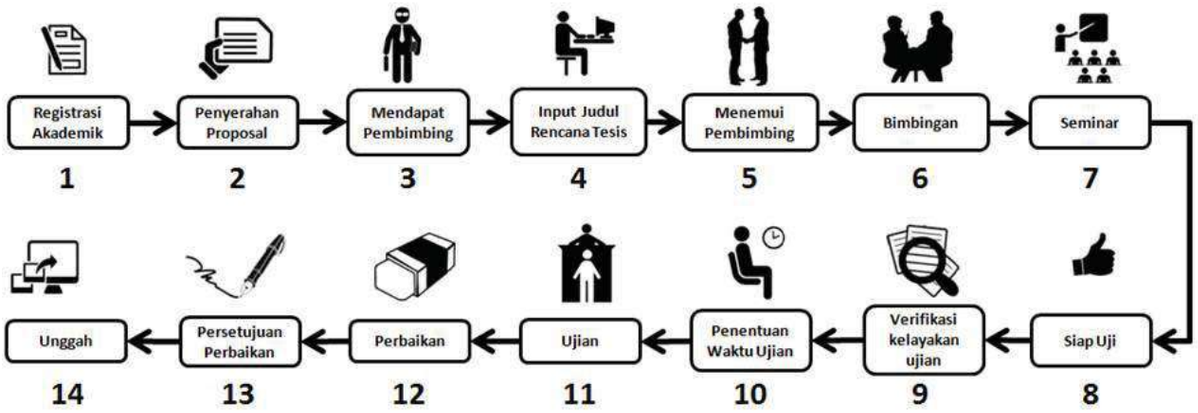

PENJELASAN TATA ALUR PEMBUATAN TESIS:

1. Mahasiswa menginput matakuliah spesial (Tesis) di SIAKNG pada saat registrasi akademik;
2. Mahasiswa datang ke Sekretariat Sub Program Magister Kenotariatan untuk menyerahkan Proposal Tesis dan mengisi Buku Catatan Permohonan Tesis;
3. Mahasiswa akan diberitahu soal penunjukan pembimbing oleh Sekretariat Sub Program Magister Kenotariatan;
4. Mahasiswa yang telah mendapatkan kepastian pembimbing melakukan input judul tesis ke SIAKNG;
5. Menemui pembimbing;
6. Melaksanakan proses bimbingan;
7. Melaksanakan seminar hasil penelitian;
8. Mendapatkan status siap uji dari pembimbing;
9. Datang ke sekretariat untuk verifikasi kelayakan ujian;
10. Mendapatkan kepastian waktu ujian;
11. Ujian Tesis;
12. Perbaikan naskah tesis sesuai hasil konsultasi dengan pembimbing dan masukan dari penguji;
13. Meminta persetujuan pembimbing untuk perbaikan naskah tesis;
14. Mengunggah tesis ke UI-ana sesuai ketentuan yang berlaku.

Birpen Program Magister Ilmu Hukum

DOKTOR ILMU HUKUM

Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia bertujuan menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, sehingga menghasilkan karya inovatif, original dan teruji; memecahkan permasalahan hukum melalui pendekatan interdisiplin, multidisplin, atau transdisplin; dan mengelola, memimpin dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatanumat manusia; serta mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.

Penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Hukum mengacu kepada tiga (3) peraturan Universitas Indonesia (UI), yaitu:

1. Keputusan Rektor UI No. 263/SK/R/UI/2004 (SKR 2004);
2. Keputusan Rektor UI No. 0696/SK/R/2010 (SKR 2010
3. Peraturan Rektor UI No. 016 Tahun 2016.

1. PENYELENGGARAAN DAN JENIS PROGRAM

Perkuliahan Program Doktor diselenggarakan di Kampus Salemba mulai pukul 08.00–17.00 WIB. Namun tidak tertutup kemungkinan diselenggarakan di Kampus Depok.

Setelah diberlakukannya SK Rektor Tahun 2010 yaitu sejak angkatan 2010/2011, Program Doktor Ilmu Hukum FHUI menyelenggarakan dua (2) program yaitu Program Doktor melalui Kuliah dan Riset (by course) dan Program Doktor melalui Riset (by research), namun sejak tahun 2014 Program Doktor untuk sementara tidak menyelenggarakan lagi Program Doktor melalui Riset. Dengan demikian, Program Doktor melalui Riset yang dilaksanakan saat ini adalah Program Doktor melalui Riset yang mengacu kepada Peraturan Rektor UI No. 016 Tahun 2016.

2. BEBAN DAN MASA STUDI

Beban studi pada kurikulum program doktor adalah 48 Sks termasuk disertasi. Kurikulum dapat ditempuh dalam 6 (enam) semester dan maksimum 10 (sepuluh) semester.

3. KURIKULUM DAN TAHAPAN PERKULIAHAAN

KURIKULUM

Kurikulum Program Doktor Melalui Kuliah dan Riset (by course) berdasarkan Keputusan Rektor No. 0990/SK/R/UI/2015 Peraturan Rektor nomor 016 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor adalah sebagai berikut:

1. Kuliah Terstruktur, sejumlah 18 sks yang terdiri dari mata kuliah:
   a. Filsafat Hukum (4 sks);
   b. Metode Penelitian Hukum Empiris (3 sks);
   c. Metode Penelitian Hukum Normatif (3 sks);
   d. Metode Penulisan Disertasi (4 sks);
   e. Teori Hukum (4 sks);
2. Proposal Riset (6 sks);
3. Evaluasi Hasil Riset 50%;
4. Evaluasi Hasil Riset 75%
5. Persiapan Ujian Hasil Riset (tanpa SKS)
6. Hasil Riset (10 sks);
7. Menghasilkan satu makalah ilmiah hasil riset terkait desertasi sebagai penulis utama yang dapat didampingi promotor, sudah diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Internasional terindeks (8 SKS);
8. Promosi (6 sks).

TAHAPAN PERKULIAHAN

Tahapan perkuliahan pada Program Doktor adalah sebagai berikut:

Tahap 1

Pada semester pertama mahasiswa wajib mengikuti semua mata kuliah dan lulus dengan IPK minimal 3.00. Setelah menyelesaikan semua mata kuliah tersebut, mahasiswa baru dapat menempuh Ujian Proposal Riset.

Tahap 2

Mahasiswa Program Doktor yang telah menyelesaikan mata kuliah wajib dapat mengikuti Ujian Proposal Riset yaitu kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi kelayakan proposal. Ujian Proposal Riset mencakup:

1. Penguasaan pengetahuan tentang disiplin yang berkaitan dengan topik riset dan kedalaman materi riset;
2. Penguasaaan metodologi riset bidang ilmu;
3. Kemampuan penalaran;
4. Penguasaan perkembangan mutakhir (state of the art) dalam bidang ilmu maupun bidang minat risetnya;
5. Originalitas; dan;
6. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan/atau penerapannya.

Ujian Proposal Riset diselenggarakan paling lambat pada semester 4.

Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Proposal Riset apabila mendapatkan nilai minimal B. Ujian Proposal Riset dilaksanakan secara tertutup.

Tahap 3

Evaluasi hasil riset 50% dilakukan paling lambat pada semester 6.

Tahap 4

Evaluasi hasil riset 75% dilakukan paling lambat pada semester 8.

Tahap 5

Seminar persiapan Ujian Hasil Riset yang dilakukan secara tertutup, setelah mendapat pernyataan 75% dari tim promotor dan sebelum Ujian Hasil Riset. Seminar diselenggarakan untuk menilai persiapan dan kelayakan naskah hasil riset. Seminar ini dipimpin oleh promotor dan/atau ko-promotor, dengan dihadiri oleh para penguji dan perwakilan Program Pascasarjana. Ujian Hasil Riset (Ujian Pra Promosi) dilaksanakan secara tertutup

Tahap 6

Ujian Hasil Riset (Ujian Pra Promosi) yaitu kegiatan akademik terjadwal yang diselenggarakan secara tertutup. Ujian ini diselenggarakan untuk mengevaluasi hasil riset yang mencakup kedalaman materi, keterkaitan antara hasil riset dengan teori dan metodologi. Ujian Hasil Riset diselenggarakan selambat-lambat pada awal semester 10. Pada tahapan ini, salah satu penguji wajib berasal dari luar UI. Mahasiswa dinyatakan lulus pada tahapan ini apabila memperoleh nilai minimal B.

.

Tahap 7

Tahapan berikutnya adalah penulisan makalah/artikel ilmiah sebagaimana dijelaskan dalam bagian kurikulum diatas. Penulisan makalah/artikel ilmiah (termasuk dalam bentuk prosiding) ini merupakan prasyarat untuk dapat menempuh tahapan berikutnya yaitu Sidang Promosi. Tahapan ini paling lambat dilaksanakan pada semester 9.

Tahap 8

Pada tahap ini, mahasiswa harus menempuh tahapan terakhir dari Program Doktor yaitu Sidang Promosi. Ujian Promosi diselenggarakan paling lambat pada semester 10. Selain itu, semester ini pula merupakan semester terakhir mahasiswa untuk menyerahkan bukti penulisan makalah/artikel sebagaimana ditentukan dalam tahapan sebelumnya.

4. EVALUASI

Peraturan Rektor 016 tahun 2016 Tentang penyelenggaraan Program doktor menentukan bahwa mahasiswa Program Doktor dievaluasi apabila:

1. pada evaluasi akhir 4 (empat) semester pertama tidak berhasil mendapat nilai minimal B untuk Ujian Proposal Riset;
2. pada evaluasi akhir 6 (enam) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 50 (lima puluh) persen berdasarkan penilaian tim promotor;
3. pada evaluasi akhir 8 (delapan) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 75 (tujuh puluh lima) persen berdasarkan penilaian tim promotor;

4. pada akhir masa studi 10 (sepuluh) semester, mahasiswa:
   a. belum menghasilkan 1 (satu) makalah ilmiah hasil riset terkait dengan disertasinya sebagai penulis utama dan sudah diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks;
   b. belum menyerahkan 1 (satu) karya disertasi dan mengikuti sidang Promosi.
5. tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama dua (2) semester berturut-turut.

5. KELULUSAN

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program Doktor adalah:

3,00 - 3,50	**Memuaskan**
3,51 - 3,70	**Sangat Memuaskan**
3,71 - 4,00	**Cum Laude**

Predikat Cum Laude diberikan kepada lulusan

Yang menyelesaikan studi tepat waktu yaitu 6 (enam) semester atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) semester termasuk cuti, dengan IPK 3,71-4,00 yang diperoleh tanpa mengulang mata kuliah.

6. PERPANJANGAN MASA STUDI

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor, mahasiswa Program Doktor dapat memperoleh perpanjangan masa studi maksimal 1 (satu) tahun apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Belum pernah diperpanjang;
2. Telah memperoleh nilai minimal B untuk Ujian Hasil Riset;
3. Memperoleh rekomendasi promotor karena alasan *force majeur* dan adanya jaminan penyelesaian studi;
4. Dekan/Ketua Program mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa registrasi administrasi;
5. Perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan dari Dekan/Ketua Program.

7. PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH

Peraturan Rektor Nomor 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor menentukan bahwa pada akhir masa studi, mahasiswa program doktor wajib mengunggah karya ilmiahnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya saing dan menghindari plagiarisme.

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

Aspek kejujuran merupakan pondasi yang seharusnya mendasari setiap aktivitas warga Universitas Indonesia, termasuk juga mahasiswanya. Untuk menjaga tata tertib kehidupan kampus, maka diterbitkanlah Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/SK/MWA-UI/2004 tentang Perubahan Ketetapan MWA Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia. Berkenaan dengan pengaturan tata tertib warga FHUI, maka telah diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 017/SK/D/FH/VIII/2002 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 41/UN2. F5.D/HKP.02.04.00/2017 tentang Struktur Panitia Pengawas Tata Tertib Fakultas Hukum. Pengaturan ini bertujuan mengatur perilaku setiap warga Universitas Indonesia, termasuk mahasiswa, dalam setiap aktivitasnya agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam lingkungan Universitas Indonesia. Dalam peraturan mengenai tata tertib kehidupan kampus, perilaku mahasiswa dikategorikan menjadi 2 (dua) klasifikasi pengaturan yaitu perilaku dalam kegiatan akademik dan perilaku dalam kegiatan non akademik.

TATA TERTIB AKADEMIK

Berkenaan dengan pengaturan mengenai perilaku mahasiswa dalam kegiatan akademik, maka mahasiswa diwajibkan untuk:

1. Mencapai yang terbaik dalam penelitian, pendidikan, pengajaran dan penerapan pengetahuan;
2. Menegakkan obyektivitas keilmuan dalam melakukan penelitian, pendidikan, pengajaran dan penerapan pengetahuan pada bidang keahliannya;
3. Berpartisipasi secara efektif mencapai visi dalam menjalankan misi universitas; dan;
4. Konsisten dan bertanggung jawab dalam kebebasan akademik.

Selain mengenai kewajiban, di dalam pengaturan mengenai perilaku mahasiswa dalam kegiatan akademik juga terdapat larangan bagi mahasiswa.

Mahasiswa dilarang:

1. Mengakses, membuang, merusak informasi, materi atau properti orang lain tanpa izin;
2. Mengakses, membuang tanpa izin, menyembunyikan atau merusak catatan, *file* atau materi akademik dari perpustakaan dan unit pelaksana teknis lain;
3. Membocorkan hal-hal yang bersifat rahasia;
4. Memakai tanpa izin materi, sistem, *website* dan/atau perangkat lunak pendidikan;
5. Berperilaku tidak sopan yang berkaitan dengan norma-norma moral dan kesusilaan;
6. Menempatkan diri dalam posisi konflik kepentingan;
7. **Melakukan kecurangan;**
8. Memberi ataupun menerima bantuan yang tidak diizinkan;

"ketidakjujuran akademik (meliputi plagiat, mencontek, mengutip tanpa menyebutkan sumber, memalsukan tanda tangan dosen dll)

TATA TERTIB NON AKADEMIK

Berkenaan dengan pengaturan mengenai perilaku mahasiswa dalam kegiatan non akademik, maka mahasiswa dilarang:

1. Memiliki, menjual dan mengonsumsi minuman keras;
2. Memproduksi, menjual, mendistribusikan, memiliki dan menggunakan obat-obatan terlarang atau narkotik;
3. Melakukan atau mencoba untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain cedera;
4. Membawa senjata tajam, senjata api, atau bentuk lainnya yang dapat membahayakan orang lain ke dalam kampus;
5. Menggunakan bahan beracun berbahaya secara melanggar peraturan yang berlaku;
6. Membuat atau mensirkulasikan laporan atau informasi yang tidak benar mengenai kebakaran, ledakan, kejahatan atau jenis emerjensi lainnya;
7. Melakukan intimidasi dan atau bentuk lain yang sifatnya mengancam orang lain;
8. Mengganggu aktivitas dan ketenteraman Universitas Indonesia;
9. Melakukan diskriminasi terhadap orang lain atas dasar agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, orientasi politik, dan cacat fisik;
10. Melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual;
11. Merusak properti Universitas Indonesia;
12. Menyalahgunakan atau mengagunkan properti Universitas Indonesia;
13. Menyalahgunakan teknologi, sistem informasi, termasuk data dan informasi milik Universitas Indonesia;
14. Melakukan perubahan informasi tertulis yang resmi yang menimbulkan ketidakbenaran informasi kepada warga Universitas Indonesia;
15. Memberikan keterangan/kesaksian palsu.

Untuk meminimalisir penggunaan dan peredaran zat adiktif di lingkungan Universitas Indonesia dan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal (khususnya warga Universitas Indonesia) maka telah diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1805/SK/R/UI/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia (KTR UI). Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia adalah ruangan dan/atau area di lingkungan Universitas Indonesia yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.

Bagi mahasiswa yang memproduksi, menjual, mendistribusikan, memiliki dan menggunakan obat-obatan terlarang atau narkotik akan dicabut kedudukannya sebagai mahasiswa Universitas Indonesia.

TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN

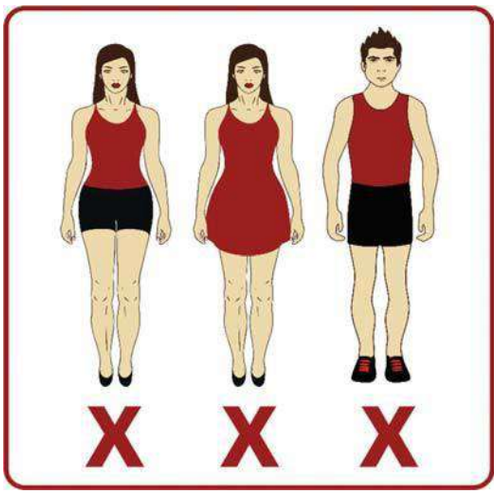

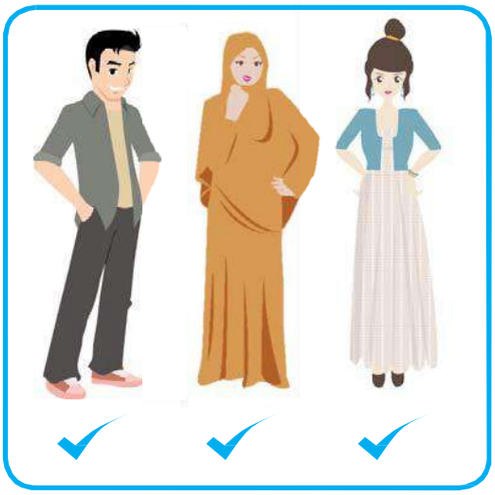

Sebagai tindak lanjut dari penerapan peraturan mengenai tata tertib kehidupan kampus, maka diterbitkanlah Keputusan Dekan FHUI Nomor 029/SK/D/FH/12/2005 tentang Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester dan Penyerahan Nilai Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang diantaranya mengatur mengenai hal-hal yang dilarang dilakukan oleh mahasiswa selama pelaksanaan Ujian Akhir Semester dan perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk kecurangan oleh peserta ujian. Dalam keputusan dekan tersebut, selama ujian berlangsung mahasiswa dilarang:

1. Memakai sandal/selop serta berpakaian tidak rapi dan/atau tidak sopan;
2. Bertingkah laku dan berbicara tidak sopan;
3. Menghidupkan ponsel atau alat komunikasi lainnya selama ujian berlangsung;
4. Membawa senjata tajam dan/atau api.
5. Membawa buku-buku, catatan-catatan kuliah, dan atau catatan-catatan lainnya dalam bentuk apapun juga ke dan di meja ujian, kecuali dalam ujian dengan sistem "terbuka" (open book), atau diperbolehkan oleh penanggungjawab mata kuliah yang diujikan untuk menggunakan beberapa bahan tertulis tertentu.

Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib ujian, mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian.

Tata tertib ujian mengatur mengenai keharusan bagi setiap mahasiswa peserta ujian yaitu:

6. Peserta ujian harus hadir di dalam ruang ujian paling lambat 5 menit sebelum ujian dimulai, kecuali terdapat hal-hal khusus yang ditentukan oleh pengajar;
7. Peserta ujian harus membawa kartu tanda peserta ujian dan duduk di tempat yang telah ditentukan;
8. Peserta ujian yang hadir setelah ujian dimulai hanya dapat mengikuti ujian apabila telah memperoleh ijin dari pengawas;
9. **Peserta ujian yang terlambat lebih dari 30 menit tidak diperbolehkan masuk ke ruang ujian;**
10. Setelah soal ujian dibagikan peserta ujian tidak diperkenankan keluar masuk ruang ujian kecuali untuk alasan darurat dan dengan ijin pengawas;
11. Peserta ujian yang meninggalkan ruang ujian tanpa alasan dan tanpa ijin pengawas dilarang meneruskan ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan;
12. Jika ujian dilaksanakan dengan sistem buka buku (open book) maka yang boleh dibuka hanya hard-copy saja, soft-copy yang disimpan dalam note book/HP/PDA/alat telekomunikasi lainnya tidak diperkenankan untuk dibuka, kecuali diijinkan oleh pengajar.

Tata tertib ujian juga mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai kecurangan yaitu:

1. Memalsu tanda tangan pembimbing akademik;
2. Mencontoh jawaban peserta ujian lain, membawa dan menggunakan catatan dalam bentuk apapun dalam ujian akhir semester yang tidak memakai sistem buku terbuka;
3. Bekerja sama dalam bentuk apapun dan atau membahas soal yang diujikan dengan peserta ujian lain pada saat ujian sedang berlangsung;
4. Mengerjakan ujian bagi peserta ujian lain atau digantikan ujiannya oleh orang lain;
5. Mengganti jawaban peserta ujian lain dengan namanya sendiri;
6. Tidak mengumpulkan lembar jawaban ujian pada saat mata kuliah yang diuji telah dinyatakan selesai

PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN TATA TERTIB

Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 017/SK/D/FH/VIII/2002 tentang Tata Tertib Warga Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 41/UN2.F5.D/HKP.02.04.00/2017 tentang Struktur Panitia Pengawas Tata Tertib, maka pengawasan terhadap pelanggaran tata tertib dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Tata Tertib. Tugas utama dari Panitia Pengawas Tata tertib adalah memberikan rekomendasi penyelesaian kepada pimpinan fakultas berkenaan dengan pelanggaran tata tertib.

Untuk tingkat Universitas Indonesia, dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan tata tertib, maka telah dibentuk Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (P3T2).

SANKSI

Pelanggaran terhadap tata tertib kehidupan kampus diancam dengan sanksi:

1. Peringatan lisan atau tulisan; dan atau;
2. Denda; dan atau
3. Kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya; dan;
4. Larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan Universitas Indonesia; dan atau;
5. Dicabut kedudukannya sebagai mahasiswa Universitas Indonesia.

Pelanggaran terhadap tata tertib pelaksanaan ujian diancam dengan sanksi:

1. Tidak diperkenankan mengikuti ujian-ujian mata kuliah berikutnya selama mata ujian berjalan pada semester tersebut;
2. Nilai bagi semua mata ujian yang telah diikuti pada semester tersebut dinyatakan gugur;
3. Tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan pada satu atau dua semester berikutnya;
4. Tidak diperkenankan melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rektor Universitas Indonesia berwenang menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa Universitas Indonesia yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus ini setelah mendengarkan pertimbangan Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (P3T2), Dewan Guru Besar atau organ Universitas Indonesia lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rektor dapat memberikan kewenangan kepada dekan untuk memberikan tindakan awal, berupa peringatan lisan atau tulisan, denda, kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya, atau larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan Universitas Indonesia, sambil menunggu keputusan akhir rektor.

KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI

1. MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI (18 SK S)

Kode MK	Nama MK	Sks
LWPG80101	Filsafat Hukum	2
LWPG80102	Politik Hukum	2
LWPG80103	Sosiologi Hukum	2
LWPG80104	Teori Hukum	2
LWPG80105	Metode Penelitian	2
LWPG80106	Seminar Usulan Penelitian Tesis	2
LWPG80207	Tesis	6

MATA KULIAH WAJIB PEMINATAN

1. MATA KUIAH PEMINATANHUKUM EKONOMI ISLAM (20 SKS)

Mahasiswa yang memilih Peminatan Hukum Ekonomi Islam harus menempuh 20 sks wajib peminatan

Kode MK	Nama MK	Sks
LWIE80201	Filsafat Hukum Islam	2
LWIE80201	Metode Penemuan Hukum Islam	2
LWIE80203	Aspek Hukum Ekonomi Islam	2
LWIE80204	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN	2
LWIE80205	Ayat-Ayat dan Hadits Hukum Ekonomi Islam	2
LWIE80206	Hukum Kontrak dalam Islam	2
LWIE80207	Hukum Perbankan Islam	2
LWIE80208	Hukum Lembaga Keuangan Islam Non Bank	2
LWIE80209	Peradilan Agama dan Arbitrase Syariah	2
LWIE80210	Hukum Zakat dan Wakaf	2

2. MATA KULIAH PEMINATAN HUKUM TRANSNASIONAL (24 SKS)

Mahasiswa yang memilih Peminatan Hukum Transnasional harus menempuh 24 sks mata kuliah wajib peminatan

Kode MK	Nama MK	Sks
LWTN80201	Yurisdiksi dan Kewilayahan	2
LWTN80202	Hukum & Kebijakan Lingkungan	2
LWTN80203	Hukum Transnasional Pemanfaatan Udara dan Angkasa	2
LWTN80204	Hukum Transnasional Pemanfaatan Laut	2
LWTN80205	Hukum Perdagangan Multilateral dan Regional	2
LWTN80206	Perjanjian Internasional dan Kontrak Internasional	2

Kode MK	Nama MK	Sks
LWTN80207	Negosiasi Internasional	2
LWTN80208	Organisasi Perdagangan Internasional	2
LWTN80209	Penyelesaian Sengketa Internasional	2
LWTN80210	Penanaman Modal Asing dan Peminjaman Internasional	2
LWTN80211	Hukum Jual Beli Internasional	2
LWTN80212	Transaksi Bisnis Internasional	2

3. MATA KULIAH PEMINATAN HUKUM KENEGARAAN (22 SKS)

Mahasiswa yang memilih Peminatan Hukum Kenegaraan harus menempuh 22 sks mata kuliah wajib peminatan dan 2 sks mata kuliah pilihan bebas

Kode MK	Nama MK	Sks
LWCL80201	Perbandingan Konstitusi	2
LWCL80202	Peradilan Konstitusi	2
LWCL80203	Hak Asasi Manusia	2
LWCL80204	Hukum Pemerintahan Daerah	2
LWCL80205	Birokrasi dan Good Governance	2
LWCL80206	Hukum Keuangan Publik	2
LWCL80207	Teori Perundang-undangan	2
LWCL80208	Hukum Lingkungan	2
LWCL80209	Peradilan Administrasi Negara	2
LWCL80210	Partai Politik dan Pemilihan Umum	2
LWCL80211	Lembaga Negara	2
LWCL80212	Sistem Hukum Indonesia*	2
LWCL80213	Hukum Administrasi Kepegawaian*	2
LWCL80214	Hukum Pajak*	2

**Pilih salah satu dari mata kuliah berikut*

4. MATA KULIAH PEMINATAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA(20 SKS)

Mahasiswa yang memilih Peminatan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana harus menempuh 20 sks mata kuliah wajib peminatan dan 4 sks mata kuliah pilihan bebas

Kode MK	Nama MK	Sks
LWCJ80201	Perkembangan Teori2 Hukum Pidana	2
LWCJ80202	Sistem Peradilan Pidana	3
LWCJ80203	Kriminologi	2
LWCJ80204	Hk Pidana dan Kegiatan Perekonomian	3
LWCJ80205	Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan HAM	3
LWCJ80206	Sejarah dan Perbandingan Hukum Pidana	2
LWCJ80207	Hukum Pidana dan Tindak Pidana Korupsi	3
LWCJ80208	Birokrasi dan Good Governance	2
LWCJ80210	Hukum Pajak*	2
LWCJ80211	Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan*	2

Kode MK	Nama MK	Sks
LWCJ80212	Aspek Pidana dalam Hukum Lingkungan*	2
LWCJ80213	Hukum Keuangan Publik*	2
LWCJ80214	Hukum Perlindungan Konsumen*	2

**Pilih salah satu dari mata kuliah berikut*

5. MATA KULIAH PEMINATAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL (20 SKS)

Mahasiswa yang memilih Peminatan Hukum Kekayaan Intelektual harus menempuh 20 sks mata kuliah wajib peminatan dan 4 sks mata kuliah pilihan bebas

Kode MK	Nama MK	Sks
LWIP80201	Hukum Paten dan Rahasia Dagang	2
LWIP80202	Hukum Merek dan Indikasi Geografis	2
LWIP80203	Hukum Hak Cipta dan Hak-hak Terkait	2
LWIP80204	Hukum Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	2
LWIP80205	Hukum Perlindungan Varietas Tanaman	2
LWIP80206	Alih Teknologi dan Telematika	2
LWIP80207	HKI dan Persaingan Usaha	2
LWIP80208	Litigasi HKI dan Penyelesaian Sengketa	2
LWIP80209	Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional	2
LWIP80210	Valuasi dan Manajemen HKI	2

6. MATA KULIAH PEMINATAN HUKUM EKONOMI (20 SKS)

Mahasiswa yang memilih Peminatan Hukum Ekonomi harus menempuh 20 sks mata kuliah wajib peminatan dan 4 sks mata kuliah pilihan bebas

Kode MK	Nama MK	Sks
LWEL80201	Hukum Perusahaan	2
LWEL80202	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2
LWEL80203	Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan	2
LWEL80204	Hukum Pembiayaan Perusahaan	2
LWEL80205	Transaksi Bisnis Internasional	2
LWEL80206	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	2
LWEL80207	Transaksi Berjaminan	2
LWEL80208	Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi	2
LWEL80209	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	2
LWEL80210	Hukum Pajak	2
LWEL80211	Hukum Asuransi*	2
LWEL80212	Hukum Dagang Internasional*	2
LWEL80213	Akuntansi untuk Sarjana Hukum*	2
LWEL80214	Arbitrase & Penyelesaian Sengketa Alternatif*	2
LWEL80215	Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*	2
LWEL80216	Hukum Perlindungan Konsumen*	2
LWEL80217	Kapita Selekta Hukum Perikatan	2

**Pilih salah satu dari mata kuliah berikut*

7. MATA KULIAH PEMINATAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (24 SKS)

Mahasiswa yang memilih Peminatan Hukum Perdagangan Internasional harus menempuh 24 sks mata kuliah wajib peminatan.

Kode MK	Nama MK	Sks
LWIT80201	Hukum dan Kebijakan Perdagangan Internasional	2
LWIT80202	Kerangka Hukum dan Kelembagaan WTO	2
LWIT80203	GATT 1994	2
LWIT80204	Hukum Tentang Perdagangan Jasa	2
LWIT80205	Hukum Investasi Terkait Perdagangan Internasional	2
LWIT80206	HKI Terkait Bidang Perdagangan Internasional	2
LWIT80207	Persetujuan Perdagangan Regional dan Bilateral	2
LWIT80208	Upaya-upaya Hukum dibidang Perdagangan	2
LWIT80209	Kontrak Perdagangan Internasional	2
LWIT80210	Peraturan Perundang-undangan Perdagangan Dalam Negeri	2
LWIT80211	Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional	2
LWIT80212	Perancangan Kontrak dan Peraturan Perundang-undangan	2

8. MATA KULIAH PEMINATAN HAM DAN GOOD GOVERNANCE (22 SKS)

Mahasiswa yang memilih Peminatan HAM dan Good Governance harus menempuh 18 sks mata kuliah wajib peminatan dan 6 sks mata kuliah pilihan bebas.

Kode MK	Nama MK	Sks
LWHR80201	Good Governance and Law	2
LWHR80205	Criminal Law and Human Rights	2
LWHR80202	Implementation of Human Rights and Good Governance	2
LWHR80203	Transition to Human Rights and Good Governance	2
LWHR80204	Legal/Professional Ethic and Human Rights/ Good Governance	2
LWHR80206	Comparative Administrative Law	2
LWHR80207	Corruption/Integrity and Good Governance	2
LWHR80208	Birokrasi dan Good Governance	2
LWHR80209	HAM	2

9. MATA KULIAH PEMINATAN HUKUM KETENAGAKERJAAN (18 SKS)

Mahasiswa yang memilih Peminatan Hukum Ketenagakerjaan harus menempuh 18 sks mata kuliah wajib peminatan dan 6 sks mata kuliah pilihan bebas.

Kode MK	Nama MK	Sks
LWLB80201	Hukum Hubungan Kerja	2
LWLB80202	Hukum Hubungan Industrial	2
LWLB80205	Hukum Tentang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja	2
LWLB80206	Hukum Jaminan Sosial	2
LWLB80207	Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan	2
LWLB80203	Hukum Tentang Pengupahan	2
LWLB80209	Kapita Selekta Masalah Perburuhan	2
LWLB80204	Hukum Dan Migrasi Tenaga Kerja	2
LWLB80208	Hkm. Administrasi kepegawaian	2

10 . MATA KULIAH PEMINATAN HUKUM SUMBER DAYA ALAM (22 SKS)

Mahasiswa yang memilih Peminatan Hukum Sumber Daya Alam harus menempuh 22 sks mata kuliah wajib peminatan dan 2 sks mata kuliah pilihan bebas.

Kode MK	Nama MK	Sks
LWNR80201	Hukum Kehutanan	2
LWNR80203	Hukum Pertambangan	2
LWNR80204	Hukum Perminyakan dan Gas Bumi	2
LWNR80205	Hukum Kelautan dan Perikanan	2
LWNR80207	Hukum Sumber Daya Air	2
LWNR80209	Hukum Investasi dan Penanaman Modal	2
LWNR80210	Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah	2
LWNR80208	Hukum Perizinan	2
LWNR80202	Pengadaan Tanah	2
LWNR80206	Hukum Lingkungan	2
LWNR80211	Kapita Selekta Hukum Tanah	2

11. MATA KULIAH PEMINATAN HUKUM KEUANGAN NEGARA (22 SKS)

Mahasiswa yang memilih Peminatan Hukum Keuangan Negara harus menempuh 22 sks mata kuliah wajib peminatan dan 2 sks mata kuliah pilihan bebas.

Kode MK	Nama MK	Sks
LWPF80201	Hukum dan Kebijakan Anggaran Publik/Privat	2
LWPF80202	Hukum Perencanaan	2
LWPF80205	Hukum Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2
LWPF80204	Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan	2
LWPF80206	Hukum Perusahaan Negara dan Daerah	2
LWPF80203	Hukum Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah	2
LWPF80207	Hukum Transaksi Keuangan dan Perbankan	2
LWPF80208	Hukum Pengadaan Barang/Jasa	2
LWPF80209	Hukum Pengawasan/Pemeriksaan	2
LWPF80210	Hukum Tentang Aset dan Barang Milik Publik/Privat	2
LWPF80211	Analisis Hukum Terhadap Kbijakan/Keputusan Keuangan	2

Public Lecture Mr. Maina Kiai

DESKRIPSI MATA KULIAH

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

1. MATA KULIAH WAJIB PROGRAM

Filsafat Hukum (LWPG 8010)

Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diajak agar dapat memahami perkembangan pemikiran di bidang filsafat hukum pada berbagai kawasan dari beraneka kurun waktu. Pemahaman tersebut dapat dicapai melalui pendekatan historis dan sistematis. Pembabakan perkuliahan diawali dengan: Pergerakan terhadap natural law (hukum alam), baik yang metologis, theologis maupun yang rasionalis, Perbedaan Naturalist dan Positivistik, Kemudian dikaji lebih mendalam tentang: *Analytical Jurisprudence* yang klasik maupun modern (termasuk *Economic Analysis of law*), *Sociological Jurisprudence*, *Realism* (American dan Scandinavian), *Historical Jurisprudence*, *Critical Legal Studies*, *Feminist Jurisprudence* dan *Postmodernist Jurisprudence*.

- **Pengajar**: Prof. Erman Radjagukguk, Agus Brotosusilo , Fernando Manullang, Jufrina Rizal, M.R. Andri Gunawan Wibisana.

Politik Hukum (LWPG 80102)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang perspektif resmi tentang arah pembangunan hukum dan hukum sebagai kristalisasi pemikiran-pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan pengambil keputusan dan pemegang kekuasaan hukum. Pembahasan dilakukan terhadap permasalahan di sekitar Politik Hukum, dimensi teoritis dan praktis dari Politik Hukum, seperti: *democracy*, *constitution*, *constitutionalism*, *constitutional law*, *legal order*, *hierarchy of norms*, *autonomous law*, *responsive law*, *comparative perspectives*, *interpretative revisited*, *legal rules*, *the process of social change*, dan lain-lain.

- **Pengajar**: Prof. Satya Arinanto, Adijaya Yusuf , Arie Afriansyah, Fatmawati, Hadi Rahmat Purnama.

Sosilogi Hukum (LWPG 80103)

Mata kuliah ini akan mengajak mahasiswa untuk mengkaji Hukum dalam konteks sosial. Sebagai ilmu nomografis maka Sosiologi Hukum berurusan dengan kenyataan hukum sehari-hari (*the full social reality of law*).

Mata kuliah ini memahami perbedaan *optic deskriptif* yang digunakan Sosiologi Hukum dengan *optic preskriptik* dalam analitis-positivis, memahami kajian ilmiah deskripsi hukum dengan pendekatan sosiologi, memahami dan menganalisa fungsi hukum dalam masyarakat serta menganalisa hubungan-hubungan hukum dengan struktur masyarakat termasuk hubungan hukum dengan proses social yang terjadi dalam masyarakat.

Memberikan pemahaman hukum secara legalistik positivis saja tidak mampu menangkap kebenaran secara utuh. oleh kerena itu Sosiologi Hukum menjelaskan bagaimana hukum berproses atau bekerja dalam masyarakat. Hukum tidak dipahami sebagai institusi yang esoterik dan otonom, melainkan sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar. Dalam kuliah ini dijelaskan antara lain berbagai fungsi hukum, yaitu: Hukum sebagai pengendalian masyarakat, Hukum sebagai alat rekayasa sosial dan Hukum sebagai mekanisme integrasi.

Dijelaskan pula bagaimana agar hukum tersebut dapat efektif dan bagaimana penegakan hukum. Kajian ini selain mengajak mahasiswa untuk melihat dan menganalisa hukum dalam kenyataan sehari-hari, juga menjelaskan teori yang berkembang di dalam Sosiologi Hukum serta metodenya.

● **Pengajar**: Emmy Johassari Ruru, Jufrina Rizal, Ratih Lestarini, Winarno Yudho.

Teori Hukum (LWPG 80104)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang: Apa yang dimaksud teori hukum, Pengenalan terhadap beberapa teori dan Penggunaan atau pemanfaatan Teori Hukum dalam penelitian dan pembuatan karya ilmiah, khususnya di bidang hukum.

Materi yang disajikan disesuaikan dengan peminatan masing-masing yang diambil yaitu: Teori Hukum Pidana, Teori Hukum Islam, Teori Hukum Transnasional, Teori Hukum Tata Negara, Teori Hukum Administrasi Negara, Teori Hukum Ekonomi, Teori Hukum Hak Dan Kekayaan Intelektual, Teori Hukum Ketenagakerjaan, Teori Hukum Sumber Daya Alam, Teori Hukum Perdagangan Internasional, , Teori Hukum Ekonomi serta Teori Hukum HAM dan Good Governance. Mata kuliah Teori Hukum Islam ini meliputi teori-teori hukum yang meliputi beberapa sistem hukum yang ada di dunia *civil law*, *common law*, dan hukum Islam. Teori hukum Islam seperti teori *istinbath al-ahkam* meliputi teori keadilan, teori ijtihad meliputi teori *qiyash*, teori *maslahah al-mursalah*, dan teori *maqashid*.Dalam mata kuliah ini juga dibahas teori hukum di Indonesia, yaitu teori hukum dalam sistem Pancasila, seperti *teori integratif*, teori hubungan hukum Islam dengan hukum Adat, teori hubungan hukum Islam dengan hukum Adat dan hukum asal Barat, teori positivisme hukum Islam di Indonesia meliputi teori pohon hukum Islam (*Islamic Law as a Growing Tree*), teori eklektisisme, teori lingkaran konsentris, dan teori integratif keislaman

● **Pengajar:** Prof. Achmad Zen Umar Purba, Prof. Aloysius Uwiyono, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Prof. Hikmahanto Juwana, Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Satya Arinanto, Prof. Uswatun Hasanah, Andhika Danesjvara, Agus Brotosusilo, Farida Prihartini, Harsanto Nursadi, Neng Djubaedah, Tri Hayati.

Metode Penelitian Hukum (LWPG 80105)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang kedudukan penelitian hukum dalam bingkai ilmu hukum serta menjelaskan alur ilmiah dari kegiatan penelitian hukum sebagai cara untuk melahirkan *analytical or scientific writing* yang dalam hal ini adalah penulisan tesis. Mata kuliah ini menegaskan berbagai bentuk/tipe penelitian hukum, teknik pengumpulan data, jenis-jenis data dan tehnik analisis. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang cara melakukan penelitian yang tepat sesuai dengan permasalahan penelitian. . Pembahasan tersebut mencakup antara lain: Dasar filsafat ilmu hukum, konsep hukum dan konsekuensinya terhadap metode penelitian hukum, penelitian hukum normatif dan cara serta tahapan dalam penelitian, telaah kepustakaan dan penyusunan usulan penelitian.

● **Pengajar:** Prof. Sulistyowati Soewarno, Prof. Valerine J.L. Kriekhoff, Heru Susetyo, Lidiwina Inge Nurtjahyo, Sri Mamudji.

Seminar Usulan Penelitian Tesis (LWPG 80106)

Mata kuliah Seminar Usulan Penelitian Tesis berisi rangkaian perkuliahan dalam bentuk seminar (*student centered learning*) berupa pengarahan bagi mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk membuat tesis, berupa tahapan-tahapan penulisan proposal tesis sejak pembuatan strategi perencanaan penelitian "Research Design" hingga penuangannyadalam proposal tesis. Tahapan tersebut berupa: penentuan topik bahasan, perencanaan judul serta perumusan permasalahan *(problem)* penelitian, tujuan penulisan maupun asumsi penelitian. Sesuai dengan karakteristik penelitian yang diambil mahasiswa akan diarahkan untuk membuat kerangka konsep dan penentuan teori-teori yang dapat digunakan. Kemudian akan diarahkan untuk menentukan metode penelitianyang tepat dan sistematika penulisan. Terakhir akan diarahkan juga cara penulisan daftar referensi yang sesuai dengan karakteristik penelitian. Dalam mata kuliah ini masing-masing mahasiswa akan mempresentasikan rencana penulisan tesisnya

masing-masing hingga berbentuk suatu proposal penelitian tesis yang lengkap.

● **Pengajar:** Prof. Agus Sardjono, Prof. Felix Oentoeng Soebagjo, Prof. Mardjono Reksodiputro, Prof. Uswatun Hasanah, Adijaya Yusuf, Daly Erni, Dian Puji Nugraha Simatupang, Edmon Makarim, Eva Achjani Zulfa, Farida Prihartini, Gemala Dewi, Nurul Elmiyah, Surastini Fitriasih, Sri Mamudji, Yetty Komalasari Dewi

Tesis (LWPG 80207)

Tesis adalah Tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah yang mencakup masalah, tujuan, tinjauan pustaka, serta pendekatan dan metode. Tesis merupakan salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah kurikulum Program Studi.

2. MATA KUL IAH WAJIB PEMINATAN

Hukum Ekonomi

Hukum Perusahaan (LWEL80201)

Dengan mengikuti mata kuliah ini mahasiswa akan mendapatkan pengertian tentang aspek hukum dari perseroan terbatas dan kepailitan perusahaan, dan juga tentang *good corporate governance*. Pembahasannya meliputi: Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, tanggungjawab pemegang saham, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham, Tugas-tugas Komisaris dan Direksi, hak pemegang saham minoritas, pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa dalam badan Perseroan Terbatas, kriteria perusahaan dapat dipailitkan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tugas kurator, *actio paulina*, pengakhiran kepailitan serta merger akuisisi dan konsolidasi.

● **Pengajar:** Prof. Felix Oentoeng Soebagjo, Freddy Harris, Teddy Anggoro, Yetty Komalasari Dewi.

Hukum Investasi dan Pasar Modal (LWEL80202)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang: Penanaman modal langsung (*direct investment*), Penanaman modal tidak langsung (*fortfolio investment*), . Di samping itu diberikan pula pengetahuan teknis mengenai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta perjanjian atau kontrak di kedua bidang hukum tersebut di atas.

Materi mata kuliah ini antara lain mencakup: perlunya modal asing, syarat-syarat dan kerangka hukum penanaman pasar modal, *joint venture*, penyelesaian sengketa penanaman modal asing, prinsip-prinsip dalam pasar modal, mekanisme *go public*, perjanjian emisi, larangan *insider trading*, penawaran tender (*tender offer*), penyelesaian sengketa di bidang pasar modal, serta *World Trade Organization* (WTO) dan peraturan investasi.

● **Pengajar:** Prof. Erman Radjaguguk, Arman Nefi, Indra Surya, Yetty Komalasari Dewi.

Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya (LWEL80203)

Dalam perkuliahan ini akan dilakukan pembahasan, diskusi dan disertai dangan analisis kasus-kasus perbankan yang aktual yang meliputi: Sistem Keuangan dan Sistem Perbankan di Indonesia, Liberalisasi Perbankan, Perbankan Syariah (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah & Kantor Layanan Syariah; Aspek Hukum Kelembagaan & Usaha Perbankan Syariah), Fungsi dan Peranan Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah serta KYC, Sumber Dana Perbankan, Perlindungan Dana Nasabah, Fungsi dan Peran LPS dalam Sistem Perbankan, Perkreditan dan Pengikatan Jaminan, Kredit Sindikasi, Jasa-Jasa Pelayanan Perbankan, Transaksi Perdagangan Internasional dan Domsetik, Kerahasiaan dalam kegiatan Perbankan (Rahasia Bank, RahasiaPerusahaan, Rahasia Dagang), Tindak Pidana di bidang Perbankan dan Pencucian

Uang (*Money Laundering*) serta Bank gagal, likuidasi bank dan system penjaminan nasabah penyimpan.

●**Pengajar:** Yunus Husein, Zulkarnain Sitompul.

Transaksi Bisnis Internasional (LWEL80205)

Dalam mata kuliah ini akan dibahas berbagai prinsip dan teori lanjut menyangkut aspek-aspek hukum dari transaksi bisnis lintas negara. Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami beberapa prinsip serta cara penyelesaian permasalahan hukum dalam transaksi bisnis internasional.

●**Pengajar:** Prof. A. Zen Umar Purba, Lita Arijati.

Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LWEL80206)

Mata kuliah Hukum Anti Monopoli ini dimaksudkan untuk mengantar mahasiswa memahami hukum dan kebijakan persaingan. Untuk maksud tersebut, mata kuliah ini membahas berbagai aspek bidang hukum anti monopoli baik ekonomi maupun hukum.

Dalam aspek ekonomi akan dibahas bentuk-bentuk pasar, konsep dasar ekonomi, pengertian dasar, mekanisme pasar, kekuatan monopoli, serta peranan ilmu ekonomi dalam hukum anti monopoli.

Dalam aspek hukum akan dibahas berbagai bentuk perjanjian dan praktek dagang baik horizontal maupun vertikal, monopolisasi maupun bentuk-bentuk hambatan lain terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan.

● **Pengajar**: Anna Maria Tri Anggraini, Ditha Wiradiputra, Kurnia Toha, Syamsul Maarif, Teddy Anggoro**.**

Transaksi Berjaminan (Ha k Tanggungan dan Fidusia) (LWEL80207)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang transaksi berjamin (Hak Tanggungan dan Fidusia) yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Maksud dari ditawarkannya mata kuliah tersebut adalah untuk menumbuhkan pendangan-pandangan yang kritis dan analitis dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kedua lembaga jaminan tersebut dan bagaimana implikasinya dalam kegiatan ekonomi.

Mata kuliah ini memiliki pemahaman konseptual dan pandangan kritis terhadap aspek hukum transaksi berjaminan yang berkaitan dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan dan Fidusia, memiliki kemampuan (*capability*) dalam memberikan solusi-solusi kritis terhadap permasalahan yang timbul dalam implikasi transaksi berjaminan yang berkaitan dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan dan Fidusia. Mata kuliah ini membahas tentang: Kedudukan Lembaga Hak Tanggungan dan Fidusia dalam Hukum Indonesia, Hak Tanggungan (Lembaga Jaminan atas Tanah) seperti Prinsip-prinsip pemberian Hak Tanggungan, Tahap Hak Tanggungan, Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan, Peralihan Hak Tanggungan, Hapusnya Hak Tanggungan, Pengambilalihan asset tanah dalam rangka pelunasan hutang, Rumah Susun, Satuan Rumah Susun sebagai Jaminan Hutang dengan Hak Tanggungan, Implikasi Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Implikasi Hak Tanggungan dalam rangka kerjasama Bank dan Developer. Serta membahas Fidusia dan *Mortgage*.

●**Pengajar:** Prof. Arie Sukanti Hutagalung, Prof. Rosa Agustina, Suparjo Sujadi, Hendriani Parwitasari.

Hak Kekayaan Intelektual (LWEL80209)

Pemberian mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang kebijakan dasar tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, latar belakang (*Philosophical background*) dari Hak Kekayaan Intelektual, serta ruang lingkup dan sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk prinsip-prinsip perlindungannya. Di samping itu mahasiswa dapat mampu menggali sumber-sumber Hak Kekayaan Intelektual baik dalam konteks Nasional maupun Internasional. Dengan demikian pada gilirannya mahasiswa akan mampu menjawab persoalan-persoalan di sekitar Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), baik yang bersifat konvensional, seperti paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan lain-lain, serta yang bersifat tradisional seperti pengetahuan tradisional dan *Folklore*.

●**Pengajar:** Brian Amy Prastyo, Cita Citrawinda.

Hukum Pajak (LWEL80210)

Dengan memperoleh mata kuliah hukum pajak, diharapkan mahasiswa dapat memahami pajak, sebagai salah satu kewajiban terpenting yang harus ditaati oleh masyarakat termasuk Notaris/PPAT, pengertian/Filosofi pajak dan sebagian hukum positif pajak terkait dengan Notaris/PPAT.

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang: Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan dan PPN, Tarif, Dasar Pengenaan Pajak dan cara menghitungnya, Aspek Pajak terhadap profesi Notaris/PPAT, sehingga dapat memahami hak dan kewajiban Notaris/PPAT selaku Wajib Pajak PPH maupun PPN, serta memperoleh manfaat lebih luas yang dapat mendukung pelayanan profesi Notaris/PPAT Kepada masyarakat, karena mahasiswa memperoleh contoh-contoh praktis perhitungan pajak yang ada kaitan dengan profesi Notaris/PPAT.

Ruang lingkup materi yang diberikan mencakup: Pengantar Hukum Pajak, Pengertian Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Fungsi-fungsi Pajak, Penggolongan Pajak, Eksistensi Pajak, Resistensi terhadap pajak, Sistem Pengenaan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Dasar hukum, Subjek Pajak/Wajib Pajak, SPT, Pembukuan, Pembayaran Pajak, Penetapan pajak, Hak-hak Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Dasar hukum, Prinsip pengenaan, Subjek dan Wajib Pajak, Objek PPH, Dasar Pengenaan PPH, Tarif, Pajak PPH atas Badan Usaha, PPH. Atas perorangan, PPH atas Karyawan, Pajak Pertambahan Nilai Dasar Hukum, Subjek/WP PPN, Obyek PPN, Dasar pengenaan pajak, Tarif dan cara penerapannya, Faktur Pajak, Cara menghitung PPN.

●**Pengajar:** Eka Sri Sunarti, Tjip Ismail.

Hukum Dagang Internasional (LWEL80212)

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang Hukum Perdagangan Internasional, khususnya yang terkait dengan masalah-masalah antar negara yang berdampak bagi para pelaku usaha. Perkuliahan lebih ditekankan pada aspek hukum publik pada Perdagangan Internasional. Dengan pengetahuan tentang masalah-masalah pedagangan Internasional, maka mahasiswa dapat memahami aspek hukum publik dari perdagangan Internasional. Mata kuliah ini membahas teori Perdagangan Internasional; Organisasi Internasional di Bidang Perdagangan; Blok Perdagangan; Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN); Prinsip *National Treatment;* Penyelesaian Sengketa pada *World Trade Organization* (WTO); Hukum Antidumping; Subsidi dan *Countervailing Duties*; TRIPs; Perdagangan Internasional dan Investasi; Perdagangan dan Hukum Persaingan.

●**Pengajar:** Prof. Hikmahanto Juwana, Prof. Zulfa Djoko Basuki.

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi (LWEL80215)

Mata kuliah ini membahas tentang masalah-masalah aktual dalam masyarakat Indonesia dalam bidang hukum yang dikaitkan dengan masalah-maslah pembangunan ekonomi. Selanjutnya topik-topik yang dibahas adalah: Teori-teori Hukum dan Pembangunan; Hukum dan Pembangunan Bangsa; Demokratisasi dan Pembangunan; Hak Asasi Manusia dan Pembangunan di negara berkembang; Peranan legislatif dalam modernisasi masyarakat; Mengapa undang-undang tidak efektif; Peranan Sarjana Hukum di negara sedang berkembang; Peranan Hukum dan Fungsi Sarjana Hukum di negara yang sedang berkembang; Globalisasi ekonomi dan globalisasi hukum; Internasionalisasi praktek hukum; serta Globalisasi ekonomi (sistem hukum yang saling mempengaruhi).

●**Pengajar:** Prof. Erman Radjagukguk, Prof. Rosa Agustina.

Kapita Selekta Hukum Perikatan (LWEL80217)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang isu-isu dalam hukum perjanjian yang aktual. Mata kuliah ini membahas tentang sistematika dan pola pengaturan buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian perikatan, sumber perikatan, macam-macam perikatan, prestasi dan wanprestasi, keadaan memaksa, ganti rugi, perbuatan melawan hukum dan hapusnya perikatan, persetujuan khusus yang diatur dalam KUHPerdata maupun yang diatur di luar KUHPerdata, meliputi: jual-beli, tukar-menukar,

sewa-menyewa, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penanggungan.
●**Pengajar:**, Prof. Rosa Agustina, Abdulsalam.

Hukum Asuransi (LWEL80211)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan pendalaman tentang hukum perasuransian dan praktek bisnis perasuransian serta perkembangan terkini dalam industri perasuransian. Adapun substansi yang akan dikemukakan antara lain mengenai Pengertian Asuransi dan Hukum Asuransi, Peranan Asuransi Dalam Pembangunan Ekonomi, Risiko dan Manajemen Risiko, Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi, Obyek Asuransi, dan Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Asuransi; Asas/Prinsip/Doktrin Dalam Perjanjian Asuransi yang Meliputi Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (Insurable Interest); Asas Itikad Baik (Utmost Good Faith); Asas Indemnitas/Ganti Kerugian (Indemnity) dan Asas Penyebab Terjadinya Kerugian (Proximate Cause); Asas Subrograsi dan Kontribusi (Subrogation & Contribution); Struktur Polis Asuransi dan Hak Kewajiban Penanggung Tertanggung; Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (Klaim) dan Larangan Memperlambat Penyelesaian Klaim; Hukum Perusahaan Perasuransian yang Meliputi Bidang Usaha dan Jenis Usaha Perasuransian, Penutupan Obyek Asuransi di Indonesia, dan Asas Kebebasan Memilih Penanggung; Bentuk Usaha Perasuransian, Kepemilikan, Perizinan, dan Permodalan; Pembinaan dan Pengawasan, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) Bagi Pengurus; Ketentuan Produk Baru, Polis, dan Premi Asuransi; Pengenalan Beberapa Produk Asuransi.
●**Pengajar:** Kornelius Simanjuntak.

Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi (LWEL80208)

Mengajarkan kepada mahasiswa untuk memahami hukum yang terkait dengan bagaimana memahani hukum tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi yang membahas beberapa topik diantaranya: Tentang Tindak Pidana Ekonomi; Ketentuan-ketentuan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; Perundang-undangan kerjasama Internasional meliputi: perjanjian, bantuan timbal balik masalah pidana dan ekstradisi; *Non convictionbasedasset forfeiture* dan *stolen* asset *recovery*.
● **Pengajar:** Prof. Topo Santoso, Luhut M. P. Pangaribuan, Patricia Rinwigati.

Hukum Pembiayaan Perusahaan (LWEL80204)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang pembiayaan perusahaan (*Corporate Finance*) dan aspek-aspek hukum Perseroan Terbatas termasuk didalamnya *legal due diligence*, ragam *coporate financing*, *Equity Financing-Private Placement*, *Debt Financeing* (*Multi lender Financeing dan Project Financing*) dan juga *public private partnership* serta *investment Protection* dan *Dispute Resolutiuon*.
●**Pengajar:** Prof. Erman Radjagukguk, Teguh Irianto Maramis, Todung Mulya Lubis.

Arbitrase dan Penyelesain Sengketa Alternatif (LWEL80214)

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang materi sebagai berikut: Pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase; Jenis Arbitrase & Kriterianya; Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase; Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum; Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum; Arbiter: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar; Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya; Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya; Putusan Arbitrase; Upaya Hukum Terhadap Putusan Arbitrase; Upaya Hukum Terhadap Putusan Arbitrase; Pelaksanaan Putusan Arbirase: Nasional dan Internasional.

Prinsip-prinsip arbitrase dan hal-hal yang dapat di selesaikan melalui lembaga arbitrase yang disertai dengan penjelasan tentang studi kasus, selanjutnya antara lain juga diajarkan proses arbitrase, putusan arbitrase dan upaya hukum pembatalan dalam arbitrase dan permasalahannya.
●**Pengajar:** Miftahul Huda.

Hukum Perlindungan Konsumen (LWEL80216)

Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa pemahaman teori hukum perlindungan konsumen dan teori tanggungjawab produk, ketentuan normatif/ kerangka hukum perlindungan konsumen dan praktek (hukum) perlindungan konsumen dalam putusan-putusan pengadilan dan kehidupan sehari-hari. Untuk memperluas pengetahuan dan mempertajam daya analisis mahasiswa terhadap hukum perlindungan konsumen dan tanggungjawab produk, maka hal penting yang ditekankan dalam perkuliahan adalah pendekatan komparatif. Beberapa aspek yang akan dibahas antara lain kerangka hukum perlindungan konsumen; hukum perlindungan konsumen, teori pasar dan negara kesejahteraan; hak-hak konsumen; hak konsumen atas infromasi produk; perlindungan konsumen dan perdagangan bebas multilateral; struktur hukum perlindungan konsumen; lembaga atau institusi perlindungan konsumen; penyelesaian sengketa konsumen, hukum tanggung jawab produk; tanggung jawab pelaku usaha; dan asuransi tanggung jawab produk.

● **Pengajar:** Henny Marlyna, Inosentius Samsul.

Hukum dan Kehidupan Kenegaraan (HTN dan HAN)

Perbandingan Konstitusi (LWCL80201)

Dalam matakuliah ini akan diajarkan Perbandingan Konstitusi di beberapa negara yang mengatur tentang ketentuan system pemerintahan, susunan negara dan sistem hukum. Namun sebelumnya terlebih dahulu mahasiswa diajarkan tentang Perbandingan Hukum Tata Negara dalam rangka reorientasi studi Hukum Tata Negara umum yang meliputi: Perbandingan Hukum Tata Negara umum dan Hukum Tata Negara Positif, Perbandingan Hukum Tata Negara Modern dan Hukum Tata Negara adat (tradisi vs institusi hukum modern).

● **Pengajar:** Prof. Jimly Asshiddiqie, Fitra Arsil, Hamid Chalid.

Peradilan Konstitusi (LWCL80202)

Mata kuliah ini memberikan kepada mahasiswa kemampuan mengetahui, memahami dan membuka wawasan berkaitan dengan masalah-masalah hukum seputar berbagai persoalan yang berkembang dalam lingkup ketatanegaraan Indonesia, serta memberikan kemampuan mensintesa dan memecahkan masalah hukum yang muncul seputar permasalahann status hukum, fungsi, kedudukan dan peranan peradilan konstitusi dalam konstruksi hukum tata negara. Dengan pokok bahasan diantaranya:kedudukan dan kewenangan MK, Pengujian Undang-undang, Pembubaran partai politik, sengketa kewenangan lembaga negara, sengketa hasil pemilu, Impeacment Presiden dan/atau Wakil Presiden.

● **Pengajar:** Prof. Jimly Asshiddiqie, Fatmawati, Mustafa Fakhri.

Hak Asasi Manusia (LWCL80203)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai negara. Pembahasan difokuskan kepada aspekaspek teori dan filsafat, konstitusi, politik, sosial dan implementasi Hak Asasi Manusia.

Selain itu, juga dibahas mengenai hak dan kewajiban berbagai fihak dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di berbagai negara serta upaya hukum dan penyelesaian sengketa Hak Asasi Manusia, baik melalui peradilan Hak Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan lain-lain.

● **Pengajar:** Prof. Satya Arinanto.

Birokrasi dan Good Governance (LWCL80205)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai perspektif yang berkaitan

dengan pelaksanaan birokrasi dan *good governance* di berbagai negara. Pembahasan dimulai dengan sejarah dan perkembangan berbagai teori tentang birokrasi di berbagai negara kemudian dilanjutkan dengan berbagai permasalahan dan kasus-kasus yang terjadi pada pelaksanaan birokrasi di negara-negara tersebut. Pembahasan materi *Good Governance* dilakukan dengan melakukan kajian dan analisa terhadap prisnsi-prinsip *Good Governance* dan bagaimana implementasinya di pemerintahan pada saat ini, baik pada pemerintahan tingkat nasional, regional dan internasional.

●**Pengajar:** Andhika Danesjvara, Tri Hayati.

Hukum Pemerintahan Daerah (LWCL80204)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai aspek hukum, politik, sosial, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta praktek-prakteknya di berbagai negara. Pada saat ini, desentalisasi dan otonomi daerah merupakan keniscayaan di hampir seluruh negara serta selalu merupakan isu aktual, politis dan strategis pada pembahasan serta pembentukan dan pengelolaan sistem pemerintahan negara. Materi kuliah diawali dengan sejarah dan perkembangan teori desentralisasi serta implementassi otonomi daerah, baik pada masa lalu maupun masa kini dan prospeknya di masa depan.

●**Pengajar:** Andhika Danesjvara, Harsanto Nursadi.

Hukum Keuangan Publik (LWCL80205)

Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dan anggaran negara beserta ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan publik dan keuangan privat berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Selanjutnya juga dibahas tentang berbagai masalah kerugian negara dan keuangan daerah beserta ketentuan-ketentuan terkait.

●**Pengajar:** Dian Puji Nugraha Simatupang, Yuli Indrawati.

Teori dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan (LWCL80207)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di berbagai negara. Pembahasan difokuskan antara lain: Teori perundang-undangan; Aspek hukum dari perundang-undangan; Filosofi perundang-undangan; Hirarki perundang-undangan; Perancangan peraturan perundang-undangan, baik dari segi yuridis, teknis dan administrasi perundangundangan.

●**Pengajar:** Prof. Maria Farida Indrati, Fitriani Ahlan Sjarif.

Hukum Lingkungan (LWCL80208)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang aspek-aspek hukum dalam lingkungan hidup. Pembahasan mata kulih ini mencakup: Keterkaitan lingkungan hidup dengan cabang-cabang ilmu lainnya; Penyebab permasalahan lingkungan hidup; Prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan; Posisi hukum lingkungan dalam pembangunan politik hukum sumber daya lingkungan; Perangkat penataan pengelolaan lingkungan; Penegakan hukum lingkungan; Penyelesaian sengketa lingkungan dan kapita selekta.

● **Pengajar:** Bambang Prabowo Soedarso, Bono Budi Priambodo, Harsanto Nursadi, M. R. Andri Gunawan Wibisana.

Peradilan Administrasi Negara (LWCL80209)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan peradilan administrasi negara. Pembahasan difokuskan kepada: Beberapa pengertian dasar hukum administrasi; Asas-asas hukum administrasi yang melandasi hukum acara peradilan administrasi; Ruang lingkup kompetensi *absolute* peradilan administrasi; Upaya administrasi.

●**Pengajar:** Prof. Anna Erliyana, Andhika Danesjvara, Supandi.

Lembaga Negara (LWCL80211)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui,

memahami, dan membuka wawasan berkaitan dengan masalah-masalah hukum seputar berbagai persoalan yang berkembang dalam lingkup ketatanegaraan Indonesia, serta memberikan kemampuan mensintesa dan memecahkan permasalahan hukum yang muncul seputar permasalahan status hukum, fungsi hukum, kedudukan hukum dan peranan lembaga negara dalam konstruksi hukum tata negara.

●**Pengajar:** Prof. Jimly Asshiddiqie, Mustafa Fakhri, Wikrama Iryans Abidin.

Partai Politik dan Pemilihan Umum (LWCL80210)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum, partai politik dan perwujudan negara hukum. Secara detil mata kuliah ini memfokuskan pada tinjauan atas tujuan, asas dan sistem politik di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, akan dikemukakan subtansi terkait dengan Partai Politik di Indonesia, sejarah dan proses berdirinya Partai Politik sebagai Badan Hukum.

●**Pengajar:** Prof. Abdul Bari Azed, Fatmawati.

Sistem Hukum Indonesia (LWCL80212)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang keberlakuan berbagai sistem hukum di Indonesia. Dalam hal ini akan dibahas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keberlakuan sistem hukum dimaksud, yaitu Sistem Hukum Pidana, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan sistem hukum di atas akan dikaitkan dengan konstitusi, *rule of law*, globalisasi dan perencanaan pembangunan hukum.

●**Pengajar:** Prof. Satya Arinanto.

Hukum Administrasi Kepegawaian (LWCL80213)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang aspek hukum administrasi negara yang berkaitan dengan pengelolaan sektor kepegawaian negara. Pembahasan mata kuliah ini difokuskan antara lain meliputi: Kajian tentang konsep dasar Administrasi Negara dalam perspektif Pembinaan Aparatur Sipil Negara sebagai organ layanan terhadap masyarakat bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam menuju *Good Governance*; Prinsip Aparatur Sipil Negara dalam perannya sebagai pegawai harus jujur, tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya dan tidak terintervensi politik serta sebagai salah satu pelopor pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia; Prinsip Aparatur Sipil Negara yang harus selalu meningkatkan mutu kelembagaan dan mutu layanan, melalui penigkatan kompetensi, peningkatan professional pegawai, kualifikasi dalam perspektif dan melakukan evaluasi kinerja serta melakukan tindak lanjut pengembangannya secara berkesinambungan; Peran, wewenang, keseimbangan antara hak dan tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam melakukan layanan terhadap masyarakat; Peran dan fungsi serta keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai Lembaga Nonstruktural yang independen dalam memberikan masukan kepada Presiden dalam pelaksanaan pembinaan dengan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

●**Pengajar:** Tri Hayati.

Hukum Pajak (LWCL8021)

Dengan memperoleh mata kuliah hukum pajak, diharapkan mahasiswa: Memahami pajak, sebagai salah satu kewajiban terpenting yang harus ditaati oleh masyarakat termasuk Notaris/PPAT; Memahami pengertian/Filosofi pajak dan sebagian hukum positif pajak terkait dengan Notaris/PPAT sehingga juga memahami: Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan dan PPN; Tarif, Dasar Pengenaan Pajak dan Cara menghitungnya; Aspek Pajak terhadap profesi Notaris/PPAT, sehingga dapat memahami hak dan kewajiban Notaris/PPAT selaku Wajib Pajak PPH maupun PPN; Memperoleh manfaat lebih luas yang dapat mendukung pelayanan profesi Notaris/PPAT kepada masyarakat, karena mahasiswa memperoleh contoh-contoh praktis perhitungan pajak yang ada kaitan dengan profesi Notaris/PPAT.

Ruang lingkup materi yang diberikan mencakup: Pengantar Hukum Pajak, Pengertian Pajak,

Penerimaan Negara Bukan Pajak, Fungsi-fungsi Pajak, Penggolongan Pajak, Eksistensi Pajak, Resistensi terhadap pajak, Sistem Pengenaan; Ketentuan Umum dan Dasar hukum Tata Cara Perpajakan (KUP), Subjek Pajak/Wajib Pajak, SPT, Pembukuan, Pembayaran Pajak, Penetapan pajak, Hak-hak Wajib Pajak; Dasar hukum Pajak Penghasilan, Prinsip pengenaan, Subjek dan Wajib Pajak., Objek Pajak Penghasilan (PPh), Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh), Tarif Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) atas Badan Usaha, . Pajak Penghasilan (PPh) atas perorangan, Pajak Penghasilan (PPh) atas Karyawan; Pajak Pertambahan Nilai Dasar Hukum, Subjek/Wajib Pajak PPN, Obyek PPN, Dasar pengenaan pajak, Tarif Pajak dan cara penerapannya, Faktur Pajak, Cara menghitung PPN.

- **Pengajar:** Eka Sri Sunarti, Tjip Ismail.

Hukum Perdagangan Internasional

Peraturan Perundang-Undangan Perdagangan Dalam Negeri (LWIT80210)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai hubungan antara perdagangan dengan pertumbuhan ekonomi, serta hubungan antara perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Hal lain yang akan diberikan adalah pengenalan mengenai peraturan perdagangan dalam negeri, terkait dengan: Perlindungan Konsumen, Anti Monopoli, Standarisasi, Distribusi, serta perizinan dan Promosi Perdagangan.

- **Pengajar:** Arie Afriansyah, Pos M. Hutabarat.

Kerangka Hukum dan Kelembagaan WTO (LWIT80202)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Globalisasi dan sistem perdagangan dunia. Dalam hal ini, mahasiswa akan diberikan pemahaman antara lain tentang: Aturan-aturan Perdagangan Internasional (WTO) dan sumber-sumber Hukum WTO; Prinsip dan Aturan-Aturan Dasar WTO; Hukum WTO, Hukum Internasional dan Hukum Nasional; GATT dan WTO: Sejarah Perkembangan; Fungsi, Status Organisasi dan Mandat WTO; Sistim Pengambilan Keputusan, dan Sistem Penyelesaian Sengketa.

- **Pengajar:** Adijaya Yusuf, Adolf Warouw.

Persetujuan Perdagangan Regional dan Bilateral (LWIT80207)

Mata kuliah ini memberikan pengenalan dan pemahaman mengenai persetujuan perdagangan multinasional. Materi yang diberikan antara lain: *Voluntary Trade Agreements*, *Asia-Pacific Economic Cooperation*(APEC), *Asia Europe Meeting* (ASEM), *World Trade Organization System, Intra Regional Trade Agreements*, *Inter Regional Trade Agreements*, *Bilateral Trade Agreements*.

- **Pengajar:** Adolf Warouw, Damos Dumoli Agusman.

General Agreement On Tariffs and Trade 1994 (LW IT80203)

Mata kuliah ini memberikan pengertian berbagai perjanjian yang berkaitan dengan Tarif dan Perdagangan yang meliputi: *Agreement on Agriculture*; *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*; *Agreement on Textiles and Clothing*; *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tarriffs and Trade 1994* (*Antidumping*); *Agreement on implementation of Atictle VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (*Custom Valuation*); *Agreement on Preshipment Inspection*; *Agreement on Rules of Origin*; *Agreement on Import Licensing Procedures*; *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*; *Agreement on Safeguards*; *Doha Round and non-WTO/Singapore Issues*.

- **Pengajar:** Prof. Hikmahanto Juwana, Hadi Rahmat Purnama, Yu Un Oppusunggu.

Hukum dan Kebijakan Perdagangan Internasional (LW IT80201)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman

mengenai hubungan hukum ekonomi dan Perdagangan Internasional. Materi yang diberikan meliputi: *International Economic and Free Trading*; *Pro and Contra*; *Basic GATT Pillars*: *Exceptions, State Responsibility and Alien Protection Strategies*; *Doha Declaration and Agricutural Trade*; *Investor-State Arbitration*.

- **Pengajar:** Prof. Erman Rajagukguk, Yetty Komalasari Dewi.

Upaya–upaya Hukum di Bidang Perdagangan (LWIT80208)

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai studi kasus dalam perdagangan internasional, yang terdiri dari: *Anti dumping Cases; Providing the Elements of Dumping; Key Elements in Anti Dumping Cases; Initiating Anti Dumping Cases;Non-attributional Analysis; Causation between "Unfair/Dumping Import" and "Injury in Anti Dumping Measurement"; Legal and Procedural Issues in Anti Dumping Measurement; Subsidy Cases: Two Track of Relief under the Agreement on Sudsidies and Countervailing Measurement; Key Elements of Subsidy: Financial Contribution, Government or Public Body, Benefit, Specificity, Adverse Effects, Causal Link Specific Subsidy and Adverse Effects, Determination of Injury, Threat abd Material Retardation, Causal Link Between Injury abd Subsidized Imports, Safeguard Cases, Unforeseen Development and Increased in import, Serious Injury and Threat Thereof, Causation of Increased in Import and Serious injury or Threat Thereof, Non Attributional Analysis, Impact of Safeguard Measure on Relationships between Countries.*

- **Pengajar:** Hadi Rahmat Purnama**.**

Kontrak Perdagangan Internasional (LWIT80209)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai *Service Law*. Materi yang diberikan menyangkut: *General Agreement on Trade in Services (GATS) Essentially a framework agreement and a number of Annexes; Annex on Article II Exemptions; Annex on Movement of Natural Persons Supplying Service Under The Agreement; Annex on Air Transport Services; Annex on Financial Services; Second Annex on Financial Services; Annex on Negotiations on Maritime Transport Services; Annex on Telecommunications; Annex on Negotiations on Basic telecommunications; Schedules of Specific Commitments in the GATS (Art. XX. 3).*

- **Pengajar:** Lita Arijati, Yu Un Oppusunggu.

Hukum Terkait di Bidang Perdangan Internasional (LWIT80206)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman berbagai pengertian dalam Hak Kekayaan Intelektual di bidang hukum Perdagangan Internasional. Materi yang diberikan adalah sebagai berikut: Penyelesaian Sengketa Perdagangan *Copyright Law and Related Rights; Patent Law; Industrial Design and Integrated Circuit Law; Plant Varieties and Biotechnology Law; Trademark and Geographical Indication Law; Trade Secret Law; Licensing and Franchise Law.*

- **Pengajar:** Prof. A. Zen Umar Purba, Prof. Agus Sardjono.

Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional (LWIT80211)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional di dalam lembaga-lembaga internasional. Materi yang diberikan meliputi: *Dispute Settlement in WTO (Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes/DSU); Disputes Settlement in ICSID; Disputes Settlement in WPO; Disputes Settlement in ICC; Disputes Settlement in UNCITRAL; Disputes Settlement in Regional Forum; Electronic Arbitration; Internet Domain Name Dispute Settlemen.*

- **Pengajar:** Adijaya Yusuf, Hadi Rahmat Purnama.

Hukum Investasi dan Perdagangan Internasional (LWIT80205)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai hukum investasi dan perdagangan internasional. Materi yang diberikan dalam mata kuliah ini mencakup: *Principle of TRIM's; the New Indonesian Invesment Law; Protection of Foreign Invesment; Protection of National Interest; Current Issues in Indonesian Invesment Law.*

- **Pengajar:** Prof. A. Zen Umar Purba.

Perancangan Kontrak dan Peraturan Perundang-undangan (LWIT80212)

Mata kuliah ini memberikan pengertian dan pemahaman mengenai perancangan konstruksi dalam hukum perdagangan internasional. Materi yang diberikan dalam kuliah ini meliputi: *Legal Drafting Methodology; Legal and Non-Legal; Research in Legal Drafting; Legal Writing in legal Drafting; Legal Drafting in Regulatians; Legal Drafting in International Business Transaction Contract; Legal Drafting in (Multilateral, Regional, Bilateral) Trade Agreement.*

- **Pengajar:** Prof. Hikmahanto Juwana, Muhammad Sapta Murti.

Hukum tentang Perdagangan Jasa (LWIT80204)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang GATS terutama yang mencakup pengertian dan ruang lingkupnya antara lain: *safe guard, subsidies, market acces* dan *national treadment*.

Dalam mata kuliah ini juga di perkenalkan tentang antara lain *national treadment, transparacy, domestic regulation*, dan juga berbagai kasus tentang perjanjian perdagangan.

- **Pengajar:** Adolf Warouw, Yu Un Oppusunggu.

Hukum Ekonomi Islam

Ayat-Ayat dan Hadits Hukum (LWIE80205)

Mata kuliah ini membahas ketentuan-ketentuan hukum ekonomi Islam yang diatur dalam al Qur'an dan hadits dengan berpijak pada satu kesatuan kerangka ajaran dalam Islam (akidah, syariah, dan akhlak), posisinya dalam ketatanegaraan, dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Aturan tentang ekonomi dalam al Qur'an dan hadits adalah mengenai fungsi harta, etika kepemilikan harta, pembelanjaan harta, *gharar*, riba, maysir, perdagangan, investasi, hutang, zakat, dan sedekah. Ayat-ayat al Qur'an dan hadits tentang materi tersebut dibahas dengan kondisi riil tentang kemungkinan pembumiannya, penerapannya, dan pengaturannya.

- **Pengajar:** Prof. Akhmad Sukardja, Yenni Salma Barlinti.

Metode Penemuan Hukum Islam (LWIE80202)

Mata kuliah ini meliputi ushul fiqh dan metodologi penemuan hukum Islam yang terdiri dari: kaidah-kaidah usul-fiqh dan kaidah-kaidah fikih. Dalam mempelajari kaidah-kaidah ushuliyyah dipelajari pembagian kaidah, metode perolehan kaidah, dan obyek kaidah-kaidah ushuliyyah, kaidah yang berkenaaan dengan, amr dan nahi; mantuq dan mafhu. Dalam mata kuliah ini juga dipelajari pengertian hukum Islam, macam-macam hukum Islam, dan sumber hukum Islam. Dalam menemukan hukum Islam menggunakan kaidah-kaidah usul-fikih dan kaidah-kaidah fiqh, karena itu diperlukan metode berijtihad seperti istihsan, maslahah mursalah dan obyek maslahah mursalah, istishab, 'urf, masalah adz-dzari'ah, mazhab shahabi, istishab, syar'u man qablana dan maqashid syari'ah terdiri dari: dharuriyyah, hajjiyah dan tahsiniyyah. Selain itu dipelajari juga perbedaaan kaidah ushuliyyah dan kaidah fiqhiyyah, kegunaan kaidah ushuliyyah dan kaidah fiqhiyyah, dan 20 kaidah fiqh khusus bidang muamalah/Transaksi. Metode penerapan kaidah-kaidah fiqh dapat diketahui melalui penemuan hukum Islam dalam putusan peradilan yang bersumber kepada al-Quran dan al-hadis, maupun dalam putusan peradilan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 juncto Pasal 229 KHI, serta penerapan metode dan penemuan hukum Islam terhadap fakta yang terjadi dalam masyarakat yang diselesaikan di luar Pengadilan.

- **Pengajar:** Prof. Uswatun Hasanah, Gemala Dewi, Neng Djubaedah.

Hukum Kontrak dalam Islam (LWIE80206)

Mata kuliah Hukum Kontrak Dalam Islam ini menjelaskan tentang konsep; dasar hukum; asas; tujuan dan bentuk akad dalam ekonomi Syariah; Menganalisis perbandingan akad menurut Hukum Adat; Hukum Islam dan Hukum Barat di Indonesia;

Menjelaskan tentang kedudukan Hukum Perikatan Islam dalam Tata Hukum Indonesia; Menentukan bentuk akad yang akan digunakan dalam suatu transaksi ekonomi syariah serta menganalisis dan membuat kontrak tentang transaksi ekonomi syariah.

● **Pengajar:** Prof. Faturrahman Djamil, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN (LWIE80204)

Dalam mata kuliah ini akan fokus pada ketentuan-ketentuan akad yang diatur di dalam KHES dan Fatwa-fatwa DSN. Tidak adanya ketentuan akad–hukum perikatan berdasarkan ajaran Islam – dalam peraturan perundang-undangan menjadi latar belakang terbentuknya KHES dan terbitnya fatwa-fatwa oleh MUI-DSN, sementara sudah banyak pelaku kegiatan ekonomi Islam yang memerlukan ketentuan ini. Pembahasan KHES dilakukan terhadap Buku I tentang subyek hukum dan amwal, Buku II tentang akad, macam akad, dan ketentuan kegiatan ekonomi Islam, Buku III tentang zakat dan hibah, dan Buku IV tentang akuntansi syariah. Pembahasan fatwa-fatwa DSN dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan macam akad dan kegiatan ekonomi Islam yang diatur secara khusus di dalam setiap fatwa. Perbandingan ketentuan akad-akad di keduanya akan dikaji dalam hal substansinya, pengaruhnya terhadap praktik dan kasus-kasus ekonomi Islam yang terjadi, dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia.

● **Pengajar:** Prof. Uswatun Hasanah, Yeni Salma Barlinti.

Hukum Zakat dan Wakaf (LWIE80210)

Mata kuliah ini menjelaskan tentang Zakat dan Wakaf. Zakat dan Wakaf merupakan salah satu nilai dalam Hukum Ekonomi Islam. Oleh karena itu sebelumnya akan dijelaskan tentang Hukum Ekonomi Islam. Dalam mata kuliah ini akan dijelaskan tentang sumber, dasar filosofis, nilai dasar dan nilai instrumental, prinsip-prinsip serta faktor-faktor ekonomi Islam. Setelah memahami tentang Hukum Ekonomi Islam baru dijelaskan tentang zakat dan wakaf. Mahasiswa akan diajak untuk memahami hukum dan posisi zakat dalam syariat Islam berikut perkembangannya dalam fiqh klasik maupun fiqh kontemporer, hubungan zakat dengan pajak, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Mahasiswa juga akan dijelaskan tentang pengaturan dan pengelolaan zakat di Indonesia serta Negara-negara Islam lainnya. Mahasiswa akan diajak untuk mengkritisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Mengenai wakaf akan dijelaskan tentang pengertian, sumber hukum, macam wakaf, dan manfaat wakaf baik menurut syariat Islam maupun peraturan wakaf di Indonesia. Akan dijelaskan juga tentang pentingnya wakaf untuk pengembangan ekonomi umat dan cara pengelolaan wakaf di Indonesia dan Negara Islam lainnya. Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami tentang zakat dan wakaf dan menyadari pentingnya zakat dan wakaf untuk mengentaskan kemiskinan dan perkembangan ekonomi rakyat.

● **Pengajar:** Prof. Uswatun Hasanah, Heru Susetyo, Farida Prihartini.

Aspek Hukum Ekonomi Islam (LWIE80203)

Mata kuliah Aspek Hukum Ekonomi Islam ini menjelaskan tentang Aspek hukum ekonomi menurut Islam: Filosofi; Karakteristik; Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Islam; Sejarah Perkembangan dan Prinsip-Prinsip Hukum Muamalah; Kedudukan Harta dan Konsep Kepemilikan serta Permasalahannya dan Aspek Hukum Perdagangan Dalam Islam; bentuk-bentuk Lembaga Ekonomi Islam di Indonesia; serta Perkembangan dan Prospek Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.

● **Pengajar:** Prof. Faturrahman Djamil, Gemala Dewi, Wirdyaningsih.

Filsafat Hukum Islam (LWIE80201)

Mata kuliah ini membahas hukum Islam yang diatur dalam al Qur'an dan hadis secara filosofis. Pembahasan falsafah tentang hukum Islam dikaitkan pada permasalahan hukum yang terjadi dalam

perkembangan masyarakat sebagai perubahan sosial dengan mengkaji konsep hukum dalam Islam, tujuan hukum Islam, dan metode penetapan hukum Islam. Materi-materi yang dipelajari adalah memahami hakikat filsafat hukum Islam;objek kajian dan kegunaan filsafat hukum Islam;pertumbuhan dan perkembangan filsafat hukum Islam;ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama; hukum Islam antara wahyu Tuhan dan pemikiran manusia; beberapa prinsip dan kaidah hukum Islam; sumber dan metode penetapan hukum dalam Islam; aliran dalam hukum Islam; teori maqasid al syariah; hubungan antara maqasid al syariah dengan metode penetapan hukum; hubungan antara hukum dengan moral dalam Islam; dan hukum Islam dan perubahan sosial.

- **Pengajar:** Prof. Faturrahman Djamil, Neng Djubaedah, Yeni Salma Barlinti.

Hukum Perbankan Islam (LWIE80207)

Mata kuliah ini mempelajari tentang Pengenalan perbankan syariah, yang pada sesi ini mahasiswa diajak untuk mengenal dan mempelajari tentang sejarah perkembangan Bank Syariah di Indonesia maupun di dunia Internasional, tentang bank syariah pertama serta perbedaan bank syariah dari bank konvensional; kemudian tentang Kelembagaan Perbankan Syariah yang meliputi bentuk usaha, pendirian, akuisisi, merger, konsolidasi dan spin off dalam usaha bank syariah; Operasional perbankan syariah baik dari sisi penghimpunan dana, penyaluran dana maupun dari jasa-jasa perbankan lainnya; Perlindungan nasabah bank syariah baik langsung maupun tidak langsung baik melalui KUH Perdata, perlindungan khusus dan ketentuan pidana; Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah; Kerahasiaan bank dalam perbankan syariah dan Tindak Pidana Perbankan Syariah; Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah baik melalui mediasi dan PPS lainnya, Peradilan Agama maupun Basyarnas; terakhir ditutup dengan isu-isu terkini (*current issues*) yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia maupun di dunia internasional.

- **Pengajar:** Gemala Dewi, Rifki Ismal, Yunus Husein.

Hukum Lembaga Keuangan Islam Non Bank (LWIE80208)

Pada mata kuliah ini akan dipelajari hukum yang berlaku pada lembaga-lembaga keuangan Islam non-bank. Lembaga keuangan Islam non-bank adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi Islam selain bank, seperti pasar modal, asuransi, perusahaan pembiayaan, gadai, koperasi, dan lembaga kegiatan ekonomi makro. Pembahasan akan fokus pada mekanisme operasional kegiatan dan ketentuan kelembagaannya pada masing-masing lembaga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kajian terhadap dua hal tersebut akan dilakukan juga dari perspektif hukum Islam. Lembaga pengawas kegiatan lembaga-lembaga tersebut, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga pemerintah lainnya yang berwenang, memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatannya. Peran ini akan dikaji dengan lembaga hisbah yang terjadi pada masa kekhalifahan.

- **Pengajar:** Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti, Wirdyaningsih.

Peradilan Agama dan Arbitrase Syariah (LWIE80209)

Mata kuliah ini menjelaskan dasar-dasar hukum penyelesaian sengketa transaksi ekonomi syariah melalui Peradilan Agama dan Basyarnas; prosedur dan mekanisme Penyelesaian sengketa transaksi ekonomi syariah melalui Peradilan Agama dan Basyarnas; membandingkankan kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan Penyelesaian sengketa transaksi ekonomi syariah melalui Peradilan Agama dan Basyarnas; menjelaskan prosedur dan mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dan Basyarnas atas sengketa transaksi ekonomi syariah; menjelaskan upaya hukum terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dan Basyarnas atas sengketa transaksi ekonomi syariah; menganalisis putusan Pengadilan Agama dan Basyaranas atas sengketa transaksi ekonomi syariah.

- **Pengajar:** Miftahul Huda, Neng Djubaedah, Wirdyaningsih.

Mata kuliah Seminar Usulan Penelitian Tesis berisi rangkaian perkuliahan dalam bentuk seminar (*student centered learning*) berupa pengarahan bagi mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk membuat tesis, berupa tahapan-tahapan penulisan proposal tesis sejak pembuatan strategi perencanaan penelitian "Research Design" hingga penuangannyadalam proposal tesis. Tahapan tersebut berupa: penentuan topik bahasan, perencanaan judul serta perumusan permasalahan (problem) penelitian, tujuan penulisan maupun asumsi penelitian. Sesuai dengan karakteristik penelitian yang diambil mahasiswa akan diarahkan untuk membuat kerangka konsep dan penentuan teori-teori yang dapat digunakan. Kemudian akan diarahkan untuk menentukan metode penelitianyang tepat dan sistematika penulisan. Terakhir akan diarahkan juga cara penulisan daftar referensi yang sesuai dengan karakteristik penelitian. Dalam mata kuliah ini masing-masing mahasiswa akan mempresentasikan rencana penulisan tesisnya masing-masing hingga berbentuk suatu proposal penelitian tesis yang lengkap.

Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Sejarah dan Perbandingan Hukum Pidana (LWCJ80206)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang perkembangan hukum pidana di Indonesia, sementara perbandingan hukum pidananya mengetengahkan perbedaan dan persamaan diantara berbagai sistem hukum serta keterangan atau penjelasan atau persamaan dan perbedaan antar berbagai sistem hukum yang digunakan serta mengkaji adanya asas-asas umum yang didapat dengan cara membandingkan. Dalam kuliah ini akan dibahas mulai dari: Pengertian perbandingan hukum serta hubungannya dengan disiplin lain; Keluarga hukum (*continentallaw, common law, Islamiclaw*); Sistem peradilan pidana; Perbandingan hukum dengan topik-topik tertentu (tindak pidana, kesalahan, sanksi pidana, dasar penghapus pidana, percobaan tindak pidana, penyertaan, gabungan tindak pidana); Beberapa masalah pidana yang aktual (misalnya tindak pidana korupsi).

- **Pengajar:** Prof. Topo Santoso.

Sistem Peradilan Pidana (LWCJ80202)

Mata kuliah ini bertujuan membahas berbagai aspek tentang Sistem Peradilan Pidana, baik umum maupun Indonesia. Pendekatan akan dilakukan melalui sosiologi hukum dan kriminologi. Melalui perkuliahaan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu Sistem Peradilan Pidana yang menghormati hak-hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana maupun Korban. Dan khususnya permasalahan sistem peradilan pidana Indonesia.

- **Pengajar:** Prof. Mardjono Reksodiputro, Prof. Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Surastini Fitriasih.

Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian (LWCJ80204)

Mata kuliah ini merupakan bagian dari hukum pidana yang memfokuskan diri untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang tindak pidana korporasi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan, serta tindak pidana kebanksentralan di Indonesia.

- **Pengajar:** Prof. Topo Santoso.

Kriminologi (LWCJ80203)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang teori kriminologi, sejarah perkembangan, definisi kejahatan, juga

dijelaskan dengan penjelasan-penjelasan tentang keanekaragaman sub budaya yang mempengaruhi tindakan criminal. Disamping itu juga diajarkan tentang teori-teori pengendalian sosial (*social control theory* dan jenis-jenisnya yang disertai dengan contoh-contoh, serta *labeling*).

● **Pengajar:** Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Eva Achjani Zulfa.

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan HAM (LWCJ80205)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai Kebijakan Kriminal, Perkembangan Kebijakan Kriminal dan Kaitannya dengan *Principles Clear and Present Danger*, Perkembangan dan Permasalahan Kebijakan Regulasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Kebijakan Remisi, Permasalahan Hak Asasi Manusia, Permasalahan Remisi dan Disparitas Pidana, serta Perkembangan penanggulangan Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya membahas mengenai kerangka kebijakan formal tentang hukum pidana: permasalahan *administrative penal law* disertai dengan pendekatan metode terhadap kebijakan kriminal.

● **Pengajar:** Prof. Indriyanto Seno Adji.

Hukum Pidana dan Tindak Pidana Korupsi (LWCJ80207)

Mata kuliah ini membahas beberapa materi diantaranya: Latar belakang dan sejarah Tindak Pidana Korupsi, Akibat Tindak Pidana Korupsi bagi masyarakat dan negara, Tindak Pidana Korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Subjek hukum Tindak Pidana Korupsi, Sifat melawan hukum dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Delik-delik tindak pidana korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang, Delik-delik Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari KUHP, Delik lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, Sistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi: a. penuntutan b. pemeriksaan di pengadilan, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC); ratifikasi dan implikasinya, Perlindungan saksi dan korban dalam Tindak Pidana korupsi. Serta membahas tentang lingkup pidana terkait dengan asas-asas legalitas dan makna dari dua jenis anologi, mencakup didalamnya adalah delik berkualitifikasi, delik *berprivelige dandelik* korupsi.

● **Pengajar:** Prof. Andi Hamzah.

Perkembangan Teori–Teori Hukum Pidana (LWCJ80201)

Mata kuliah ini memberikan gambaran perkembangan beberapa teori dan asas hukum pidana, sehubungan dengan tiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu perbuatan, pertanggungjawaban dan pidana. Dalam perkuliahan, pembahasan akan dimulai dengan perkembangan asas legalitas sebagai dasar penentuan suatu tindak pidana. Selanjutnya didiskusikan perkembangan masalah pertanggung jawaban pidana, yang akan berawal dari asas tiada pidana tanpa kesalahan, dan perkembangannya yang meliputi konsep *strict liability*, *corporate liability* sampai dengan *vicarious liability* serta *command responsibility*. Dalam materi tentang pidana, khususnya perkembangan teori-teori pemidanaan juga akan dibahas pemikiran yang menghendaki dihapuskannya pidana, bahkan sistem peradilan pidana.

● **Pengajar:** Nathalina, Surastini Fitriasih, Theodora Yuni Syahputri.

Aspek Pidana dalam Hukum Lingkungan (LWCJ80212)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang penegakan hukum lingkungan yang merupakan mata rantai siklus perundang-undangan, yang dimulai dengan perundang-undangan (legislation), penentuan standar (standard setting), pemberian ijin (lecinsing), penerapan (implementation) dan berakhir penegakan hukum (law enforcement).

● **Pengajar:** Bambang Prabowo Soedarso, Bono Budi Priambodo, Harsanto Nursadi, M. R. Andri Gunawan Wibisana.

Birokrasi dan Good Governance (LWCJ80208)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada

mahasiswa tentang berbagai perspektif yang berkaitan dengan pelaksanaan birokrasi dan *good governance* di berbagai negara. Pembahasan dimulai dengan sejarah dan perkembangan berbagai teori tentang birokrasi di berbagai negara kemudian dilanjutkan dengan berbagai permasalahan dan kasus-kasus yang terjadi pada pelaksanaan birokrasi di negara-negara tersebut. Pembahasan materi *Good Governance* dilakukan dengan melakukan kajian dan analisa terhadap prisnsi-prinsip *Good Governance* dan bagaimana implementasinya di pemerintahan pada saat ini, baik pada pemerintahan tingkat nasional, regional dan internasional.

- **Pengajar:** Andhika Danesjvara, Tri Hayati.

Hukum Pajak (LWCJ80210)

Dengan memperoleh mata kuliah hukum pajak, diharapkan mahasiswa dapat memahami pajak, sebagai salah satu kewajiban terpenting yang harus ditaati oleh masyarakat termasuk Notaris/PPAT, pengertian/Filosofi pajak dan sebagian hukum positif pajak terkait dengan Notaris/PPAT.

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang: Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan dan PPN, Tarif, Dasar Pengenaan Pajak dan cara menghitungnya, Aspek Pajak terhadap profesi Notaris/PPAT, sehingga dapat memahami hak dan kewajiban Notaris/PPAT selaku Wajib Pajak PPH maupun PPN, serta memperoleh manfaat lebih luas yang dapat mendukung pelayanan profesi Notaris/PPAT Kepada masyarakat, karena mahasiswa memperoleh contoh-contoh praktis perhitungan pajak yang ada kaitan dengan profesi Notaris/PPAT.

Ruang lingkup materi yang diberikan mencakup: Pengantar Hukum Pajak, Pengertian Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Fungsi-fungsi Pajak, Penggolongan Pajak, Eksistensi Pajak, Resistensi terhadap pajak, Sistem Pengenaan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Dasar hukum, Subjek Pajak/Wajib Pajak, SPT, Pembukuan, Pembayaran Pajak, Penetapan pajak, Hak-hak Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Dasar hukum, Prinsip pengenaan, Subjek dan Wajib Pajak, Objek PPH, Dasar Pengenaan PPH, Tarif, Pajak PPH atas Badan Usaha, PPH. Atas perorangan, PPH atas Karyawan, Pajak Pertambahan Nilai Dasar Hukum, Subjek/WP PPN, Obyek PPN, Dasar pengenaan pajak, Tarif dan cara penerapannya, Faktur Pajak, Cara menghitung PPN.

- **Pengajar:** Eka Sri Sunarti, Tjip Ismail.

Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan (LWCJ80211)

Dalam perkuliahan ini akan dilakukan pembahasan, diskusi dan disertai dangan analisis kasus-kasus perbankan yang aktual yang meliputi: Sistem Keuangan dan Sistem Perbankan di Indonesia, Liberalisasi Perbankan, Perbankan Syariah (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah & Kantor Layanan Syariah; Aspek Hukum Kelembagaan & Usaha Perbankan Syariah), Fungsi dan Peranan Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah serta KYC, Sumber Dana Perbankan, Perlindungan Dana Nasabah, Fungsi dan Peran LPS dalam Sistem Perbankan, Perkreditan dan Pengikatan Jaminan, Kredit Sindikasi, Jasa-Jasa Pelayanan Perbankan, Transaksi Perdagangan Internasional dan Domsetik, Kerahasiaan dalam kegiatan Perbankan (Rahasia Bank, RahasiaPerusahaan, Rahasia Dagang), Tindak Pidana di bidang Perbankan dan Pencucian Uang (*Money Laundering*) serta Bank gagal, likuidasi bank dan system penjaminan nasabah penyimpan.

- **Pengajar:** Yunus Husein, Zulkarnain Sitompul.

Hukum Keuangan Publik (LWCJ80213)

Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dan anggaran negara beserta ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan publik dan keuangan privat berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Selanjutnya juga dibahas tentang berbagai masalah kerugian negara dan keuangan daerah beserta ketentuan-ketentuan terkait.

- **Pengajar:** Dian Puji Nugraha Simatupang, Yuli Indrawati

Hukum Perlindungan Konsumen (LWCJ80214)

Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa pemahaman teori hukum perlindungan konsumen dan teori tanggungjawab produk, ketentuan normatif/ kerangka hukum perlindungan konsumen dan praktek (hukum) perlindungan konsumen dalam putusan-putusan pengadilan dan kehidupan sehari-hari. Untuk memperluas pengetahuan dan mempertajam daya analisis mahasiswa terhadap hukum perlindungan konsumen dan tanggungjawab produk, maka hal penting yang ditekankan dalam perkuliahan adalah pendekatan komparatif. Beberapa aspek yang akan dibahas antara lain kerangka hukum perlindungan konsumen; hukum perlindungan konsumen, teori pasar dan negara kesejahteraan; hak-hak konsumen; hak konsumen atas infromasi produk; perlindungan konsumen dan perdagangan bebas multilateral; struktur hukum perlindungan konsumen; lembaga atau institusi perlindungan konsumen; penyelesaian sengketa konsumen, hukum tanggung jawab produk; tanggung jawab pelaku usaha; dan asuransi tanggung jawab produk.

● **Pengajar:** Henny Marlyna, Inosentius Samsul.

Hukum Transnasional

Hukum Perdagangan Multilateral dan Regional (LWTN8020)

Mata kuliah ini Membahas teori-teori perdagangan dan peranan organisasiinternasional dalam perdagangan internasional, seperti *World Trade Organization* (WTO), ASEAN Free Trade Area **(**AFTA), *North American Free Trade Agreement (*NAFTA*)*, EU, Mercosur. Sumber hukum dan masalah aktual dalam perdagangan multilateral dan regional.

●**Pengajar:** Hadi Rahmat Purnama, Yu Un Oppusunggu**.**

Hukum Tentang Kebijakan Lingkungan Internasional (LWTN8020)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman-pemahaman tentang Peranan Hukum Lingkungan dalam Pembangunan. Untuk menjelaskan hal tersebut, maka akan dikemukakan juga prinsip-prinsip hukum lingkungan Internasional, subyek dan hukum lingkungan, hak dan kewajiban negara dalam hukum lingkungan Internasional, serta Sumber Hukum Lingkungan. Dalam konteks Indonesia, akan disampaikan juga substansi tentang Peranan negara dalam melindungi lingkungan, Penegakan, Penataan dan Penyelesaian sengketa. Mengenai hal tersebut, akan disampaikan juga kebijakan-kebijakan negara terkait dengan perlindungan: lingkungan sumberdaya laut, Lingkungan udara dan atmosfir. Mahasiswa juga akan diberikan pemahaman terkait dengan masalah-masalah aktual Hukum Lingkungan Internasional terkait Indonesia.

●**Pengajar:** Prof. Melda Kamil Ariadno, M. R. Andri Gunawan Wibisana.

Hukum Transnasional Pemanfaatan Udara dan Angkasa (LWTN8020)

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang pemanfaatan udara/angkasa dan juga memberikan penjelasan tentang konvensi-konvensi yang terkait dengan pemanfaatan udara/angkasa seperti *Tokyo convention*, *captown convention* dan juga pemahaman tentang *space treaties*. dan *commercialization of outer space*.

●**Pengajar:** Prof. Hikmahanto Juwana, Hadi Rahmat Purnama, Tiurma Mangihut Pitta Allagan.

Hukum Transnasional Pemanfaatan Laut (LWTN8020)

Mata Kuliah ini lebih memfokuskan diri pada pemahaman tentang kedaulatan perairan, pedalaman laut territorial, *archipelago water*, *High Seas* dan Zon Ekonomi Ekslusif (ZEE). Di samping itu kepada mahasiswa juga akan diberikan pemahaman terhadap peraturan-peraturan Internasional dan implementasinya di Indonesia.

●**Pengajar:** Prof. Melda Kamil Ariadno, Adijaya Yusuf, Arie Afriansyah.

Penyelesaian Sengketa Internasional (LWTN8020)

Mata kuliah ini membahas tentang bentuk dan cara-cara penyelesaian sengketa Internasional seperti: Mediasi, arbitrase dan litigasi; Perjanjian-perjanjian arbitrase; Hukum acara yang berlaku; pengakuan dan pelaksanaan keputusan; Pengadilan asing dan arbitrase asing; Pembahasan konvensi-konvensi Internasional dan Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa internasional (ICC, UNCITRAL, *Arbitration Rules*).

●**Pengajar:** Adijaya Yusuf, Lita Arijati.

Perjanjian Internasional dan Kontrak Internasional (LWTN8020)

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, ketrampilan dan teknik-teknik praktis dalam menyusun kontrak dagang internasional.

●**Pengajar:** Prof. Melda Kamil Ariadno, Mutiara Hikmah.

Negosiasi Internasional (LWTN8020)

Mata kuliah ini akan memberikan antara lain pengetahuan tentang prinsip-prinsip perundingan internasional, teknik-teknik perundingan internasional, seperti pendekatan yang bersifat *problem-solving* serta pengetahuan tentang aspek-aspek budaya dan lintas-kultural yang penting untuk diketahui. Topik yang akan diberikan, antara lain terkait dengan Negosiasi dan Diplomasi Internasional, Teori Negosiasi, Konsep, serta Proses Negosiasi, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam negosiasi, seperti: Strategi, *Skill* dan Alat dalam Definisi dan Pendekatan-Pendekatan dalam Negosiasi.

●**Pengajar:** Adolf Warouw.

Yurisdiksi dan Kewilayahan (LWTN8020)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang masalah-masalah teoritis yang relevan dengan yurisdiksi: yurisdiksi laut, yurisdiksi darat, yurisdiksi ruang udara dan ruang angkasa, yurisdiksi universal dan regional, yurisdiksi bilateral dan yurisdiksi negara. Selain itu mahasiswa juga akan diberikan pemahaman tentang unilateralisme, immunitas atas yurisdiksi. Mata kuliah ini pada akhirnya akan memberikan kepada mahasiswa tentang hal-hal di atas yang dikaitkan dengan kasus pidana seperti narkoba, *human trafficking*, pembajakan dan *Haze Pollution* berdasarkan asas nasionalitas aktif.

●**Pengajar:** Adijaya Yusuf.

Penanaman Modal Asing dan Peminjaman Internasional (LWTN8021)

Mata Kuliah ini mengajarkan tentang lembaga-lembaga pendukung peminjaman internasional. Dengan penjelasan lebih lanjut seperti transaksi derivatif, *international bank landing* dan juga restrukturisasi pinjaman. Mahasiswa juga diberikan pemahaman tentang Undang-Undang Penanaman Modal Asing sebagai dasar hukum dari Penanaman Modal Asing dan Peminjaman Internasional.

●**Pengajar:** Prof. A. Zen Umar Purba, Zulkarnain Sitompul.

Transaksi Bisnis Internasional (LWTN8021)

Dalam mata kuliah ini akan dibahas berbagai prinsip dan teori lanjut menyangkut aspek-aspek hukum dari transaksi bisnis lintas negara. Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami beberapa prinsip serta cara penyelesaian permasalahan dalam transaksi bisnis internasional dari sudut hukum.

●**Pengajar:** Prof. A, . Zen Umar Purba, Lita Arijati.

Hukum Jual Beli Internasional (LWTN802)

Mata kuliah ini mefokuskan diri pada studi tentang hukum jual beli internasional dengan unsur-unsurnya seperti subjek dalam jual beli internasional, pilihan hukum dalam kontrak jual beli internasional, pilihan forum arbitrase dalam kontrak jual beli internasional serta pelaksanaan keputusan arbitrase internasional. Mahasiswa dalam hal ini akan juga diberikan pemahaman tentang bebrapa hal terkait dengan kontrak-kontrak jual beli internasional, seperti: Unsur

yang menyebabkan suatu perjanjian jual beli dalam jual beli internasional, Hal yang menentukan hukum yang berlaku bagi perjanjian jual beli inetrnasional, dan konvensi Jual Beli Internasional. Terakhir, mahasiswa juga akan diberikan pemahaman terkait dengan forum serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.

●**Pengajar:** Prof. Zulfa Djoko Basuki, Mutiara Hikmah, Yu Un Oppusunggu.

Organisasi Perdagangan Internasional (LWTN8020)

Mata kuliah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang globalisasi ekonomi yang diwujudkan dengan adanya organisasi WTO termasuk didalamnya penyelesaian

sengketa pada WTO selain itu diajarkan juga teori tentang *trade liberation vs other social values interest.*

●**Pengajar:** Adijaya Yusuf.

Hukum Kekayaan Intelektual

Hukum Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait (LWIP80203)

Nilai ekonomi dari sektor ekonomi kreatif sangat besar. Karenanya telah banyak negara yang menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor andalan untuk perekonomian nasionalnya. Beberapa contoh produk pada sektor ekonomi kreatif antara lain film, lagu/musik, program komputer, buku, foto, lukisan/gambar desain grafis, animasi, game elektronik, koreografi, dan lain sebagainya. Pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif sangat membutuhkan perlindungan hukum hak cipta. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan dibimbing untuk memahami filosofi dan sejarah lahirnya hukum hak cipta, perkembangan internasionalisasinya sebelum dan sesudah Berne Convention, serta teori dan doktrin yang berkaitan dengan substansi pengaturannya. Mahasiswa akan dibimbing untuk memahami aturan di antaranya mengenai *automatic protection*, syarat orisinalitas, dikotomi ide dan ekspresi, perbedaan hak ekonomi dengan hak moral, perbedaan hak cipta dengan hak terkait, perbedaan pengalihan hak cipta dengan lisensi, perbedaan pelanggaran hak cipta dengan pembajakan, serta penerapan pembatasan atau pengecualian hak cipta. Mahasiswa juga didorong untuk mencermati perkembangan yang terjadi dalam lingkup perekonomian digital terutama terkait aspek sarana kontrol teknologi dan tanggungjawab penyedia layanan siber.

●**Pengajar:** Prof. Agus Sardjono, Brian Amy Prasetyo, Edmon Makarim.

Hukum Paten dan Rahasia Dagang (LWIP80201)

Paten merupakan istilah dalam lingkup hak kekayaan intelektual yang paling sering disalahpahami atau digunakan secara salah oleh masyarakat awam. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan dibimbing untuk memahami hukum paten sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu bahwa paten hanya digunakan dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual untuk suatu invensi di bidang teknologi. Mahasiswa akan dibimbing untuk memahami antara lain perbedaan paten dengan paten sederhana, penjelasan mengenai syarat-syarat untuk memperoleh perlindungan paten, perbedaan phase internasional dan phase nasional dalam konteks pendaftaran paten melalui sistem PCT, perbedaan antara invensi yang tidak dapat dipatenkan dengan hal-hal yang dianggap bukan invensi, penerapan paten dalam lingkup kesehatan publik khususnya berkaitan dengan *bolar provision* dan *data exclusivity*, perbedaan antara lisensi wajib dan pelaksanaan paten oleh pemerintah, penjelasan mengenai *drafting* deskripsi paten, serta pelanggaran paten.

●**Pengajar:** Brian Amy Prasetyo, Cita Citrawinda.

Hukum Perlindungan Varietas Tanaman (LWIP80205)

Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahaiswa untuk memahami hukum tentang perlindungan bagi para pembenih (*breeder's right*) atas hasil penemuan mereka tentang varietas-varietas tanaman yang baru. Mata kuliah ini juga membahas beberapa materi

meliputi: Pengertian dasar pemuliaan tanaman (plant breeding) dan pengembangan bioteknologi; Pengertian dasar sistem perlindungan varietas tanaman; Pengertian dasar sistem perlindungan varietas tanaman; Ruang lingkup perlindungan (*subject matter of protection*); Persyaratan untuk mendapatkan perlindungan (baru, unik, seragam, stabil); Prosedur untuk mendapatkan perlindungan hak; Substansi hak yang dilindungi.

● **Pengajar:** Prof. Agus Sardjono, Ranggalawe Suryasaladin.

Hukum Merek dan Indikasi Geografis (LWIP80202)

Mengajarkan kepada mahasiswa untuk memahami berbagai aspek hukum dari merek termasuk indikasi geografis. Beberapa aspek yang dibahas antara lain sejarah hukum merek; konvensi internasional mengenai merek; pendaftaran merek; perlindungan merek terkenal, tradedress dan persaingan usaha tidak sehat; penyelesaian sengketa di bidang merek; sejarah perlindungan indikasi geograsi ; konvensi internasional di bidang indikasi geografis; dan perlindungan indikasi geografis di Indonesia

● **Pengajar:** Henny Marlyna, Freddy Harris.

Hukum Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (LWIP80204)

Dalam lingkup bisnis komersial, produk yang mengandalkan keunggulannya pada aspek visual atau tampilannya sangatlah banyak. Persaingan antara sesama produsen seringkali melahirkan praktik peniruan atau pembajakan, sehingga perlindungan hukum desain industri sangatlah penting. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan dibimbing untuk memahami antara lain konsepsi perlindungan hukum desain industri, perbedaan antara *aesthetic design* dengan *technical design,* perbedaan antara *registered design* dengan *unregistered design,* perbedaan antara desain industri dengan karya seni terapan yang dilindungi oleh hak cipta, perbedaan antara desain industri dengan tanda ornamental dalam konteks hak merek, doktrin *degree of freedom of designer,* prosedur pendaftaran hak desain industri, serta pelanggaran hak desain industri. Dalam lingkup hukum hak desain tata letak sirkuit terpadu, mahasiswa akan dibimbing untuk memahami diantaranya obyek yang dilindungi, kasus-kasus sengketa pelanggaran hak, dan prosedur perlindungan hak desain tata letak sirkuit terpadu.

● **Pengajar:** Prof. Agus Sardjono, Brian Amy Prasetyo, Edmon Makarim.

Litigasi HKI dan Penyelesaian Sengketa (LWIP80208)

Mengajarkan kepada mahasiswa untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus HKI, baik melalui peradilan umum maupun melalui alternatif. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

● **Pengajar:** Edmon Makarim, Ranggalawe Suryasaladin, Parulian Paidi Aritonang.

Valuasi dan Manajemen HKI (LWIP80210)

Mengajarkan kepada mahasiswa tentang bagaimana mengelola HKI sebagai faktor yang penting dalam industri dan perdagangan, termasuk pula bagaimana melakuan valuasi terhadap HKI. Beberapa aspek yang dibahas antara lain membangun portofolio HKI, HKI dalam siklus pertumbuhan perusahaan; model-model pendapatan; kepemilikan HKI, negosiasi kontrak terkait HKI; penegakan hukum bidang HKI; HKI sebagai aset; dan metode valuasi HKI.

● **Pengajar:** Henny Marlyna, Parulian Paidi Aritonang.

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (LWIP80209)

Mengajarkan kepada mahasiswa untuk memahami berbagai aspek hukum yang terkait dengan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, khususnya menyangkut dimensi HKI dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

● **Pengajar:** Prof. Agus Sardjono, Edmon Makarim.

HKI dan Persaingan Usaha (LWIP80207)

Mengajarkan kepada mahasiswa tentang bagaimana memanfaatkan HKI dalam rangka persaingan usaha yang sehat. Mata kuliah ini

membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual dari sisi persaingan usaha; perjanjian aspek-aspek dagang dari HAKI (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau TRIPS); bentuk-bentuk penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha; Penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual secara umum; Penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual secara khusus.

●**Pengajar:** Ditha Wiradiputra, Kurnia Toha, Teddy Anggoro.

Alih Teknologi dan Telematika (LWIP80206)

Pada era teknologi informasi dan komunikasi saat ini, keterhubungan ke ekosistem siber dan perangkat elektronik tampaknya telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat terutama di perkotaan. Beranjak dari situasi dan kondisi tersebut lahirlah beragam aktifitas sosial, baik yang baru dikenal ataupun yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari aktifitas yang telah ada sebelumnya. Pada tahap awalnya, ada yang berpandangan bahwa hukum tidak ada atau tidak berlaku di dunia siber. Tetapi pandangan tersebut terbukti salah, karena hukum selalu berlaku terhadap manusia, termasuk ketika melakukan aktifitas di dunia siber. Aturan-aturan hukum yang baru maupun yang merupakan reinterpretasi terhadap aturan yang lama telah banyak terjadi, sehingga sangatlah rugi jika seorang magister hukum tidak memahami aspek hukum di bidang ini. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan dibimbing untuk memahami antara lain konsekuensi hukum dari konvergensi telematika, tanggungjawab hukum penyelenggara sistem elektronik dan penggunanya, aneka macam dampak hukum dari penyalahgunaan perangkat, informasi, maupun sistem informasi, dasar keberlakuan kontrak elektronik, hubungan antara aturan mengenai nama domain dan hak merek, hubungan antara hak privasi dan perlindungan data pribadi, perbedaan antara tandatangan digital dengan tandatangan elektronik, kejahatan siber, dan pembuktian elektronik.

●**Pengajar:** Abdul Salam, Brian Amy Prasetyo, Edmon Makarim.

Hukum Sumber Daya Alam

Hukum Kehutanan (LWNR 80201)

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang sejarah hukum kehutanan, hukum tanah adat dalam hukum kehutanan serta kebijakan pengelolaan hutan yang dikaitkan dengan kegiatan pertambangan serta kebijakan pertambangan di kawasan hutan yang diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi. Selain itu mahasiswa akan diberikan penjelasan tentang sengketa tanah adat dikawasan hutan dan penyelesaiannya.

●**Pengajar:** Budidarmono, Budi Riyanto, Harsanto Nursadi.

Pengadaan Tanah (LWNR 80202)

Tujuan dari mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang berbagai macam kebutuhan tanah dan implikasinya dalam berbagai penggunaan tanah. Dalam hal ini juga diajarkan prinsip-prinsip dasar tentang penguasaan dan perolehan tanah, serta tata cara perolehan tanah menurut hukum tanah nasional. Termasuk didalamnya tentang penyelesaian sengketa pertanahan yang mungkin timbul di dalam perolehan tanah.

●**Pengajar:** Prof. Arie Sukanti Hutagalung, Suparjo Sujadi.

Hukum Perminyakan dan Gas Bumi (LWNR 80204)

Mata Kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai aspek dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi. Pembahasannya mencakup: Konsep Penguasaan Migas oleh Negara; Kontrak Kerjasama Migas; *Cost recovery;* BP Migas, Badan Pengatur dan SKK Migas; Kewajiban dalam KKS; Wilayah Pertambangan; Permasalahan Dalam Pengelolaan.

●**Pengajar:** Tri Hayati.

Hukum Lingkungan (LWN R 80206)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang aspek-aspek hukum dalam lingkungan hidup. Pembahasan mata kulih ini mencakup: Keterkaitan lingkungan hidup dengan cabang-cabang ilmu lainnya; Penyebab permasalahan lingkungan hidup; Prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan; Posisi hukum lingkungan dalam pembangunan politik hukum sumber daya lingkungan; Perangkat penataan pengelolaan lingkungan; Penegakan hukum lingkungan; Penyelesaian sengketa lingkungan dan kapita selekta.

●**Pengajar:** Bambang Prabowo Soedarso, Bono Budi Priambodo, Harsanto Nursadi, M. R. Andri Gunawan Wibisana.

Hukum Penataan Ruan dan Penatagunaan Tanah (LWN R 80210)

Mata Kuliah ini membahas tentang *Landreform* diantaranya adalah Ulasan Umum *Landreform*, Pengertian *Landreform*, Tujuan *Landreform* serta Reforma Agraria. Selanjutnya memberikan pembahasan tentang: *Landreform* di Indonesia (Pengertian, Dasar Hukum, Tujuan, Aparatur Penyelenggara, *Landreform* Bukan Produk Komunis); Program-program *Landreform* (Larangan Penguasaan Tanah Melebihi Batas Maksimum, Larangan Pemilikan Tanah *Absentee*, Redistribusi Tanah, Pengaturan Kembali Tanah yang Digadaikan, Perjanjian Bagi Hasil, Penetapan Luas Minimum Pemilikan Tanah Pertanian); Program Pendukung Landreform (Transmigrasi, Perkebunan Inti Rakyat iii. Pencetakan Sawah); Perbandingan Landreform di Negara Lain diantaranya Kesatu Negara yang Berhasil (Jepang, Taiwan), Kedua Negara yang Kurang Berhasil (India, Amerika Latin). Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah antara lain Kerangka Teori Umum, Permasalahan dan Konsep Penanganan dalam Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Beberapa Masalah Aktual yang Harus Diselesaikan Dengan Pendekatan Integral di Kawasan Pedesaan, Pinggiran Kota dan Pesisir. Tujuan dan Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Secara Integral; Aspek Kelembagaan (Kewenangan Pemerintahan dan LSM)., Penataan Ruang Menurut Hukum Indonesia, Kawasan Siap Bangun, Lingkungan Siap Bangun dan Konsolidasi Tanah.

●**Pengajar:** Prof. Arie Sukanti Hutagalung, Suparjo Sujadi.

Hukum Kelautan dan Perikanan (LWN R 80205)

Mata Kuliah ini memberikan pemahaman tentang pemamnfaatan sector laut dan perikanan sebagai sumber daya alam dengan mengemukakan antara lain tentang prinsip dasar dan kewajiban negara dalam pengelolaan dan pemanfaatan laut dan perikanan, disertai juga dengan pemahaman tentang implementasi kewajiban negara dalam kebijakan nasional.

●**Pengajar:** Prof. Melda Kamil Ariadno, Ratih Lestarini.

Hukum Pertambangan (LWN R 80203)

Mata Kuliah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai aspek dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Pembahasan mencakup: Sejarah pengelolaan pertambangan; Konsep Penguasaan SDA oleh Negara; Sistem perizinan pertambangan; Wilayah Pertambangan; Kewajiban Pemegang Izin; Kewenangan Pemberian izin; Permasalahan2 Pengelolaan pertambangan.

●**Pengajar:** Tri Hayati.

Hukum Sumber Daya Air (LWN R 80207)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang tata kelola dan pemanfaatan sumber daya air, pemberian hak-hak atas air, subyek-subyek hukum yang diberikan hak atas air, prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan hak atas air. Selain itu juga diberikan pengetahuan tentang konflik air dan mekanisme penyelesaian sengketa air. Penjelasan hal-hal di atasdidukung dengan pemberian pengetahuan tentang perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya air.

●**Pengajar:** Hamid Chalid, R. Ismala Dewi.

Hukum Investasi & Penanaman Modal (LWN R 80209)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang: Penanaman modal langsung (*direct investment*); Pemahaman modal tidak langsung

(fortofolio *investment*).

Di samping itu diberikan pula pengetahuan teknis mengenai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta perjanjian atau kontrak di kedua bidang hukum tersebut di atas. Materi kuliah antara lain mencakup: Perlunya modal asing, syarat-syarat dan kerangka hukum penanaman pasar modal; *joint venture;* penyelesaian sengketa penanaman modal asing; WTO dan peraturan investasi; prinsip-prinsip dalam pasar modal; mekanisme *go public*; perjanjian emisi;larangan *insider trading*; penawaran tender (*tender offer*); dan penyelesaian sengketa di bidang pasar modal.

●**Pengajar:** Prof. A. Zen Umar Purba.

Hukum Perizinan (LWN R 80208)

Mata Kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai aspek dan permasalahan dalam Perizinan di Indonesia. Pembahasan mencakup: Ruang lingkup dan sejarah Perizinan; Perizinan dalam Konteks Hukum Administrasi Negara; Aspek Kewenangan dalam sistem Perizinan; Jenis-jenis Perizinan; Sistem perizinan Satu Pintu; Jenis-jenis Perizinan Pada Sektor2 (Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan, Pertanahan, Migas, Energi dsb).

●**Pengajar:** Tri Hayati.

Hukum Keuangan Negara

Hukum dan Kebijakan Anggaran Publik/Privat (LWPF 80201)

Mata kuliah ini menjelaskan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam pengelolaan anggaran baik di lingkungan sektor publik dan sektor privat. Pengelolaan anggaran termasuk dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan dalam pengeluaran anggaran publik dan privat. Pengaturan dan pengambilan kebijakan dalam anggaran publik/privat memerlukan kajian mendalam terkait dengan sistem perencanaan yang multidimensi dengan aspek hukum, aspek politik, dan aspek ekonomi. Sementara itu, sistem pelaksanaan anggaran membutuhkan sistematisasi dalam pengendalian dan evaluasi, serta monitoringnya sesuai dengan tujuan bernegara dan tujuan badan hukum. Kajian terhadap hukum dan kebijan anggaran publik/privat memberikan panduan mengenai anggaran ditetapkan dan diputuskan serta rasionalisasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan anggaran publik/privat. Anggaran publik terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran Badan Hukum Publik pada umumnya seperti Bank Indonesia. Sementara itu, anggaran privat meliputi anggaran badan hukum perdata seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perseroan terbatas. Dalam kajian praktis dibahas mengenai aspek kewenangan kelembagaan dan terjadinya masalah hukum yang menyangkut benturan/perselisihan antar-norma, antar-regulasi, dan antar-wewenang.

●**Pengajar:** Dian Puji N. Simatupang, Yuli Indrawati.

Hukum Perencanaan (LWPF 80202)

Mata kuliah ini menjelaskan tentang proses dalam perencanaan, baik dalam prinsip yang terkait anggaran dan sinkronisasi dengan pendapatan dan pengeluaran. Aspek lainnya menjelaskan pengertian perencanaan, sejarah pengaturan perencanaan di Indonesia sejak merdeka sampai dengan sekarang, norma pengaturan perencanaan, aspek hukum dan ekonomis perencanaan pembangunan di Indonesia, serta perkembangan kelembagaan perencanaan di Indonesia. Perencanaan merupakan aspek penting untuk menentukan taraf kehidupan dan perkembangan tujuan pembangunan yang menentukan tujuan bernegara dalam proses penganggaran di Indonesia.

●**Pengajar:** Andhika Danesjvara, Harsanto Nursadi, Tri Hayati.

Peraturan Perundang–undangan dan Peraturan Kebijakan (LWPF8020)

Mata kuliah ini menjelaskan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dan perbedaannya

dengan beberapa pengaturan dan norma dalam sektor keuangan negara, keuangan daerah, dan keuangan badan hukum. Selain itu, memberikan pemahaman dan pengkajian mengenai bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan, delegasi pengaturan, dan sistem dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara seperti UU APBN dan Perda APBD. Selain itu, menjelaskan aspek kekhususan dalam materi muatan dalam UU APBN dan Perda APBD dalam kaitannya dengan teori perundang-undangan dan kewenangan pembentukannya.

●**Pengajar:** Prof. Maria Farida Indrati, Fitriani Ahlan Sjarif.

Hukum Pajak dan Retribusi (LWPF8020)

Mata kuliah ini menjelaskan konteks pajak dan retribusi dalam kaitannya dengan keuangan negara sebagai bentuk penerimaan negara, pajak dan retribusi memberikan kontribusi signifikan dalam keuangan negara. Selain juga membahas mengenai aspek penerimaan negara bukan pajak. Pengaturan dalam bidang perpajakan sebagai dasar utama pembiayaan pembangunan negara serta teori terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban perpajakan di Indonesia. Selain itu, mengemukakan analisis yuridis mengenai aspek hukum pajak dan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

●**Pengajar:** Eka Sri Sunarti, Tjip Ismail.

Hukum Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah (LWPF80203)

Mata kuliah ini menjelaskan hubungan keuangan pusat dan pemerintahan daerah berkaitan dengan proses keuangan negara dan prinsip-prinsip keuangan negara. Dalam hal ini dibahas mengenai aspek penting sinergitas pembangunan nasional dan pembangunan daerah dengan mengemukakan aspek penting hubungan keuangan antara pusat dan daerah serta dampak kebijakannya secara umum serta multidimensi kebijakan dan pengaturannya menurut hukum dan ekonomi. Selain mengemukakan perbandingan di beberapa negara.

●**Pengajar:** Harsanto Nursadi, Machfud Sidik

Hukum Perusahaan Negara dan Daerah (LWPF80206)

Mata kuliah ini membahas pola pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan implikasinya terhadap keuangan negara. Badan Usaha Milik Negara sebagai komponen sokoguru perekonomian negara dibahas secara teoretis hukum perseroan, dan hukum persaingan usaha secara sinergitas. Konsep keuangan negara dalam badan usaha milik negara dan historisnya dalam pembangunan nasional dan perbandingannya dengan beberapa negara lain.

●**Pengajar:** Prof. Erman Rajagukguk, Freddy Harris, Teddy Anggoro.

Hukum Pengawasan/Pemeriksaan (LWPF80209)

Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengawasan/pemeriksaan keuanganterhadap keuangan negara sebagai bagiandari sistem manajemen keuangan negara. Pengawasan/pemeriksaan sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara merupakan aspek penting dalam menciptakan konsepsi keuangan negara yang baik dan akuntabel. Oleh sebab itu, sistem pengawasan/pemeriksaan memerlukan konsepsi teoretis dan historis menyangkut aspek kewenangan, aspek kelembagaan, dan aspek pengaturannya di Indonesia.

●**Pengajar:** Prof. J. B. Sumarlin, Eka Sri Sunarti, Yuli Indrawati.

Hukum Pengadaan Barang/Jasa (LWPF 80208)

Mata kuliah ini menjelaskan proses pengadaan barang dan jasa terkait erat dengan regulasi dan hukum keuangan publik. Prosesnya dalam pengelolaan dan pemeriksaan serta dalam kaitannya dengan sistem pengendalian dan perkara hukum yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Aspek pengaturan dan aspek penting dalam pengadaan barang/jasa ini dikaji aspek teoretis, sejarah, dan kelembagaannya, serta masalah hukum secara praktis.

●**Pengajar:** Dian Puji Nugraha Simatupang, Mudji Sutrisno.

Hukum Transaksi Keuangan Publik (LWPF80207)

Mata kuliah ini menjelaskan tentang keterkaitan beberapa aspek tindakan hukum publik dan privat di Indonesia dalam semua sektor keuangan publik yang berdampak langsung maupun tidak langsung dengan keuangan publik misalnya perbankan, kontrak pemerintah, dan risiko keuangan secara keseluruhan. Aspek hukum terkait dengan beberapa transaksi kebijakan yang sejalan dengan pengaturan keuangan dan permasalahan praktis yang muncul dalam proses kebijakan keuangan yang berdimensi publik maupun privat di Indonesia. Juga membahas Kontrak Pemerintah dan kebijakan keuangan, aspek hubungan privat-publik, dan sistem pengambilan keputusan secara teoretis bagi pelaku pengambilan keputusan keuangan.

●**Pengajar:** Darminto Hartono, Henry D. Hutagaol, Yunus Husein.

Hukum Ketenagakerjaan

Hukum Hubungan Industrial (LWLB80202)

Mata kuliah ini membahas dan menganalisis perkembanganketentuan hukum mengenai hubungan antara pekerja dan pengusaha, terkait dengan peran pemerintah dalam upaya terjalinnya hubungan kerja yang harmonis, melalui berbagai sarana, yaitu adanya peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, lembaga kerjasama, organisasi pengusaha, serikat pekerja dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

●**Pengajar:** Prof. Aloysius Uwiyono.

Hukum Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LWLB80205)

Mata kuliah ini membahas dan menganalisis tentang perkembangan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja sebagai dampak dari perubahan ekspektasi pekerja/buruh, pemberi kerja, dan masyarakat pada umumnya. Terdapat pembahasan mengenai perkembangan industri, karakteristik dan organisasinya, produk atau jasa yang dihasilkan, resiko, bahaya, kerugian, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja serta manajemen pemeliharaan kesehatan. Penekanan terutama diberikan pada kebijakan dan intervensi pencegahan, manajemen, penerapan, evaluasi dan analisisnya dalam konteks perlindungan bagi pekerja/buruh.

●**Pengajar:** Helena Norma Roring.

Hukum Jaminan Sosial (LWLB80206)

Mata kuliah ini membahas dan menganalisis perkembangan ketentuan hukum mengenai perlindungan Ekonomis bagi pekerja pada saat bekerja dan ketika tidak dapat melakukan pekerjaan. Mata kuliah ini membahas sejarah perkembangan jaminan sosial, pengertian, bentuk dan sistem pemberian jaminan sosial, kegunaan jaminan sosial di masyarakat, model-model pemberian jaminan sosial di suatu negara, dan pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia..

●**Pengajar:** Widodo Suryandono.

Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (LWLB8020)

Mata kuliah ini membahas dan menganalisis perkembangan hukum yang mengatur proses penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam hubungan industrial, serta penerapannya pada kasus-kasus yang terjadi pada setiap tahap penyelesaiannya.

●**Pengajar:** Prof. Aloysius Uwiyono.

Hukum Tentang Pengupahan (LWLB80203)

Mata kuliah ini membahas dan menganalisis perkembangan ketentuan hukum terkaitimbalan berupa upah yang diterima pekerja atas pekerjaan yang dilakukan ke arah yang lebih adil dan sejahtera. Hal ini akan dibahas tentang konsep imbalan,

dan penerapannya di Indonesia. Selanjutnya juga dibahas mengenai teori pengupahan, bentuk dan cara pembayaran upah, upah minimum serta kaitan pengupahan dengan produktivitas, jaminan sosial dan kelangsungan usaha.

●**Pengajar:** Widodo Suryandono.

Kapita Selekta Masalah Perburuhan (LWLB80209)

Mata kuliah ini membahas dan menganalisis berbagai perkembangan isu-isu dalam hukum perburuhan, khususnya yang terkait dengan bidang hukum perdata, tata usaha negara, pidana, tata negara dan administrasi negara, ketentuan hukum privat dan publik. Selanjutnya membahas mengenai masalah –masalah Perburuhan di Indonesia diantaranya: Hubungan Industrial, Serikat Pekerja/Buruh, Organisasi Pengusaha, Lembaga Kerjasama Bipartiet, Lembaga Kerjasama Tripatiet, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Kesejahteraan Ketenagakerjaan, Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan.

●**Pengajar:** Prof. Aloysius Uwiyono.

Hukum dan Migrasi Tenaga Kerja (LW LB80210)

Mata kuliah ini membahas dan menganalisis perkembangan ketentuan hukum mengenai perpindahan pekerja dari satu tempat ke tempat lain, persyaratan dan perlindungan bagi pekerja dari dalam atau ke luar wilayah Indonesia ke arah yang lebih adil. Selanjutnya membahas mengenai Instrumen internasional seperti PBB dan *International Labour Organization* (ILO) Menurut Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-Hak semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Konsep dan definisi migrasi tenaga kerja, Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-Hak semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Persetujuan Umum tentang Perdagangan Jasa tidak mempertimbangkan pergerakan penyedia layanan sebagai migrasi tenaga kerja.

●**Pengajar:** Prof. Aloysius Uwiyono

Hukum Administrasi Kepegawaian (LWLB80208)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang aspek hukum administrasi negara yang berkaitan dengan pengelolaan sektor kepegawaian negara. Pembahasan mata kuliah ini difokuskan antara lain meliputi: Kajian tentang konsep dasar Administrasi Negara dalam perspektif Pembinaan Aparatur Sipil Negara sebagai organ layanan terhadap masyarakat bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam menuju *Good Governance*; Prinsip Aparatur Sipil Negara dalam perannya sebagai pegawai harus jujur, tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya dan tidak terintervensi politik serta sebagai salah satu pelopor pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia; Prinsip Aparatur Sipil Negara yang harus selalu meningkatkan mutu kelembagaan dan mutu layanan, melalui penigkatan kompetensi, peningkatan professional pegawai, kualifikasi dalam perspektif dan melakukan evaluasi kinerja serta melakukan tindak lanjut pengembangannya secara berkesinambungan; Peran, wewenang, keseimbangan antara hak dan tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam melakukan layanan terhadap masyarakat; Peran dan fungsi serta keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai Lembaga Nonstruktural yang independen dalam memberikan masukan kepada Presiden dalam pelaksanaan pembinaan dengan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

●**Pengajar:** Tri Hayati.

Hukum Hubungan Kerja (LWLB80201)

Mata kuliah ini membahas dan menganalisis perkembangan ketentuan hukum hubungan kerja antara pemberi dan penerima kerja terkait denganunsur dan ciri perjanjian yang menjadi dasar hubungan-hubungan hukum selanjutnya ke arah yang lebih adil dan setara pada masa mendatang.

●**Pengajar:** -

HAM dan Good Governance

Hukum dan Pemerintahan Yang Baik (LWHR80201)

Mata kuliah ini bertujuan untuk member pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep, prinsip dan penerapan *GOOD Governance* yang ditinjau dari berbagai perspektif meliputi: Sejarah: perubahan makna dari *GOVERNMENT* ke arah *GOVERNANCE* mencakup tiga *Stake holder;* Nasional: Perkembangan *Good Governance* di Indonesia (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan); Regional: Perkembangan di ASEAN; Internasional: perbandingan dengan Belanda (*Governance Administrative Law Act/GALA)*; PENDAPAT para pakar: Henk Addink, Prayudi; Juga akan memaparkan tentang Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Proper Administration*) sebagai bagian tak terpisahkan dari *Good Governance*.

Selain itu mata kuliah *Good Governance and Law* memaparkan aspek hukum dan konsep *Good Governance,* yang dapat member kepastian hukum dan memiliki *Law enforcement* dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

●**Pengajar:** Andhika Danesjvara, Tri Hayati.

Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia (LWHR80205)

Mata kuliah ini membahas tentang: Sejarah Hak Asasi Manusia, *legal and moral obligation, theories of rights, A contractarian approach to punishment, Responsibility, Adjudication and legal reasoning,* asas legalitas dan ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut tempat dan jenis pidana.

●**Pengajar:** Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Prof Topo Santoso, Surastini Fitriasih.

Penerapan Hak Asasi Manusia dan Kepemerintahan Yang Baik (LWHR80202)

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep-konsep Hak Asasi Manusia dari berbagai perspektif yaitu: Sejarah perkembangannya pendapat para ahli dan berbagai regulasi yang mengaturnya, baik Nasional maupun Internasional. Sampai pada penerapannya juga pada level Internasional regional dan nasional, serta korelasinya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.

●**Pengajar**: Patricia Rinwigati

Transisi Menuju Hak Asasi Manusia dan Kepemerintahan Yang Baik (LWHR80203)

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep-konsep hak asasi manusia dalam masa transisi dari negara non modern menuju negara modern menyambut era globalisasi. Berbagai permasalahan yang muncul dari transisi tersebut berpengaruh pada perwujudan kepemerintahan yang baik.

●**Pengajar:** Prof. Satya Arinanto Fatmawati Fitra Arsil

Etika Hukum, Etika Profesi dan Hak Asasi Manusia (LWHR80204)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang: Universal *Declaration of Human Rights*; *Earth Charter* (*Global Survival Challenges*); *Legal ethic in Human Rights*; *Legal ethic in good governance*; *Code of ethic* di beberapa Negara; *Some profession in local, state and federal regulatory*.

●**Pengajar:** Prof. Satya Arinanto, Heru Susetyo, Tri Hayati.

Perbandingan Hukum Administrasi Negara (LWHR80206)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hukum administrasi negara di Indonesia dan Negara-negara lain di dunia. Metode yang digunakan dengan mengadakan perbandingan antara dua atau lebih objek yang diselidiki terkait Hukum Administrasi Negara dengan membandingkan persamaan dan perbedaan organisasi pemerintahan negara tertentu. Yang diperbandingkan antara lain aspek: Aliran-aliran Sejarah yang mempengaruhi pembentukan pemerintahan suatu negara; Latar

Belakang bentuk negara hukum: *Common Law – Civil Law*; Kewenangan Pejabat dan prosedur Pembuatan Keputusan Pejabat; *State Own Enterprise* (Privatisasi); Kelembagaan/*Agencies;* Sistem Pemerintahan (Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Parleman); Delegasi dan Diskresi dari seorang Pejabat; *Administration Appeal;* Desentralisasi Pemerintahan*;* Sistem Peradilan;Perbandingan Peraturan Administrasi: UU AP, GALA, APA.

●**Pengajar:** Andhika Danesjvara, Harsanto Nursadi, Tri Hayati.

Korupsi dan Kepemerintahan Yang Baik (LWHR80207)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman pada tentang: definisi, sifat dan bentuk korupsi, penyebab dan dampak korupsi, strategi antikorupsi preventif, strategi antikorupsi represif (*law enforcement*, gerakan dan koalisi antikorupsi internasional. Mata kuliah ini juga membahas mengenai desain, integritas dan efektifitas badan antikorupsi independen. Selain itu, mata kuliah ini akan memperdebatkan dan mendiskusikan masalah: desain kebijakan dan hukum antikorupsi, korupsi, pembangunan, dan efektifitas tata kelola pemerintahan, korupsi birokrasi dan integritas pengadaan barang dan jasakorupsi, integritas dan efektifitas tata kelola korporasi, korupsi yudisial dan integritas sistem peradilan pidana; korupsi, pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, korupsi, *E-governance,* dan reformasi birokrasi, dan korupsi politik, sistem elektoral, konstitusi, dan intergritas demokrasi.

●**Pengajar:** -

Birokrasi dan Good Governance (LWHR80208)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa trentang Peranan dan sejarah perkembangan birokrasi dan prinsip Good Governance di negara modern. Dimulai dengan memberikan pemahaman tentang negara birokrasi, Peranan Pemerintah dan Birokrasi bagi masyarakat. Dilanjutkan dengan Problem dan Krisis Birokrasi terutama terkait dengan peranan Biirokrasi dalam Globalisasi dan Pasar Bebas. Dalam konteks ini, maka juga kepada mahasiswa juga akan diberikan topik bahasan terkait dnegan Reformasi Birokrasi, Birokrasi di Masa Depan. Setalah pembahasan tentang Birokrasi dilanjutkan dengan Dilanjutkan dengan Problem dan Krisis Birokrasi terutama terkait dengan peranan Birokrasi dalam Globalisasi dan Pasar Bebas. Dalam konteks ini, maka kepada mahasiswa juga akan diberikan topik bahasan terkait dengan Reformasi Birokrasi, Birokrasi di Masa Depan. Topik*Good Governance* dengan analisa terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan memperbandingkanpelaksanaannya di beberapa negara. berbagai perspektif yang berkaitan dengan pelaksanaan birokrasi dan *Good Governance*di berbagai negara. Pembahasan dimulai dengan sejarah dan perkembangan berbagai teori tentang birokrasi di berbagai negara kemudian dilanjutkan dengan berbagai permasalahan dan kasus-kasus yang terjadi pada pelaksanaan birokrasi di negara-negara tersebut. Pembahasan materi Good Governance dilakukan dengan melakukan kajian dan analisa terhadap prinsip-prinsip *Good Governance* dan bagaimana implementasinya di pemerintahan pada saat ini, baik pada pemerintahan tingkat nasional, regional dan internasional.

●**Pengajar:** Andhika Danesjvara, Tri Hayati.

Hak Asasi Manusia (LWHR80209)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai negara. Pembahasan difokuskan kepada aspek-aspek teori dan filsafat, konstitusi, politik, sosial dan implementasi HAM.

Selain itu, juga dibahas mengenai hak dan kewajiban berbagai pihak dalam perlindungan HAM di berbagai negara serta upaya hukum dan penyelesaian sengketa HAM, baik melalui peradilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan lain-lain.

●**Pengajar:** Prof. Satya Arinanto.

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT (Pernah Mengambil)
1	LWMN801001	Peraturan Jabatan Notaris	2	-
2	LWMN801002	Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta	2	-
3	LWMN801003	Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan	2	-
4	LWMN801004	Hukum Perusahaan Berkaitan Dengan Kenotariatan	2	-
5	LWMN801005	Kapita Selekta Hukum Tanah	2	-
6	LWMN801006	Hukum Waris	2	-
7	LWMN801007	Hukum Aneka Perjanjian dan Jaminan	2	-
8	LWMN801008	Penguasaan, Pendaftaran, Pengalihan Hak Atas Tanah	2	-
9	LWMN801009	Kode Etik Notaris	2	-
10	LWMN801010	Hukum Tentang Surat Berharga dan Pasar Modal	2	-
11	LWMN802001	Pembuatan Akta Badan Hukum Non Perseroan Terbatas dan Akta Perusahaan Non Badan Hukum	2	1. Peraturan Jabatan Notaris 2. Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta 3. Hukum Perusahaan Berkaitan Dengan Kenotariatan
12	LWMN802002	Pembuatan Akta Aneka Perjanjian	2	1. Peraturan Jabatan Notaris 2. Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta 3. Hukum Aneka Perjanjian dan Jaminan
13	LWMN802003	Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga	2	1. Peraturan Jabatan Notaris 2. Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta 3. Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan 4. Hukum Waris
14	LWMN802004	Pembuatan Akta PPAT	2	1. Peraturan Jabatan Notaris 2. Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta 3. Kapita Selekta Hukum Tanah
15	LWMN802005	Pembuatan Akta Perseroan Terbatas	2	1. Peraturan Jabatan Notaris 2. Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta 3. Hukum Perusahaan Berkaitan Dengan Kenotariatan 4. Pembuatan Akta Badan Hukum Non Perseroan Terbatas dan Akta Perusahaan Non Badan Hukum 5. Hukum Tentang Surat Berharga dan Pasar Modal
16	LWMN802006	Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan	2	1. Peraturan Jabatan Notaris 2. Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta 3. Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan 4. Hukum Waris
17	LWMN801011	Teori dan Penemuan Hukum	2	
18	LWMN801012	Metode Penelitian Ilmiah	2	
19	LWMN801013	Tesis/Tugas Akhir	4	Metode Penelitian Ilmiah
		Jumlah sks	**41**	

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	
1	LWMN803001	Peraturan Lelang	2	
2	LWMN803002	Hukum Pajak Berkaitan Dengan Kenotariatan	2	
3	LWMN803003	Hukum Kepailtan	2	
4	LWMN803004	Pembuatan Akta Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual	2	
5	LWMN803005	Pembuatan Kontrak Internasional	2	
6	LWMN803006	Hukum Perbankan Terkait Kenotariatan	2	
7	LWMN803007	Hukum Adat Berkaitan Dengan Kenotariatan	2	
8	LWMN803008	Notaris Dan Transaksi Elektronik	2	
9	LWMN803009	Pembetulan Akta Notaris	2	
		Jumlah SKS Matakuliah pilihan yang harus diambil 2 sks:	2	

Jumlah sks lulus M.Kn. 41 sks Matakuliah Wajib dan 2 sks Matakuliah pilihan = 43 sks

Pembuatan Akta Badan hukum Non Perseroan Terbatas dan Akta Perusahaan Non Badan Hukum (LWMN802001)

Kuliah ini diberikan agar mahasiswa mampu merancanang Akta Badan Hukum Non Perseroan Terbatas dan Akta Perusahaan Non Badang Hukum.

Ruang lingkup materi yang diberikan meliputi: Akta Pendirian, penggabungan, peleburan, pengambilalihan; Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer.

●**Pengajar:** Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn.; Milly Karmila Sareal, S.H., M.Kn.; Muhamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn.

Pembuatan Akta Aneka Perjanjian (LWMN802002)

Kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu merancang Akta Aneka Perjanjian dan memberikan pemahaman tentang teknik-teknik dan pembuatan bermacam-macam akta aneka perjanjian.

Ruang lingkup materi mencakup:

1. Pembuatan akta aneka perjanjian yang dihadapi sehari-hari seperti: Aneka Perikatan dan Kuasa, Pengikatan Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa, Jual Beli dan Pemindahan Hak, Aneka Hibah dan Perjanjian Pinjam Pakai, Berita Acara Undian, PPJB;
2. Pembuatan akta perjanjian kredit berikut akta jaminan umum dan khusus, Jaminan perorangan (borgtocht), jaminan perusahaan (corporate guarantee), Bank Guarantee, Akta Jaminan Fidusia dengan berbagai variasinya seperti Jaminan berupa kendaraan, resi gudang mesin-mesin, piutang dan lain-lain, Gadai, Kuasa Memasang Hipotik Kapal, Hipotik Pesawat, Jaminan Pribadi, dan cessie.

●**Pengajar:** Dr. Arsin Lukman, S.H.; Muhamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn.

Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga (LWMN802003)

Kuliah ini diberikan agar mahasiswa mampu menganalisa permasalahan hukum Perorangan dan Keluarga serta menuangkannya dalam pembuatan akta yang sesuai dengan ketentuan UUJN dan TPA.

Materi yang diberikan meliputi:

1. Pembuatan Akta Perjanjian Kawin;
2. Pembuatan Akta Pengakuan Anak;
3. Pembuatan Akta Aneka Warisan;
4. Pembuatan Akta Keterangan Hak Waris.

Untuk itu dalam kuliah tersebut akan diberi contoh-contoh praktis serta juga diberi pokok bahasan yang bersifat kapita selekta yang mempunyai nilai tambah bagi mahasiswa.

●**Pengajar:** Liza Priandhini, S.H., M.Kn.; Milly Karmila, S.H., M.Kn.

Pembuatan Akta PPAT (LWMN802004)

Kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu merancang berbagai akta yang mencakup:

1. Jual Beli;
2. Tukar Menukar;
3. Hibah;
4. Pemasukan dalam Perusahaan (inbreng);
5. Pembagian Akta Bersama;
6. Pemberian Hak Tanggungan;
7. SKMHT;
8. Pemberian HGB dan Hak Pakai di atas Tanah Hak Milik, dan lainnya yang terikat dengan Hukum Tanah.

● **Pengajar:** Dr. Arsin Lukman, S.H.

Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (LWMN802005)

Kuliah ini diberikan agar mahasiswa mempu untuk menganalisa dan memecahkan permasalahan yang ada dalam suatu Perserian Terbatas (tertutup maupun terbuka) baik secara internal maupun eksternal, untuk selanjutnya mampu menyusun suatu surat, dokumen, akta yang dibutuhkan dengan menerapkan peraturan yang berlaku.

Ruang likup materi yang diberikan mencakup: Pembuatan Akta PT Tertutup (Fasilitas, Non Fasilitas, Persero, dan BUMD) dan PT Terbuka (meliputi: pendirian, perubahan modal dan kepemilikan saham serta perubahan Anggaran Dasar/Data Perseroan lainnya, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran, serta pembuatan akta berkenaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- **Pengajar**: Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M.; Imas Fatimah, S.H., M.Kn.; Ashoya Ratam, S.H., M.Sc., M.Kn.; Tjhong Sendrawan, S.H., M.Kn.; Dr. Isyana W. Sadjarwo, S.H., M.H.

Pembuatan Akta Aneka Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan (LWMN802006)

Kuliah ini diberikan agar mahasiswa mampu merancang Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Warisan. Materi yang diberikan mencakup: Pembuatan akta pembagian dan pemisahan untuk seluruh harta warisan, sebagian harta warisan, untuk WNI yang tunduk pada BW, yang tunduk pada Hukum Islam, yang tunduk pada Hukum Waris Adat, jual beli untuk seluruh harta warisan dan untuk sebagian harta warisan.

- **Pengajar:** Dr. Pieter E. Latumeten, S.H., M.H.

Kode Etik Notaris (LWMN801009)

Kuliah ini diberikan agar peserta program memahami, kemudian menghayati sebagai pedoman dalam tindak tanduknya baik dalam menjalankan tugasnya selaku notaris maupun dalam tindak tanduknya selaku jabatan notaris, mengenai apa yang benar dan tidak benar, mengenai apa yang baik dan tidak baik, dengan tujuan agar tidak melanggar Kode Etik. Tujuan perkuliahan agar peserta program memahami tentang tika Profesi dan mampu menerapkan Kode Etik dalam melaksanakan profesi dan jabatan Notaris/PPAT.

Ruang lingkup materi yang diberikan mencakup pengertian, batasan kode etik notaris, apa yang membedakan antara kode etik dengan moral dan antara kode etik dengan agama, sejarah dan perkembangan kode etik notaris, kasus-kasus pelanggaran kode etik oleh notaris serta penegakannya oleh Dewan Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Keputusan Kongres, serta peraturan-peraturan Ikatan Notaris Indonesia mengenai kode etik.

- **Pengajar:** Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A.; Dr. Isyana W. Sadjarwo, S.H., M.H.

Peraturan Jabatan Notaris (LWMN801001)

Tujuan pembelajaran: mampu merekomendasikan dengan tepat ketentuan Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku di Indonesia.

Deskripsi: Peraturan Jabatan Notaris adalah merupakan suatu keharusan, kewajiban, dan syarat mutlak bagi seorang notaris untuk mengetajhui dan memahaminya sebagai modal dasar untuk dapat menjalankan jabatan notaris. Oleh karena itu di dalam proses belajar mengajar ini akan dibahas secara menyeluruh dan mendalam mulai dati sejarah timbul dan perkembangan lembaga notaris dengan pemahaman tentang notars sebagai pejabat umum, persyaratan pengengkatan dan pemberhentian, serta pelaksanaan jabatan dan pengawasannya.

- **Pengajar:** Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn.; Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H.

Dasar–dasar Teknik Pembuatan Akta (LWMN801002)

Kuliah ini diberikan agar peserta program mampu mengaplikasikan UU Jabatan Notari dalam Pembuatan Akta.

Materi yang diberikan meliputi: Undang-undang Jabatan Notaris dalam pembuatan akta: Bagian Akta, Komparisi. Komparisi Individu. Komparisi untuk Badan Hukum (PT, Koperasi, Yayasan, Perkumpulan, Dana Pensiun).

- **Pengajar: Alwesius, S.H., M.Kn.; Dr. Eka Sri Sunarti, S.H., M.Si.**

Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan (LWMN801003)

Kuliah ini diberikan agar peserta program mampu mengaplikasikan ketentuan Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan.

Ruang lingkup materi mencakup: Syarat sahnya erkawinan, Perkawinan Campuran, Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, Perjanjian Kawin, termauk materi pengangkatan dan pengakuan anak – wasiat.

●**Pengajar:** Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H.; Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.; Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H.

Hukum Perusahaan Berkaitan Dengan Kenotariatan (LWMN801004)

Kuliah ini diberikan agar peserta program mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang hukum perusahaan dalam pembuatan akta terkait perusahaan, badan hukum Non PT, perusahaan Non Badan Hukum, dan PT.

Materi yang diberikan meliputi: Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas (PT Biasa, PT PMDN, PT PMA, PT Persero, PT Tbk/PT Publik, termasuk Peleburan, Pembubaran (likuidasi), Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan). Teori, maksud dan tujuan: pemodalan, penyetoran saham, pembagian/penggunaan keuntungan PT. RUPS, Perubahan Akta Menganai Saham.

●**Pengajar:** Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.; Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H., LL.M.; Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M.; Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I.

Kapita Selekta Hukum Tanah (LWMN801005)

Kuliah ini diberikan agar mampu menganalisis dan memberikan penyelesaian kasus-kasus di bidang pertanahan.

Ruang lingkup materi mencakup: Sistem hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, UUPA dan Politik Pertanahan Nasional, Masalah aktual dalam perolehan tanah untuk pembangunan, kepentingan umum; Permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan; Masalah tanah, pendaftaran tanah dan kepastian hukum; Masalah aktual dalam praktek tanah sebagai jaminan hutang; Pembangunan dan penghunian rumah susun (Condominium); Sengketa Tanah dan penyeesaian; serta kebijakan pertanahan terbaru.

● **Pengajar:** Prof. Arie Soekanti, S.H., M.L.I.; Dr. Suparjo, S.H., M.H.; Hendriani Parwitasari, S.H., M.Kn.; Marliesa Qadariani, S.H., M.H.

Hukum Waris (LWMN801006)

Kuliah ini diberikan agar mahasiswa mampu memahami, memperdalam, dan menguasai Hukum Kewarisan Perdata, dan Hukum Kewarisan Islam, serta menganalisis permasalahan berkaitan dengan pewarisan berdasarkan UU, Wasiat/Testamen, Ajaran Bilateral Hazairin, Kewarisan Islam ajaran Patrilineal Syafii, Kompilasi Hukum Islam, Wasiat Wajibah, Hibah, kedudukan anak berkaitan dengan harta warisan.

Deskripsi Hukum Waris Perdata Barat: Pembelahan dan Penggantian, Pembagian berdasarkan Golongan, Ahli Waris, Anak Luar Kawin, Wasiat, Penolakan, dan Pembuatan Wasiat. Pemasukan, Penambahan, Keterangan Hak Waris, Pewarisan berdasarkan KUHPerdata, dan UU No. 1 Tahun 1974. Hukum Kewarisan Islam: Pengertian, asa, sumber hukum, sebab mewaris, unsur, golongan, garis hukum; prinsip lahirnya, Penghalang, Syarat-syarat, Rukun, Hak Kewarisan Islam; Penggolongan Ahli Waris, halangan mewaris, pembagian dan penyelesaian warisan.

●**Pengajar:** Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H.; Neng Djubaedah, S.H., M.H., Ph.D.; Milly Karmila Sareal, S.H., M.Kn.; Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum.

Hukum Aneka Perjanjian dan Jaminan (LWMN801007)

Capaian pembelajaran mampu menganalisis aneka perjanjian dan jaminan

Deskripsi Anatomi kontrak, Klausula dalam kontrak, jenis-jenis Kontrak, wanprestasi, jaminan perorangan, Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotik, Resi Gudang, Jaminan Pesawat Terbang.

● **Pengajar: Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.; Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.; Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.; Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H.; Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M.**

Penguasaan, Pendaftaran, Pengalihan Hak Atas Tanah (LWMN801008)

Kuliah ini diberikan agar mampu menganalisis dan menyelesaikan terkait dengan pendaftaran tanah.

Tujuan pemberian mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan baik secara teori maupun praktek mengenai cara penguasaan hak, pendaftaran hak, pemeliharaan perubahan yang terjadi pada hak atas tanah baik perubahan fisik maupun perubahan data yuridis hak atas tanah.

Deskripsi Teori dan praktek pendaftaran tanah: Pendaftaran untuk pertama kali, Pemeliharan Pendaftaran Tanah (untuk Pajak: PPH, BPHTP, PNBP)- Ke-PPAT-an.

Hukum Tentang Surat Berharga dan Pasar Modal (LWMN801010)

Capaian pembelajaran mampu menganalisis permasalahan dan penguasaan yang mendalam berkaitan dengan hukum tentang surat berharga dan hukum di bidang pasar modal yang berkaitan dengan notaris serta kesiapan notaris berpraktik di pasar modal.

Deskripsi: Peratran yang berkaitan dengan notaris di pasar modal, menjadi notaris di pasar modal, instrumen efek di pasar modal, perubahan anggaran dasar PT T|ertutup menjadi PT Terbuka, inisial Public offering, IPO, peranan notaris dalam aksi korporasi, Akta-akta Akuisisi, dan konsolidasi, konflik of interest, Otoritas Jasa Keuangan, Pelanggaran dan kejahatan di pasar modal, serta kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan notaris di pasar modal, dan go private.

- **Pengajar**: Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M.; Dr. Arman Nefi, S.H., M.M.

Teori dan Penemuan Hukum (LWMN801011)

Capaian pembelajaran mampu menganalisis permasalahan hukum melalui penerapkan Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Teori Hukum. Deskripsi: Mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa untuk mengetahui menganalisis dan memahami materi dasar Disiplin Ilmu yang meliputi Filsafat Hukum (sebagai Grand Theory), Teori hukum (sebagai Middle Theory), dan Ilmu Hukum (sebagai Appied Theory), sesuai dengan Politik Hukum pemerintah di bidang kenotariatan. Selain itu juga mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi, yang merupakan upaya untuk membekali mahasiswa agar terampil dalam membuat kesimpulan dan mengambil keputusan, khususnya bagi mahasiswa yang ingin menjadi notaris atau penegak hukum lainnya dengan menggunakan Metode Penafsiran Hukum, Argumentasi Hukum, dan menggunakan Teori Logika Silogisme yang dikemukakan oleh Aristoteles untuk menarik kesimpulan baik secara deduktif maupun induktif:

Metode Penulisan Ilmiah (LWMN801012)

Capaian pembelajaran mahasiswa mampu melakukan penelitian nsebagai kegiatan yang mendukung penyusunan tesis dan menulis artikel dalam journal kenotariatan.

Ruang lingkup materi mencakup:

1. Disiplin Hukum
2. Dasar-dasar Penelitian Hukum
3. Penyusunan Proposal tesin
4. Pengumpulan Data
5. Pengolahan dan Analisa Data
6. Teknik dan Tatacara Penulisan Tesis
7. Teknik dan Tatacara Penulisan Journal Ilmiah.

Tesis/Tugas Akhir (LWMN801013)

Capaian pembelajaran mampu menyusun tesis atau tugas akhir terkait dengan kasus kenotariatan.

Deskripsi: Studi kasus: Putusan Peradilan, Majelis Pengawas, Akta Notaris/PPAT.

Peraturan Lelang (LWMN803001)

Kuliah ini diberikan agar mahasiswa mampu menganalisis permasalahan lelang dan memberikan kemampuan untuk penyusunan Akta Risalah Lelang.

Ruang lingkup materi mencakup: Pembahasan peraturan lelang di Indonesia, termasuk membahas sejarah lelang, pengertian lelang, dasar hukum lelang di Indonesia, asas-asas yang kendasari lelang, fungsi lelang, klasifikasi lelang, pihak-pihak dalam pelelangan, prosedur lelang, berbagai jenis lelang di Indonesia serta penyusunan Risalah Lelang.

- **Pengajar: Aloysius Yanis Dhaniarto, S.H., LL.M.**

Hukum Pajak (LWMN803002)

Capaian pembelajaran mampu memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan perpajakan sesuai dengan asas perpajakan y ang berlaku dalam kegiatan kenotariatan .

Tujuan perkuliahan: Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep, prinsip, serta ketentuan-ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan jabatan Notaris/PPAT, serta memberikan kemampuan analisis ketentuan-ketentuan perpajakan yang menjadi kewajiban penghadapnya berkaitan dengan Akta yang dibuatnya.

Ruang lingkup materi meliputi: Sejarah, Pengertian, Teori, Asas dan Ketentuan Pajak, Penggolongan jenis pajak, fungsi, unsur-unsur pajak, tata cara perpajakan, penetapan pajak, penagihan, sanksi, dan penyelesaian sengketa Pajak. PPN, PPH, dlsb. Objek Wajib Pajak, Tax Amnesty, Pelunasan Pajak.

- **Pengajar:** Drs. Paulus Soelistyo, Ak., DESS-AF.

Hukum Kepailitan (LWMN803003)

Capaian pembelajaran mampu menganalisis permasalahan kepailitan dan kewajiban pembayaran hutang.

Deskripsi: Mencakup reformasi Hukum. Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pembuktian dan putusan perkara pailit, paksa badan, tanggung jawab organ perseroan.

- **Pengajar:** Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.; Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H.; Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M.

Pembuatan Akta Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual (LWMN803004)

Capaian pembelajaran mampu menerapkan prinsip hak kekayaan intelektual dalam akta.

Deskripsi:

1. Perbedaan dan persamaan Hak Cipta, Merek, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
2. Proses permohonan HKI
3. Penelusuran pendaftaran HKI
4. HKI sebagai intangible assets
5. Hal-hal yang harus diperhatikan bagi notaris dalam mebuat akta perjanjian di bidang HKI
6. Klausula-klausula penting dalam akta perjanjian di bidang HKI
7. Pembuatan akta perjanjian lisensi HKI
8. Pembuatan akta perjanjian jual beli merek
9. Pembuatan akta perjanjian waralaba.

- **Pengajar:** Prof. Dr. Insan Buda Maulana, S.H., LL.M.,; Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I.

Pembuatan Kontrak Internasional (LWMN803005)

Capaian pembelajaran mampu memahami dan terampil dalam menyusun kontrak bisnis internasional.

Deskripsi: Pengertian Dasar Kontrak Bisnis Internasional, Tahapan, Kontrak Bisnis, dan Peran In-house Counsil.

● **Pengajar:** Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.

Hukum Perbankan Bererkaitan Dengan Kenotariatan. (LWMN803006)

Capaian pembelajaran mampu menganalisis dan menerapkan konsep, sumber dana, pembiayaan. Deskripsi: Mata Kuliah Hukum Perbankan Berkaitan Dengan Kenotariatan:

Dalam perkuliahan ini akan dilakukan pembahasan dan diskusi disertai analisis atau kasus-kasus perbankan syariah yang actual, Fungsi dan Peran Bank Sentral

Dalam perkuliahan ini akan dilakukan pembahasan dan diskusi disertai analisis atau kasus-kasus perbankan syariah yang actual, Fungsi dan Peran Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah serta perlindungan hukum bagi Nasabah Bank; Sumber Dana Perbankan; Perlindungan Dana Nasabah Fungsi dan Peran LPS dalam Sistem Perbankan; Perkreditan/Pembiayaan dan Kredit/Pembiayaan Sindikasi beserta klausula perjanjiannya; Jasa-jasa dan Pelayanan Perbankan, Bank dan Transaksi Perdagangan Internasional dan Domestik; Notaris sebagai pihak terafiliasi dalam kegiatan usaha Bank; Kerahasisaan dalam kegiatan Perbankan Syariah (Rahasia Bank, Rahasia Perusahaan, Rahasia Dagang), dan Tindak Pidana di Perbankan dan Money Laundrering serta Kepailitan dan Likuidasi Bank.

● **Pengajar: Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H.; Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn., Dr. Ynus Husein, S.H., LL.M.**

Hukum Adat berkaitan dengan Kenotariatan (LWMN803007)

Capaian pembelajaran mampu menganalisis permasalah terkait dengan hukum adat.

Deskripsi: Kekeluargaan, Kewarisan, Tanah Adat, mencakup: orang, benda, dan hak waris.

Notaris dan Transaksi Elektronik (LWMN803008)

Capaian pembelajaran mampu menganalisis ketentuan hukum terkait transaksi elektronik di bidang kenotariatan.

Deskripsi: Mencakup ketentuan hukum yang mengatur mengenai informasi dan teknologi di bidang kenotariatan serta penerapan dan perlindungan bagi notaries.

● **Pengajar: Dr. Edmon Makarim, S.H., LL.M.; Abdul Salam, S.H., M.H.**

Pembetulan Akta Notaris (LWMN803009)

Capaian pembelajaran mampu menganalisis permasalahan akta notaris dan melakukan pembentulan. Deskripsi: Pengertian Ratifikasi: Pengukuhan Akta yang Cacat serta cara rekonstruksinya. Pembuatan Ratifikasi Akta: Akta yang dapat dibatalkan, Aneka Ragam Akta Terkait dengan Akta yang bermasalah.

● **Pengajar: Dr. Pieter E. Latumeten, S.H., M.H.**

PROGRAM DOKTOR

Filsafat Hukum (PSD30102)

Dalam kuliah filsafat Hukum pembahasan mencakup berbagai wilayah kajian filsafat hukum yaitu: ontologi hukum, aksiologi hukum, ideologi hukum, epistimologi hukum, teleologi hukum, ajaran ilmu hukum, logika hukum. Selain itu didiskusikan berbagai aliran filsafat, dan bagaimana menerapkan teori dan filsafat hukum sebagai meta teori hukum dalam membuat disertasi. Setiap mahasiswa mempresentasikan sesuai dengan rancangan proposal masing-masing.

● **Pengajar:** Agus Brotosusilo, Fernando Manullang, M. R. Andri Gunawan Wibisana, Jufrina Rizal.

Teori Ilmu Hukum (PSD30103)

Dalam mata kuliah ini dijelaskan dan didiskusikan berbagai teori di bidang hukum seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum Islam. Teori-teori ini diterapkan dalam pembuatan penulisan disertasi.

● **Pengajar:** Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Prof Hikmahanto Juwana, Prof. Satya Arinanto, Prof. Uswatun Hasanah, Andhika Danesjvara, Harsanto Nursadi, Tri Hayati.

Metode Penulisan Disertasi (PSD30104)

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiwa mampu menulis disertasi dengan baik. Pembahasan mencakup tujuan pembuatan disertasi, kerangka berpikir dalam penulisan serta teknik dan cara penulisan.

● **Pengajar:** Prof. Rosa Agustina, M. R. Andri Gunawan Wibisana.

Metode Penelitian Hukum Normatif (PSD30105)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang prosedur dan aplikasinya dalam suatu penelitian hukum. Pembahasan mencakup dasar filsafat ilmu hukum, konsep hukum, paradigma hukum dan konsekuensinya terhadap metode penelitian hukum normatif, cara serta tahapan dalam penelitian, telaah kepustakaan, serta penyusunan usulan penelitian yang diaplikasikan dalam pembuatan disertasi.

● **Pengajar:** Prof. Valerine J. L. Kriekhoff.

Metode Penelitian Hukum Empiris (PSD30106)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang prosedur dan aplikasinya dalam suatu penelitian hukum empiris. Pembahasan mencakup antara lain macam-macam penelitian hukum, jenis data, langkah-langkah melakukan penelitian hukum empiris, penyusunan rancangan penelitian, alat pengumpulan data, tatacara penerapan sampling, pengolahan, analisa dan konstruksi data.

● **Pengajar:** Prof. Harikristuti Harkrisnowo.

PENGAJAR PROGRAM PASCASARJANA

GURU BESAR TETAP

Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D., Prof.
(SH., FHUI 1975; MH., FH UNPAD 1993; Dr., Universiti Utara Malaysia)
Guru Besar Hukum Tata Negara.

Agus Sardjono, S.H., M.H., Dr., Prof.
(SH., FHUI 1987; MH., FHUI, Dr. FHUI 2004)
Guru Besar untuk Bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., Dr., Prof.
(SH., FHUI 1982; MH., FHUI 1989; Dr., FHUI 2001)
Guru Besar Hukum Perburuhan.

Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr., Prof.
(SH., FHUI 1984; MH., FHUI 1999; Dr., FHUI 2004)
Guru Besar Tetap Hukum Administrasi Negara khususnya dalam bidang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Arie Sukanti Hutagalung, S.H., MLI., Prof.
(SH., FHUI 1976; MLI., University of Wisconsin, Madison 1982)
Guru Besar dalam bidang Hukum Agraria

Felix Oentoeng Soebagjo, S.H., L.LM., Dr., Prof.
(SH., FHUI 1976; LLM., California School of Law 1980; Dr., FH UGM 2004)
Guru Besar dalam bidang Hukum Perusahaan.

Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., Prof.
(SH., FHUI 1979; MA., Sam Houston State Unversity 1988;
Dr., Sam Houston State Unversity 1999)
Guru Besar dalam Hukum Pidana dan ahli di bidang Hak Asasi Manusia.

Hikmahanto Juwana, S.H., L.LM., Ph.D., Prof.
(SH., FHUI 1987; LLM., Keio University 1992;
PhD., University of Nottingham 1997)
Guru Besar Hukum Internasional

Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., Dr., Prof.
(SH., FHUI 1982; MH., FHUI; Dr., FHUI 1993)
Guru Besar dalam Hukum Tata Negara.

Rosa Agustina, S.H., M.H., Dr., Prof.
(SH., FHUI 1985; MH., FHUI 1995; Dr., FHUI 2003)
Guru Besar dalam Bidang Hukum Keperdataan

Satya Arinanto, S.H., M.H., Dr., Prof.
(SH., FHUI 1990; MH., FHUI 1995; Dr., FHUI 2003)
Guru Besar dalam Bidang Hukum Tata Negara.

Sulistyowati Irianto, Dra., M.A., Dr., Prof.
(Dra., Antropologi FISIPOL UGM 1985; MA., Universiteit Leiden 1989;
Dr., Antropologi FISIP UI 2001)
Guru Besar dalam Bidang Antropologi Hukum.

Topo Santoso, S.H., M.H., Dr., Prof.
(SH., FHUI 1992; MH., UI 2000; Dr., Universiti Malaya 2009)
Guru Besar dalam Bidang Hukum Pidana

Uswatun Hasanah, Dra., M.A., Dr., Prof.
(Dra., IAIN Sunan Kalijaga 1980; MA., IAIN Syarif Hidayatullah
1990; Dr., IAIN Syarif Hidayatullah 1997)
Guru Besar dalam Bidang Hukum Islam

Melda Kamil Ariadno, SH., LLM, PhD,Prof.
(SH., FHUI 1992; LL.M., University of Washington 1992;
Ph.D., University of Washington 2011)
Guru Besar dalam Bidang Hukum Internasional

Maria Farida Indrati, S.H., M.H., Dr., Prof.
(SHFH UI 1975; MHUI 1997; DrFHUI 2002)
Guru Besar dalam Bidang Ilmu Perundang-Undangan

GURU BESAR TIDAK TETAP

1. **Achmad Z. Umar Purba, S.H., LL.M., Prof.**
   (S.H. FHUI 1974; LL.M. Harvard Law School 2003)

2. **Andi Hamzah, S.H., Dr.Prof.**
   (SH FHUnhas 1962; ; Dr FHUnhas 1982)

3. **Erman Radjagukguk, S.H., L.LM., Ph.D., Prof.**
   (S.H. FHUI 1974; LL.M. University of Washington 1984; PhD University of Washington 1985)

4. **Fathurrahman Djamil, M.A., Dr., Prof.**
   (MA IAIN Jakarta 1987; Dr Mc Gill University 1994)

5. **Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. Dr ., Prof.**
   (SH FHUI 1982; MH FHUI 1996; Dr FHUI 2000)

6. **Insan Budi Maulana, S.H., L.LM., Dr. Prof.**
   (SH FHUI 1986; LLM Kobe University 1992; Dr Kobe University 1998)

7. **Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., Prof.**
   (SH FHUI 1961; MA University of Pennsylvania 1967)

8. **Maria Farida Indrati, S.H., M.H., Dr., Prof.**
   (SH FHUI 1975; MH UI 1997; Dr FHUI 2002)

9. **Valerine J.L.Kriekhoff., S.H., M.A., Dr., Prof.**
   (SH FHUI 1969; MA University of Texas 1974; Dr FHUI 1991)

10. **Wahyono Darmabrata, S.H., M.H., Prof.**
    (SH FHUI 1967; MH UI 1989)

11. **Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H., Dr., Prof.**
    (SH FHUI 1967; MH UNPAD 1993; Dr FHUI 2003)

DOSEN

DOSEN TETAP PROGRAM MAGISTER

1. **Abdul Salam, S.H., M.H.**
   (SH FHUI 2002; MH FHUI 2007)
2. **Adijaya Yusuf, S.H., LL.M.**
   (SH FHUI 1983; LLM University of Sydney 1993)
3. **Andhika Danesjvara, S.H., M.Si., Dr.**
   (SH FHUI 1992; MSi FISIP UI 2002; Dr FHUI 2009)
4. **Arie Afriansyah, S.H., MLI., Ph.D.**
   (SH FHUI 2003; MIL University of Sydney 2007; PhD University of Otago 2013)
5. **Arman Nefi, S.H., MM., Dr.**
   (SH FHUI 2000; MM FEUI 2006, Dr FHUI 2015)
6. **Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc.**
   (SH FHUI 2008; MSc Maastricht University 2009)
7. **Brian Amy Prasetyo, S.H., MLI.**
   (SH FHUI 2003; MLI University of Wisconsin, Madison 2004)
8. **Budidharmono, S.H., M.SA., M.CL., Ph.D.**
   (SH FHUI 1979; MSA University of Michigan 1984; MCL George Washington 1986; PhD University of Melbourne 2005)
9. **Daly Erni, S.H., LL.M.**
   (SH FHUI 1990; LLM Seoul TLBU School of Law 2004)
10. **Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., Dr.**
    (SH FHUI 1996; MH FHUI 2006; Dr FHUI 2013)
11. **DithaWiradiputra, S.H., M.E.**
    (SH FHUI 2002; ME FEUI 2009)
12. **Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M., Dr.**
    (SKom Universitas Gunadarma 1993; SH FHUI 1994; LLM University of Washington 2004; Dr UI 2009)
13. **Eka Sri Sunarti, S.H., MSi.**
    (SH FHUI 1992; MSi Administrasi FiSIP UI 2006)
14. **Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., Dr.**
    (SH FHUI 1995; MH FHUI 2002; Dr UI 2009)

15. **Farida Prihatini, S.H., M.H.**
(SH FHUI 1985; CN FHUI 1996; MH FHUI 1996)
16. **Fatmawati, S.H., M.H., Dr.**
(SH FHUI 1996; MH FHUI 2002; Dr UI 2009)
17. **Fernando Manullang, S.H., M.H., Dr.**
(SH FHUI 2000; MH FHUI 2008; Dr FIB UI 2014)
18. **Fitra Arsil, S.H., M.H. Dr.**
(SH FHUI 2000; MH FHUI 2004, Dr FHUI 2015)
19. **Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H. Dr.**
(SH FHUI 1998; MH UI 2005, Dr FHUI 2015)
20. **Freddy Harris, S.H., LL.M. Dr.**
(SH FHUI 1992; LLM University of Groningen 1998; Dr UI 2007)
21. **Gemala Dewi, S.H., LL.M., Dr.**
(SH FHUI 1989; LLM American University 1999; Dr FHUI 2010)
22. **Hamid Chalid, S.H., LL.M., Dr.**
(SH FHUI 1992; LLM Melbourne University 1998; Dr FHUI 2009)
23. **Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M.**
(SH FHUI 2002; LLM American University 2004)
24. **Harsanto Nursadi, S.H., M.Si., Dr.**
(SH FHUI 1994; MSi FEUI 2003; Dr UI 2009)
25. **Henny Marlina, S.H., M.H., ML.I.**
(SH FHUI 2001; MH FHUI 2003; MLi University of Wisconsin 2004)
26. **Hendriani Parwitasari, S.H., M.Kn.**
(SH FHUI 1998; Mkn FHUI 2010)
27. **Heru Susetyo, SH, LL.M. M.Si., Ph.D.**
(SH FHUI 1996; MSi FISIP UI 2003; LLM Northwestern University 2003; Ph.D. Mahidol University 2014)
28. **Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H.**
(SH FHUI 1975; MA École des hautes études en sciences sociales 1985; Dr École des hautes études en sciences sociales 2003)
29. **Kurnia Toha, S.H., L.LM., Ph.D.**
(SH FHUI 1987; LLM University of Washington 1998; PhD University of Washington 2012)
30. **Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si., Dr.**
(SH FHUI 1996; MSi FISIP UI 2001; Dr FISIP UI 2014)
31. **LitaArijati, S.H., LL.M.**
(SH FHUI 1986; LLM University of Florida 1997)
32. **M. R. Andri G. Wibisana., S.H., L.LM., Ph.D.**
(SH FHUI 1999; LLM Utrecht University 2002; PhD Maastricht University 2002)
33. **Melania Kiswandari, SH. ,ML.I.**
(SH FHUI 1998; MLi University of Wisconsin 2014)
34. **Miftahul Huda, S.H., LL.M., Dr.**
(SH FHUI 1986; LLM University of Melbourne 1997; Dr FHUI 2010)
35. **Mustafa Fakhri, S.H., M.H., LL.M.**
(SH FHUI 2000; MH FHUI 2004; LLM Northwestern University 2006)
36. **Mutiara Hikmah, S.H., M.H., Dr.**
(SH FHUI 1995; MH FHUI 2002; Dr Universitas Pelita Harapan 2011)
37. **Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M.**
(D3 MIPA UI, SH FHUI 2002; MH Kyushu University 2007)
38. **R. Ismala Dewi, S.H., M.H., Dr.**
(SH FHUI 1987; MH FHUI 2001; Dr FHUI 2010)
39. **RanggalaweSuryasaladin, S.H., M.H., LL.M.**
(SH FHUI 2000; MH FHUI 2003; LLM American University 2004)
40. **Ratih Lestarini, S.H., M.H., Dr.**
(SH FHUI 1985; MH FHUI 2000; Dr FHUI 2014)
41. **Siti Hayati Hoesin, S.H.,M.H., CN., Dr.**
(SH FHUI 1986; MH UI 1996; Dr FHUI 2006)
42. **Suparjo Sujadi, S.H., M.H.,Dr.**
(SH FHUI 1994; MH FHUI 2002; Dr FHUI 2014)
43. **Surastini Fitriasih, S.H., M.H., Dr.**
(SH FHUI 1988; MH UI 1997; Dr FHUI 2006)
44. **Teddy Anggoro, S.H., M.H., Dr.**
(SH FHUI 2007; MH FHUI 2010, Dr FHUI 2015)
45. **Tri Hayati, S.H., M.H., Dr.**
(SH FHUI 1984; MH UI 1994; Dr FHUI 2011)
46. **WidodoSuryandono, Drs., S.H., M.H., Dr.**
(Drs IKIP Jakarta 1986; SH FHUI 1988; MH UI 1999; Dr FHUI 2006)
47. **Wirdyaningsih, S.H., M.H.**
(SH FHUI 1992; MH FHUI 2002)
48. **Yuli Indrawati, S.H., LL.M.**
(SH FHUI 1992; LLM Ruprecht-Karls Universita et Heidelberg 1998)
49. **Yoni Agus Setyono, S.H, M.H., Dr.**
(SH FHUI 1987; MH FHUI 2001; Dr FHUI 2008)
50. **Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H., Dr.**
(SH FHUI 1998; MH FHUI 2001; Dr FHUI 2010)
51. **Yetty Komalasari Dewi, S.H., ML.I., Dr.**
(SH FHUI 1993; MLI University of Wisconsin 2003; Dr FHUI 2012)
52. **Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M., Ph.D.**
(SH FHUI 2000; LLM Universiteit Leiden 2001; PhD University of Washington 2015)

DOSEN TIDAK TETAP PROGRAM MAGISTER

1. **Anna Maria Tri Anggraeni, S.H., M.H., Dr.**
   (SH FHUGM 1988; MH FH Untar 1996; Dr FHUI 2003)
2. **Adolf Warouw, S.H., LL.M.**
   (SH FHUI ; LLM Universitas Harvardiana 1976)
3. **Agus Brotosusilo, S.H., M.A., Dr.**
   (SH FHUI 1982; MA Brown University 1991; Dr FHUI 2006)
4. **Budi Riyanto, Drs., SH, M.Si., Dr.**
   (Drs IKIP Yogyakarta 1984; SH FHGM 1986; MSi Fisip UI 1996; Dr FHUI 2005)
5. **Cita Citrawinda, S.H., M.IP., Dr.**
   (SH FHUI 1985; MIP Franklin Pierce Law Center, Concord, New Hampshire AS 1993; Dr FHUI 1999)
6. **Damos Dumoli Agusman, S.H., LL.M., Dr.**
   (SH FH Unpad 1987; MA University of Hull, UK 1991; Dr Goethe University of Frankfurt 2014)
7. **Emmy Y. Ruru, S.H., L.LM.**
   (SH Universitas Airlangga 1979; LLM University of California 1981)
8. **Helena Norma Roring, S.H., M.H.**
   (SH FHUI; MH FHUI 2002)
9. **Inosentius Samsul, S.H., M.H., Dr.**
   (SH FHUGM 1989; MH FH Untar 1997; Dr. FHUI 2003)
10. **Indra Surya, S.H., LL.M., Dr.**
    (SH FHUI 1989; LLM American University 1998; Dr FHUI 2011)
11. **Jufrina Rizal, S.H., M.A., Dr.**
    (SH FHUI 1975; MA École des hautes études en sciences sociales 1985; Dr École des hautes études en sciences sociales 2003)
12. **Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., Dr.**
    (SH FHUI 1981; LLM University of Nottingham, United Kingdom 1991; Dr FHUI 2009)
13. **Muhammad Sapta Murti S.H., MA., M.Kn.**
    (SH FHUsakti 1983; MA Reading University United Kingdom 1993; MKn FHUI 2003)
14. **Neng Djubaedah, S.H., M.H., Ph.D.**
    (SH FHUI 1987; MH FHUI 2000; PhD Universiti Kebangsaan Malaysia 2013)
15. **Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Dr.**
    (SH FHUI 1985; MH FHUI 1993; Dr FHUI 2003)
16. **Pos M. Hutabarat, Ir., M.A. Dr.**
17. **R. Bambang Prabowo S., S.H., M.ES., Dr.**
    (SH FHUI 1987; MES 1991; Dr FHUI 1990)
18. **Rifki Ismal S.E., M.A., Ph.D.**
    (SH FEUI 1997; MA University of Michigan, USA 2003; Ph.D Durham University 2010)
19. **Soepandi, S.H., M.Hum., Dr.**
    (SH FHUSU 1981; MHum USU 2001; Dr FHUSU 2005)
20. **Sri Mamudji, S.H., M.LL.**
    (SH FHUI 1974; MLL University of Washington 1981)
21. **Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.**
    (SH FH UB 1983; LLM McGill University, Montreal, Canada 1991; PhD McGill University, Montreal, Canada 1998)
22. **Teguh M. Maramis, S.H., LL.M.**
    (SH FHUI 1988; LLM L University of Leiden 1994)
23. **Tjip Ismail, S.H., MBA, M.M., M.H. Dr.**
    (SH FH Undip 1970; MBA International Institute of Management 1992; MM Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta 1995; MH FHUI 2003; Dr. FHUI 2005)
24. **Todung Mulya Lubis, S.H, LL.M, PhD**
    (SH FH UI 1974; LLM Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, USA 1988; PhD University of California, Berkeley, USA 1990)
25. **Winarno Yudho, S.H., M.A.**
    (SH FH UNAIR 1979; MA Ohio University 1982)
26. **Yunus Husein, S.H., LL.M., Dr.**
    (SH FHUI 1980; LLM American University; Dr FHUI 2003)
27. **Zulkarnain Sitompul, S.H., L.LM., Dr.**
    (SH FH USU 1983; LL.M South Methodist University Texas 1992; Dr. FHUI 2002)

DOSEN TETAP PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

1. **Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn.**
   (SH FHUI 1988; MKn FHUI 2003)
2. **Abdul Salam, SH, MH**
   (SH FHUI 2002; MH FHUI 2007)
3. **Afdol, S.H., M.H.**
   (SH FHUI 1987; MH FHUI 2003)
4. **Agus Sardjono, S.H., M.H., Dr. Prof.**
   (SH FHUI 1987; MH FHUI; Dr FHUI 2004)
5. **Akhmad Budi Cahyono, S.H, M.H. Dr.**
   (SH FHUI 1998; MH FHUI 2002; Dr FHUI 2015)
6. **Arie Sukanti Sumantri, S.H., M.L.I., Prof.**
   (SH FHUI 1976; MLI University of Wisconsin, Madison 1982)
7. **Arman Nefi, S.H., M.M. Dr.**
   (SH FHUI 2000; MM FEUI 2006, Dr FHUI 2015)
8. **Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., Dr.**
   (SH FHUI 1996; MH FHUI 2006; Dr FHUI 2013)

9. **Felix Oentoeng Soebagijo, S.H., LL.M., Dr., Prof.**
(SH FHUI 1976; LLM University of California School of Law 1980; Dr UGM 2004)
10. **Freddy Harris, S.H., L.LM., Dr.**
(SH FHUI 1992; LLM University of Groningen 1998; Dr UI 2007)
11. **Hendriani Parwitasari, S.H., M.Kn.**
(SH FHUI 1998; Mkn FHUI 2010)
12. **Henny Marlina, S.H., M.H., M.L.I.**
(SH FHUI 2001; MH FHUI 2003; MLI University of Wisconsin 2004)
13. **Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Prof.**
(SH FHUI 1987; LLM Keio University 1992; PhD University of Nottingham 1997)
14. **Kurnia Toha, S.H., L.LM., Ph.D.**
(SH FHUI 1987; LLM University of Washington 1998; PhD University of Washington 2012)
15. **Marliesa Qadariani, S.H., M.H.**
(SH FHUI 2001; MH FHUI 2006)
16. **Miftahul Huda, S.H., L.LM., Dr.**
(SH FHUI 1986; LLM University of Melbourne 1997; Dr FHUI 2010)
17. **Parulian P. Aritonang, S.H., L.LM.**
(D3 MIPA UI, SH FHUI 2002; MH Kyushu University 2007)
18. **Rosa Agustina, S.H., M.H., Dr. Prof.**
(SH FHUI 1985; MH FHUI 1995; Dr FHUI 2003)
19. **Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI.**
(SH FHUI 2001; MLI University of Wisconsin 2004)
20. **Suparjo Sujadi, S.H., M.H.**
(SH FHUI 1994; MH FHUI 2002; Dr FHUI 2014)
21. **Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H.**
(SH FHUI 1974; MH FHUI 2000)
22. **Teddy Anggoro, S.H., M.H., Dr.**
(SH FHUI 2007; MH FHUI 2010, Dr FHUI 2015)
23. **Widodo Suryandono, Drs., S.H., M.H., Dr.**
(Drs IKIP Jakarta 1986; SH FHUI 1988; MH UI 1999; Dr FHUI 2006)
24. **Yati N. Soelistyono, S.H., CN.**
(SH FHUI 1983; CN FHUI 1989)
25. **Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H., Dr.**
(SH FHUI 1998; MH FHUI 2001; Dr FHUI 2010)
26. **Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I., Dr.**
(SH FHUI 1993; MLI University of Wisconsin 2003; Dr FHUI 2012)

DOSEN TIDAK TETAP PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

1. **A.Y. rto, S.H., LL.M.**
(SH UGM 1990; LLM Queens University At Kingston 1996)
2. **Alwesius, S.H., M.Kn. (Notaris)**
(SH FHUI ; MKn FHUI 2003)
3. **Amrul Partomuan Pohan, SH., LL.M., Dr.**
(Dr UNAIR 2003)
4. **Arsin Lukman, S.H, M.Kn., Dr. (Notaris)**
(SH FHUI 1983; Dr UNDIP 2007
5. **Ashoya Ratam, S.H., M.Sc., M.Kn. (Notaris)**
(SH FHUI 1996; MKn FHUI 2002
6. **Chairunnisa S. Selenggang, S.H., M.Kn.**
(SH FHUI 1970; MKn FHUI 2003)
7. **Enny Koeswarni, S.H., M.Kn. (Notaris)**
(SH FHUI 1980; MKn FHUI 2002)
8. **Imas Fatimah, S.H., M.Kn.**
(MKn FHUI 2006)
9. **Insan Budi Maulana, S.H., LL.M., Dr. Prof.**
(SH FHUI 1986; LLM Kobe University 1992; Dr Kobe University 1998)
10. **Liza Priandhini, SH., MKn. (Notaris)**
(MKn FHUI2013)
11. **Milly Karmila Sareal, S.H., M.Kn. (Notaris)**
(SH Univ Trisakti 1969; MKn FHUI 2005)
12. **Neng Djubaedah, S.H., M.H., Ph.D.**
(SH FHUI 1987; MH FHUI 2000; PhD Universiti Kebangsaan Malaysia 2013)
13. **Paulus Sulistiyo, Ak., DESS-AF., Drs.**
(Drs UGM 1976; DESS-AF Universite Paris IX 2014)
14. **Pieter E. Latumenten, S.H., M.H. (Notaris)**
(SH FHUI 1984; MH FHUI 1999)
15. **Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A., Dr.**
(Dr FHUI 2003)
16. **Sri Mamudji, S.H., M.L.L.**
(SH FHUI 1974; MLL University of Washington 1981)
17. **Wahyono Darmabrata, S.H., M.H., Prof.**
(SH FHUI 1967; MH UI 1989)
18. **Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum.**
(SH UNPAD 1969; MHum LPIHM-IBLM 1996)
19. **Yunus Husein, S.H., L.LM., Dr.**
(SH FHUI 1980; LLM American University; Dr FHUI 2003)
20. **Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn.**
(SH FHUI 2003; M.Kn. FHUI 2006)
21. **Tjong Sendrawan, S.H., M.Kn.**
(SH FHUI 1996; Spesialis FHUI 2001; M.Kn. FHUI 2015)

DOSEN TETAP PROGRAM DOKTOR

1. **Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., Prof.**
   (SH FHUI 1979; MA Sam Houston State Unversity 1988; Dr Sam Houston State Unversity 1999)
2. **Hikmahanto Juwana, S.H., L.LM., Ph.D., Prof.**
   (SH FHUI 1987; LLM Keio University 1992; PhD University of Nottingham 1997)
3. **Jimly Asshiddiqie, S.H, M.H., Dr., Prof.**
   (SH FHUI 1982; MH UI; Dr FHUI 1993)
4. **M. R. Andri G. Wibisana., S.H., LL.M., Ph.D.**
   (SH FHUI 1999; LLM Utrecht University 2002; PhD Maastricht University 2002)
5. **Rosa Agustina, S.H, M.H., Dr., Prof.**
   (SH FHUI 1985; MH FHUI 1995; Dr FHUI 2003)
6. **Satya Arinanto, S.H, M.H., Dr., Prof.**
   (SH FHUI 1990; MH FHUI 1995; Dr FHUI 2003)
7. **Topo Santoso, S.H., M.H., Dr. Prof.**
   (SH FHUI 1992; MH UI 2000; Dr Universiti Malaya 2009)
8. **Tri Hayati, S.H., M.H., Dr.**
   (SH FHUI 1984; MH UI 1994; Dr FHUI 2012)
9. **Melda Kamil Ariadno, SH., LL.M., Ph.D, Prof.**
   (SH FHUI 1992; LLM University of Washington 1995; PhD University of Washington 2011)
10. **Agus Sardjono, S.H., M.H., Dr. Prof.**
    (SH FHUI 1987; MH FHUI; Dr FHUI 2004)
11. **Surastini Fitriasih, S.H., M.H., Dr.**
    (SH FHUI 1988; MH UI 1997; Dr FHUI 2006)
12. **Uswatun Hasanah, Dra., M.A., Dr., Prof.**
    (Dra IAIN Sunan Kalijaga 1980; MA IAIN Syarif Hidayatullah 1990; Dr IAIN Syarif Hidayatullah 1997)
13. **Harsanto Nursadi, S.H., M.Si., Dr.**
    (SH FHUI 1994; MSi FEUI 2003; Dr UI 2009)
14. **Andhika Danesjvara, S.H., M.Si., Dr.**
    (SH FHUI 1992; MSi FISIP UI 2002; Dr FHUI 2009)

DOSEN TIDAK TETAP PROGRAM DOKTOR

1. **Jufrina Rizal, S.H., M.A., Dr.**
   (SH FHUI 1975; MA École des hautes études en sciences sociales 1985; Dr École des hautes études en sciences sociales 2003)
2. **Agus Brotosusilo, S.H., M.H., Dr.**
   (SH FHUI 1982; MA Brown University 1991; Dr FHUI 2006)
3. **Erman Radjagukguk, S.H., L.LM., Ph.D., Prof.**
   (SH FHUI 1974; LLM Univertsity of Washington 1984; PhD University of Washington 1985)
4. **Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Prof.**
   (SH FHUI 1969; MA University of Texas 1974; Dr FHUI 1991)

Orientasi Program Pascasarjana FHUI

JURNAL

Jurnal Hukum & Pembangunan

Jurnal Hukum & Pembangunan (JHP) merupakan salah satu jurnal hukum tertua di Indonesia. Terbit sejak tahun 1971 dengan nama Majalah Hukum & Pembangunan, JHP telah menjadi wadah terbitan yang memuat hasil pemikiran para pakar hukum Indonesia dari berbagai generasi. JHP memuat tulisan ilmiah dari berbagai bagian disiplin ilmu hukum baik itu hukum perdata, pidana, acara, ekonomi, administrasi negara, tata negara, internasional, hukum dan masyarakat, topik dasar ilmu hukum seperti filsafat hukum maupun perkembangan terkini dalam hukum seperti hukum teknologi.

JHP terbit empat kali dalam satu tahun setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Setiap terbitan JHP memuat baik itu artikel konseptual maupun artikel penelitian. Seluruh arsip digital JHP dari edisi paling pertama hingga edisi terbaru dapat diakses melalui laman web JHP.

ISSN: 0125-9687 (Cetak) | 2503-1465 (Daring)

Ketua redaksi: Dr. Fernando Manullang

Website : http://jhp.ui.ac.id

Terbit : Maret, Juni, September, Desember

Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)

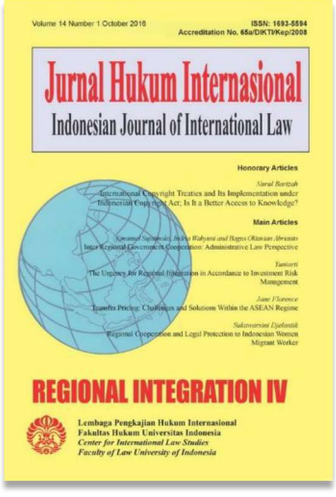

Indonesian Journal of International Law (IJIL) adalah jurnal yang secara khusus berfokus pada isu-isu mengenai hukum internasional. Diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Hukum Internasional (LPHI) empat kali dalam satu tahun secara tematik setiap edisinya. Tiap terbitan IJIL terdiri atas segmen *Honorary Article* yang memuat hasil pemikiran para pakar hukum internasional, *Main Articles* yang memuat artikel-artikel sesuai dengan tema per

edisinya. *General Articles* berupa artikel umum tentang hukum internasional maupun pembahasan terkait dengan hukum internasional, serta *Book Review, International Law Making,* dan *International Law News*.

Saat ini IJIL telah menerapkan kebijakan akses terbuka (*open access*) dan telah menjadi rujukan penting dalam topik perkembangan hukum internasional bagi Indonesia.

ISSN: 1693-5594 (cetak) / 2356-5527 (daring)

Ketua redaksi: Prof. Melda Kamil Ariadno

Website : http://ijil.ui.ac.id

Terbit : Oktober, Januari, April, Juli

Indonesia Law Review

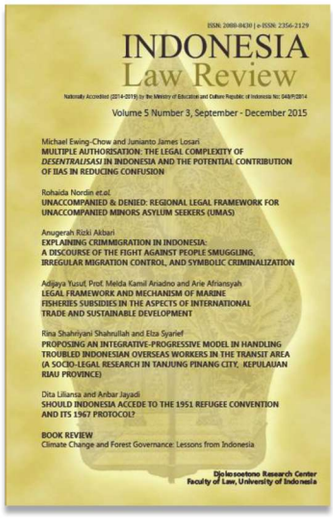

Indonesia Law Review (ILRev) adalah jurnal hukum berbahasa Inggris yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2011 oleh Djokosoetono Research Center sebagai media diseminasi pemikiran dan penelitian para pakar hukum Indonesia di kancah internasional. ILRev menerbitkan enam artikel dan satu *book review* dalam setiap terbitannya.

ILRev terbit tiga kali setiap tahun di bulan April, Agustus, dan Desember. Sejak tahun 2014, ILRev telah menerapkan kebijakan akses terbuka (*open access*), sehingga setiap artikel yang diterbitkan dapat diakses secara bebas secara daring.

Saat ini ILRev sedang dalam tahap persiapan indeksasi oleh Scopus dan telah menjadi rujukan penting dalam penelitian tentang atau terkait dengan hukum Indonesia bagi para ilmuan hukum mancanegara.

ISSN: 2088-8430 (cetak) / 2356-2129 (daring)

Editor-in-Chief: Arie Afriansyah, Ph.D.

Website : http://ilrev.ui.ac.id

Terbit : April, Agustus, Desember

TIM PENYUSUN
BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA

Ketua : Dr. Tri Hayati, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.
Irwan Hermawan

Anggota : Wahyu Andrianto, S.H., M.H.
Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H
Eka Sri Sunarti, S.H., M.Si.
Suhari
Suparman
Agung Putradianto
Claradika Floriany, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Magister Ilmu Hukum dan Doktor Ilmu Hukum
Kampus Salemba FHUI Gedung IASTH lantai 2 (021-31909008)

Program Magister kenotariatan
Gedung Lemtek lantai 3 (021-3917252)
Gedung E lantai 1 FHUI Depok (021-7872329